



Katalog BPS: 4102002

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2013



BADAN PUSAT STATISTIK



REPUBLIK INDONESIA

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2013



BADAN PUSAT STATISTIK



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2013

© 2013 : Badan Pusat Statistik
Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

ISSN : 2086-2369
Nomor Publikasi : 07310.1403
Katalog BPS : 4102002
Ukuran Buku : 17,6 cm × 25 cm
Jumlah Halaman : x + 115 halaman
Naskah : Subdirektorat Analisis Statistik
Diterbitkan Oleh : Badan Pusat Statistik

Kata Pengantar

Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan penghidupan yang layak. Semua indikator yang merepresentasikan ketiga dimensi ini terangkum dalam satu nilai tunggal, yaitu angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Angka IPM disajikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Penyajian IPM menurut daerah memungkinkan setiap provinsi dan kabupaten/kota mengetahui peta pembangunan manusia baik pencapaian, posisi, maupun disparitas antardaerah. Dengan demikian, maka diharapkan setiap daerah dapat terpacu untuk berupaya meningkatkan kinerja pembangunan melalui peningkatan kapasitas dasar penduduk.

Capaian pembangunan manusia pada tahun 2011-2013 menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Namun demikian, pencapaian dan kemajuan tersebut masih menyisakan pekerjaan dan tugas yang tidak ringan karena masih relatif tingginya disparitas pencapaian pembangunan antardaerah.

Semoga publikasi capaian pembangunan manusia Indonesia yang berjudul “Indeks Pembangunan Manusia 2013” ini bermanfaat bagi semua kalangan yang berkepentingan, termasuk masyarakat pengguna sebagai bahan rujukan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan publikasi ini.

Jakarta, Oktober 2014
Kepala Badan Pusat Statistik



Dr. Suryamin

Daftar Singkatan

AHH	: Angka Harapan Hidup
AKB	: Angka Kematian Bayi
AKBA	: Angka Kematian Balita
AMH	: Angka Melek Huruf
APS	: Angka Partisipasi Sekolah
ASEAN	: Association of South East Asian Nations
BOS	: Bantuan Operasional Sekolah
BPS	: Badan Pusat Statistik
DAU	: Dana Alokasi Umum
HDR	: Human Development Report
IHK	: Indeks Harga Konsumen
Inkesra	: Indikator Kesejahteraan Rakyat
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
LPMI	: Laporan Pembangunan Manusia Indonesia
MDGs	: Millenium Development Goals
MYS	: Mean of Years Schooling
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PPP	: Purchasing Power Parity
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SP	: Sensus Penduduk
Supas	: Survei Penduduk Antar Sensus
Susenans	: Survei Sosial Ekonomi Nasional
UNDP	: United Nations Development Programme
UUD	: Undang-undang Dasar

Daftar Isi

	<i>Hal</i>
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR SINGKATAN	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
KOTAK	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB 1 PENDAHULUAN	5
BAB 2 PENCAPAIAN PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA	11
2.1 Gambaran Pencapaian Pembangunan Manusia Indonesia	11
2.2 Gambaran Capaian Pembangunan Manusia Level Provinsi	14
2.3 Gambaran Capaian Pembangunan Manusia Level Kabupaten/Kota	18
BAB 3 PENINGKATAN KAPABILITAS DASAR MANUSIA	25
3.1 Capaian dan Tantangan Bidang Pendidikan	25
3.2 Capaian dan Tantangan Bidang Kesehatan	29
3.3 Tantangan di Bidang Ekonomi	34
BAB 4 DISPARITAS PENCAPAIAN PEMBANGUNAN MANUSIA ANTARWILAYAH	41
4.1 Disparitas IPM Provinsi di Indonesia	41
4.2 Disparitas IPM Antarkabupaten/Kota di Indonesia	44
4.3 Disparitas IPM Antarkabupaten/Kota di dalam Provinsi	46
4.4 Disparitas IPM Antara Wilayah Barat dan Wilayah Timur Indonesia	50
BAB 5 KESIMPULAN	57
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	65
CATATAN TEKNIS	107

Daftar Tabel

<i>No</i>	<i>Judul Tabel</i>	<i>Hal</i>
1.1	Peringkat IPM Negara-negara ASEAN, 2011, 2012 dan 2013	5
1.2	<i>World's "Top Movers" in HDI Improvement: 1970-2010</i>	6
2.1	IPM dan Peringkat IPM Menurut Provinsi, 2011-2013	15
2.2	Jumlah Provinsi Menurut Status Pencapaian IPM, 2011-2013	17
2.3	IPM dan PDRB per Kapita menurut Provinsi di Indonesia, 2013	18
2.4	Sepuluh Kabupaten/Kota dengan IPM Tertinggi, 2011-2013	19
2.5	Sepuluh Kabupaten/Kota dengan IPM Terendah, 2011-2013	20
3.1	Disparitas Angka Partisipasi Sekolah antarprovinsi, 2011-2013	27
3.2	Angka Putus Sekolah 13-15 tahun menurut Kelompok Pengeluaran, 2011-2013	28
3.3	Persentase Persalinan yang Ditolong Tenaga Medis, 2011-2013	31

Daftar Gambar

<i>No</i>	<i>Judul Gambar</i>	<i>Hal</i>
2.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 2011, 2012, 2013	11
2.2	Reduksi <i>Shortfall</i> Indonesia, 2011-2013	11
2.3	Angka Harapan Hidup Indonesia (AHH), 2011-2013	12
2.4	Angka Melek Huruf (AMH) Indonesia, 2011-2013	12
2.5	Rata-rata Lama Sekolah Indonesia (MYS), 2011-2013	13
2.6	Pengeluaran per Kapita per Tahun Disesuaikan (PPP) Indonesia, 2011-2013	13
2.7	Reduksi <i>Shortfall</i> Menurut Provinsi, 2011-2013	16
2.8	Status Pencapaian IPM Level Kabupaten/Kota, 2011-2013	20
3.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Indonesia, 2011-2013	25
3.2	APS 13-15 tahun Indonesia menurut Kuintil Pengeluaran, 2011-2013	26
3.3	Angka Putus Sekolah (APS) Indonesia, 2011-2013	27
3.4	Angka Putus Sekolah 13-15 tahun, 2013	28
3.5	Analisis Derajat Kesehatan (Konsep Hendrik L. Blum)	29
3.6	Indikator Lingkungan, 2011-2013	30
3.7	Persentase Desa Menurut Fasilitas Kesehatan	31
3.8	Persentase Persalinan yang Ditolong Tenaga Medis menurut Kuintil Pengeluaran, 2011-2013	32
3.9	Persentase Persalinan yang Ditolong Tenaga Medis Menurut Provinsi, 2013	32
3.10	Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Berobat Sendiri, 2011-2013	33
3.11	Persentase Penduduk Sakit yang Memanfaatkan Fasilitas Kesehatan, 2013	33
3.12	Persentase Penduduk Sakit yang Memanfaatkan Fasilitas Kesehatan menurut Kuintil Pengeluaran, 2013	33
3.13	Tren Kemiskinan di Indonesia, 2011-2013	34
3.14	Persentase Rumah Tangga Miskin di Perdesaan Menurut Sumber Penghasilan Utama, Maret 2013	35
3.15	Tren Gini Rasio Indonesia Menurut Perkotaan dan Perdesaan, 2011-2013	35
3.16	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia, 2011-2013	36
3.17	Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2013	36
4.1	Disparitas Pembangunan Manusia Antarprovinsi di Indonesia, 2011-2013	41
4.2	Disparitas Angka Harapan Hidup Antarprovinsi di Indonesia, 2011-2013	42
4.3	Disparitas Komponen Pendidikan Antarprovinsi di Indonesia, 2011-2013	42

<i>No</i>	<i>Judul Gambar</i>	<i>Hal</i>
4.4	Disparitas Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Antarprovinsi di Indonesia, 2011-2013	43
4.5	Reduksi <i>Shortfall</i> Provinsi Selama Periode 2011-2012 dan Periode 2012-2013	43
4.6	Disparitas Pembangunan Manusia Antarkabupaten/kota di Indonesia, 2011-2013	44
4.7	Disparitas Angka Harapan Hidup Antarkabupaten/kota di Indonesia, 2011-2013	45
4.8	Disparitas Angka Melek huruf Antarkabupaten/kota di Indonesia, 2011-2013	45
4.9	Disparitas Rata-rata Lama Sekolah Antarkabupaten/kota di Indonesia, 2011-2013	45
4.10	Disparitas Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Antarkabupaten/kota di Indonesia, 2011-2013	46
4.11	Rentang Pencapaian dan Standar Deviasi IPM Kabupaten/Kota dalam Provinsi, 2011-2013	47
4.12	Disparitas Komponen IPM Antarkabupaten di Provinsi Papua, 2011-2013	49
4.13	Disparitas Pembangunan Manusia Antarprovinsi di Bagian Barat dan Timur, 2011-2013	50
4.14	Disparitas Komponen IPM Antarprovinsi di Wilayah Barat dan Timur Indonesia, 2011-2013	51
4.15	Jumlah Kabupaten/Kota menurut Kategori Pencapaian Pembangunan Manusia di Wilayah Indonesia Bagian Barat dan Timur, 2011-2013	52

Kotak

<i>No</i>	<i>Judul Kotak</i>	<i>Hal</i>
2.1	Menerapkan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia	21
3.1	Empat Komponen Penting dalam Paradigma Pembangunan Manusia	37

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2013

Lampiran

<i>No</i>	<i>Judul Lampiran</i>	<i>Hal</i>
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Provinsi, 2013	65
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota, 2013	66
3	Tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota, 2011-2013	84
4	Tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Provinsi, 2007-2013	102
5	Tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Negara ASEAN, 2000-2013	103

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2013

Pendahuluan

Manusia merupakan kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Sudah sepantasnya apabila manusia menjadi tujuan utama dalam pembangunan. Keberhasilan pembangunan seharusnya memang tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan kualitas manusianya. Munculnya paradigma baru tersebut dipicu oleh kegagalan konsep pembangunan yang hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi. Sebelum tahun 1970-an, keberhasilan pembangunan semata-mata hanya diukur dari tingkat pertumbuhan *Gross National Product* (GNP). Faktanya masih kerap dijumpai negara-negara dengan tingkat pertumbuhan GNP yang tinggi namun kualitas manusianya masih rendah.

Menurut UNDP, pembangunan manusia dirumuskan sebagai upaya perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging the choices of people*) dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut. “Perluasan pilihan” hanya mungkin dapat direalisasikan jika penduduk paling tidak memiliki: peluang berumur panjang dan sehat, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta peluang untuk merealisasikan pengetahuan yang dimiliki dalam kegiatan yang produktif. Dengan kata lain, tingkat pemenuhan ketiga unsur tersebut sudah dapat merefleksikan, secara minimal, tingkat keberhasilan pembangunan manusia suatu wilayah.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya serius dalam rangka meningkatkan kualitas manusia Indonesia, baik dari aspek fisik (kesehatan), aspek intelektualitas (pendidikan), aspek kesejahteraan ekonomi (berdaya beli), maupun aspek moralitas (iman dan takwa). Seluruh upaya pemerintah tersebut merupakan prasyarat penting untuk mencapai masyarakat Indonesia yang berkualitas. Selama periode tahun 1996-2013, angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah meningkat 5,12 poin dari 68,69 menjadi 73,81.

Tabel 1.1
Peringkat IPM Negara-negara ASEAN, 2011, 2012 dan 2013

Negara	Peringkat IPM		
	2011	2012	2013
Indonesia	110 (187)	109 (187)	108 (187)
Singapura	12 (187)	11 (187)	9 (187)
Malaysia	61 (187)	62 (187)	62 (187)
Filipina	118 (187)	118 (187)	117 (187)
Brunei Darussalam	31 (187)	30 (187)	30 (187)
Thailand	91 (187)	89 (187)	89 (187)
Vietnam	121 (187)	121 (187)	121 (187)
Laos	139 (187)	139 (187)	139 (187)
Myanmar	150 (187)	150 (187)	150 (187)
Kamboja	137 (187)	137 (187)	137 (187)

Sumber: HDR 2013 (Hasil Backcasting)

Hal ini sangat konsisten dengan peningkatan komponen pembentuknya.

Komponen IPM menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, tetapi sepertinya daya unguhnya masih lemah. Terbukti dari masih bertahannya IPM pada kategori menengah atas, belum mampu naik kelas pada kategori IPM tinggi. Meskipun mengalami kenaikan menjadi peringkat ke-108, namun peringkat IPM Indonesia belum bisa menembus 100 besar dan berada di bawah peringkat negara tetangga seperti Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand.

Dari sisi level maupun peringkat, nampaknya Indonesia belum menunjukkan pencapaian yang optimal. Namun, kecepatan pencapaian pembangunan manusia Indonesia patut diapresiasi karena Indonesia masuk dalam *World's Top Movers in HDI improvement* pada periode 1970-2010. Selain dalam pencapaian HDI, Indonesia juga masuk dalam peringkat 10 besar pencapaian *Nonincome* HDI dan *Income*.

Tabel 1.2
World's "Top Movers" in HDI Improvement: 1970-2010

Rank	Improvement in		
	HDI	Nonincome HDI	Income
1	Oman	Oman	China
2	China	Nepal	Botswana
3	Nepal	Saudi Arabia	South Korea
4	Indonesia	Libya	Hong Kong China
5	Saudi Arabia	Algeria	Malaysia
6	Lao PDR	Tunisia	Indonesia
7	Tunisia	Iran	Malta
8	South Korea	Ethiopia	Vietnam
9	Algeria	South Korea	Mauritius
10	Morocco	Indonesia	India

Sumber: UNDP

Tinggi rendahnya nilai IPM tidak dapat dilepaskan dari program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah. Proses desentralisasi tampaknya telah membuka potensi-potensi wilayah untuk berkembang secara aktif dan mandiri. Kompetisi antarwilayah makin dinamis sebagai ajang adu kebijakan pembangunan manusia yang efektif dan efisien. Namun perlu disadari, perubahan atau peningkatan angka IPM tidak bisa terjadi secara instan. Pembangunan manusia merupakan sebuah proses dan tidak bisa diukur dalam waktu singkat. Berbeda dengan pembangunan ekonomi pada umumnya, hasil pembangunan pendidikan dan kesehatan tidak bisa dilihat dalam jangka pendek. Untuk itu, program-program pembangunan manusia harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan terus dipantau pelaksanaannya sehingga lebih terarah.

Otonomi daerah diharapkan mampu mengurangi kesenjangan capaian pembangunan manusia antar kota dan kabupaten-kabupaten di Indonesia. Wilayah perkotaan yang sarat dengan fasilitas pembangunan memiliki capaian pembangunan manusia yang lebih tinggi dibanding daerah-daerah di sekitarnya. Daya tarik kota membawa dampak pada berpindahnya penduduk yang lebih berkualitas ke kota. Sebagai dampaknya, daerah-daerah penyangga dan wilayah kabupaten memiliki capaian pembangunan yang relatif rendah. Melalui otonomi daerah, diharapkan masing-masing daerah mampu mengembangkan program-program yang spesifik disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah sehingga kualitas pembangunan manusianya dapat ditingkatkan.

Publikasi ini dilengkapi dengan analisis mengenai capaian dan kemajuan IPM dan komponen IPM pada tahun 2011-2013. Secara umum, publikasi ini akan menyajikan data dan analisis IPM selama tahun 2011-2013. Data IPM secara lengkap pada tahun 2011-2013 dapat dilihat pada tabel lampiran. Pada publikasi ini akan dianalisis mengenai capaian IPM Indonesia dan disparitasnya baik level provinsi maupun kabupaten/kota, serta disparitas antar wilayah kabupaten dan kota.

Secara khusus, publikasi ini menyajikan:

1. Pencapaian pembangunan manusia di Indonesia;
2. Analisis peningkatan kapabilitas dasar manusia Indonesia;
3. Analisis disparitas capaian IPM dan komponennya baik level provinsi maupun level kabupaten/kota;
4. Analisis disparitas IPM antara wilayah kabupaten dan kota.

Pencapaian Pembangunan Manusia Indonesia

2.1 Gambaran Pencapaian Pembangunan Manusia Indonesia

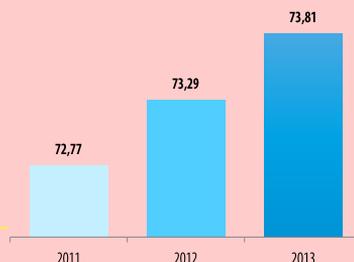
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia.

“IPM Terus Meningkat dari Tahun 2011-2013”

Pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami perbaikan, terlihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia yang terus meningkat dari tahun 2011 hingga 2013 (lihat Gambar 2.1). IPM Indonesia naik 1,04 poin dalam jangka waktu 3 tahun. Capaian IPM yang terus meningkat dari tahun ke tahun merupakan indikasi positif bahwa kualitas manusia di Indonesia yang dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi juga semakin membaik.

Gambar 2.1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2011, 2012, 2013

Sumber: Badan Pusat Statistik



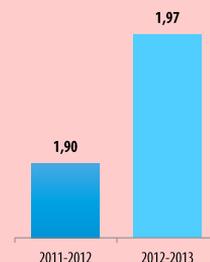
Berdasarkan skala internasional, capaian IPM dikategorikan menjadi kategori tinggi ($IPM \geq 80$), kategori menengah atas ($66 \leq IPM < 80$), kategori menengah bawah ($50 \leq IPM < 66$), dan kategori rendah ($IPM < 50$). Sejak tahun 1996, IPM Indonesia telah mencapai level menengah atas. Pada tahun 1999 dan 2002 capaian tersebut turun menjadi level menengah bawah akibat krisis moneter yang melanda Indonesia. Baru pada tahun 2004 level capaian IPM kembali meningkat seperti semula dan sampai sekarang kategori capaian tersebut masih stagnan pada level menengah atas.

“Kecepatan IPM per tahun Hampir Sama”

Keberhasilan pembangunan manusia tidak hanya diukur dari tingginya capaian angka IPM di suatu wilayah, tetapi juga melihat kecepatan dalam peningkatan IPM. Untuk

Gambar 2.2
Reduksi *Shortfall* Indonesia, 2011-2013

Sumber: Badan Pusat Statistik



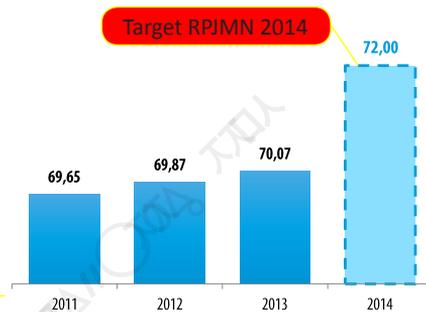
mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran reduksi *shortfall* per tahun. Semakin rendah kecepatan peningkatan IPM, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai nilai IPM yang ideal karena reduksi *shortfall* merupakan gambaran laju pergerakan IPM untuk mencapai nilai idealnya yaitu 100. Dengan kata lain, reduksi *shortfall* menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian yang harus ditempuh untuk mencapai titik IPM ideal. Kecepatan Indonesia untuk mencapai IPM ideal per tahun, yaitu tahun 2011-2012 dan 2012-2013 hampir sama meskipun pada periode 2012-2013 sedikit lebih cepat dibandingkan periode 2011-2012.

“Angka Harapan Hidup Masih Jauh dari Target RPJMN 2014”

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian

Gambar 2.3
Angka Harapan Hidup (AHH) Indonesia, 2011-2013

Sumber: Badan Pusat Statistik



IPM tidak lepas dari peningkatan dari setiap komponen penyusunnya. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, komponen penyusun IPM juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

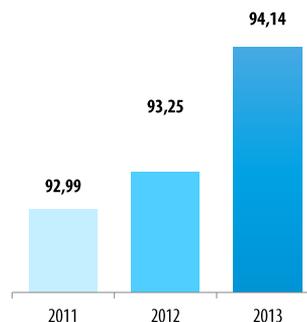
Indikator Angka Harapan Hidup (AHH) yang merepresentasikan aspek kesehatan, terus meningkat dari tahun 2011-2013. Semakin meningkatnya AHH di Indonesia mengindikasikan bahwa derajat kesehatan masyarakat di Indonesia semakin membaik karena AHH merupakan salah satu tolok ukur derajat kesehatan masyarakat. Namun demikian, dalam jangka waktu 3 tahun Indonesia hanya berhasil meningkatkan AHH sebesar 0,42 tahun dari 69,65 tahun menjadi 70,07 tahun. Padahal dalam RPJMN pemerintah menargetkan AHH Indonesia sebesar 72 tahun pada tahun 2014. Nampaknya diperlukan upaya ekstra dalam menggalakkan pembangunan di bidang kesehatan untuk meningkatkan AHH sebesar 1,93 tahun dalam jangka waktu 1 tahun.

“Target Penurunan Angka Buta Aksara Hampir Tercapai”

Aspek pendidikan pada IPM dicerminkan oleh indikator Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (MYS). Capaian AMH Indonesia meningkat 1,14 persen selama 3 tahun. Kenaikan AMH ini

Gambar 2.4
Angka Melek Huruf (AMH) Indonesia, 2011-2013

Sumber: Badan Pusat Statistik



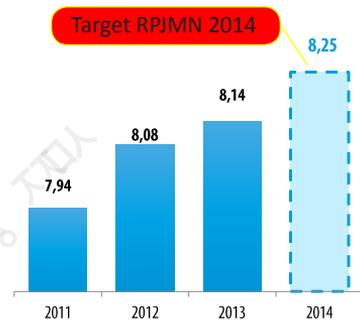
dapat diartikan juga sebagai penurunan Angka Buta Huruf (ABH). Gambar 2.4 menunjukkan bahwa pada tahun 2011 hingga 2013, penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak memiliki kemampuan membaca dan menulis menurun menjadi 5,86 persen. Sementara itu, target RPJMN tahun 2014 adalah tercapainya angka buta aksara sebesar 4,18 persen. Hal tersebut sepertinya bukan hal yang mustahil untuk dicapai karena pemerintah hanya perlu menurunkan 1,68 persen penduduk buta huruf dari tahun 2013 hingga 2014. Meskipun demikian, pemerintah harus tetap konsisten dalam menjalankan program-programnya di bidang pendidikan agar target yang diinginkan dapat tercapai.

“Rata-rata Lama Sekolah Hampir Mencapai Target RPJMN 2014”

Selain AMH, komponen pendidikan lain yang digunakan untuk menggambarkan aspek pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah (MYS). Dari Gambar 2.5 terlihat bahwa MYS Indonesia terus meningkat dari tahun 2011 sampai 2013 meskipun peningkatannya relatif lambat. Pada tahun 2011 rata-rata penduduk Indonesia

Gambar 2.5
Rata-rata Lama Sekolah Indonesia (MYS), 2011-2013

Sumber: Badan Pusat Statistik



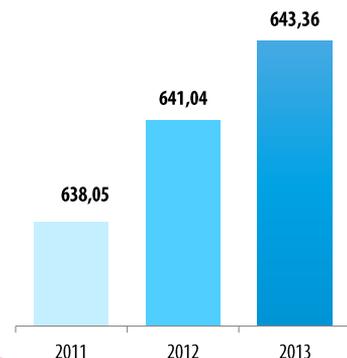
yang berumur 15 tahun ke atas bersekolah sampai kelas 2 SMP (belum tamat). Pada tahun berikutnya rata-rata lama sekolah berhasil naik 1 tingkat menjadi setara kelas 3 SMP. Kemudian pada tahun 2013 rata-rata lama sekolah masih berada pada level yang sama karena hanya meningkat 0,06 tahun. Sementara itu, target rata-rata lama sekolah yang ingin dicapai pemerintah dalam RPJMN 2014 adalah 8,25 tahun. Dalam hal ini pemerintah hanya perlu meningkatkan angka MYS sebesar 0,11 untuk mencapai target tahun 2014.

“Pengeluaran per Kapita Disesuaikan terus Bergerak Naik namun Masih Jauh dari Target”

Aspek terakhir yang menggambarkan kualitas hidup manusia yaitu standar hidup layak yang direpresentasikan melalui indikator pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh penduduk dan sensitif terhadap perubahan kondisi perkeekonomian. Terbukti bahwa pada saat krisis moneter melanda Indonesia tahun 1999, nilai pengeluaran per kapita disesuaikan turun dari 587,40 ribu rupiah (tahun dasar 1989) menjadi 578,80 ribu rupiah. Selama periode 3 tahun (2011-2013) pengeluaran per kapita

Gambar 2.6
Pengeluaran per Kapita per Tahun Disesuaikan (PPP) Indonesia, 2011-2013

Sumber: Badan Pusat Statistik



disesuaikan Indonesia meningkat sebesar 5,31 ribu rupiah. Namun meskipun terus meningkat, ternyata pengeluaran per kapita disesuaikan Indonesia masih jauh dari target Pembangunan Jangka Panjang yang ingin dicapai pada tahun 2018 yaitu sebesar 732,72 ribu rupiah.

2.2 Gambaran Capaian Pembangunan Manusia Level Provinsi

Keberagaman potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia antardaerah menyebabkan capaian pembangunan manusia berbeda pada setiap wilayah. Keberhasilan program-program pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah juga menentukan tinggi rendahnya capaian pembangunan manusia dalam suatu wilayah. Selain itu, diperlukan juga upaya pengawasan dan evaluasi terhadap program-program pembangunan untuk mempercepat peningkatan pembangunan manusia.

“Pembangunan Manusia Level Provinsi Terus Meningkat”

Apabila dilihat secara sekilas pembangunan manusia pada setiap provinsi menunjukkan pola peningkatan yang sama dengan capaian pembangunan manusia pada level nasional. Angka IPM pada masing-masing provinsi meningkat dari tahun 2011-2013. Namun jika diperhatikan peringkatnya, terdapat variasi kenaikan maupun penurunan pada beberapa provinsi.

Provinsi dengan peringkat IPM tertinggi adalah DKI Jakarta. Sejak pertama kali dihitung hingga tahun 2013, capaian IPM Provinsi DKI Jakarta selalu paling tinggi diantara provinsi lainnya. Ketersediaan sarana kesehatan, pendidikan, dan perekonomian serta kemudahan akses terhadap semua sarana tersebut membuat Provinsi DKI Jakarta lebih unggul dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Kondisi ini menjadi salah satu faktor pendorong tingginya capaian pembangunan manusia di Provinsi DKI Jakarta.

Secara umum dari tahun 2011-2012 peringkat IPM provinsi tidak banyak mengalami perubahan. Hanya beberapa provinsi yang mengalami pertukaran peringkat, diantaranya Jawa Tengah dengan Bali, Aceh dengan Sulawesi Selatan, serta Kalimantan Selatan dengan Sulawesi Tenggara.

Pergeseran peringkat yang signifikan terjadi pada tahun 2013. Hal ini terutama dialami oleh 4 provinsi dengan capaian IPM tertinggi setelah DKI Jakarta. Pada tahun 2011 dan 2012, provinsi yang menduduki peringkat 2, 3, 4, dan 5 dalam capaian IPM secara berturut-turut adalah Provinsi Sulawesi Utara, Riau, DI Yogyakarta, dan Kalimantan Timur. Namun pada tahun 2013, provinsi yang menduduki peringkat 2, 3, 4, dan 5 dalam capaian IPM secara berturut-turut adalah DI Yogyakarta, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, dan Riau. Secara umum pergeseran peringkat tersebut disebabkan oleh peningkatan capaian pendidikan yang lebih cepat dari provinsi lainnya.

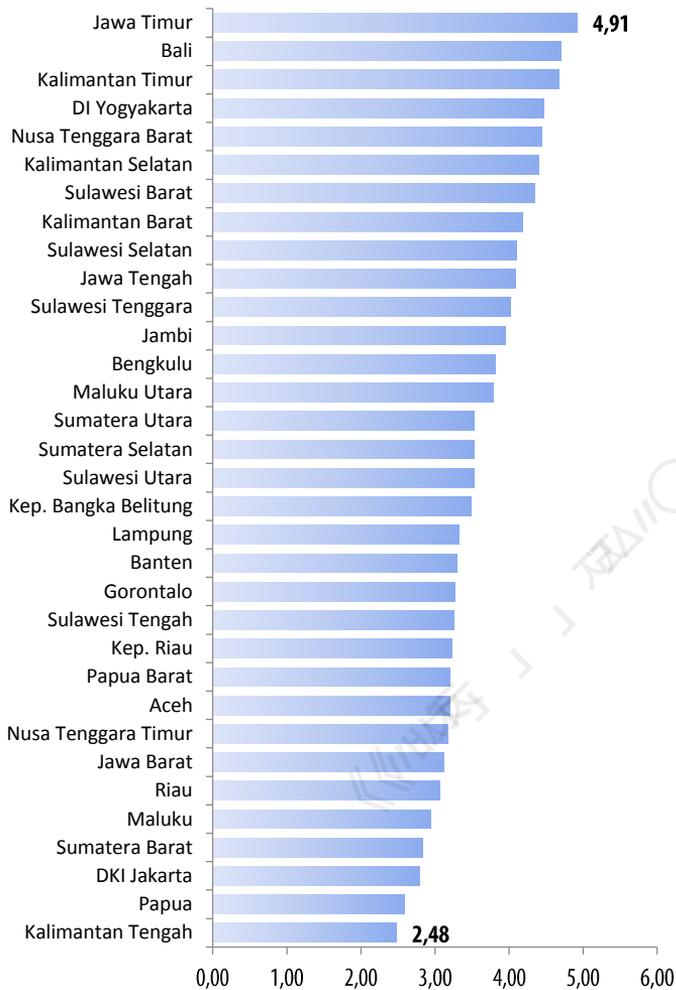
Tabel 2.1
IPM dan Peringkat IPM Menurut Provinsi, 2011-2013

Provinsi	IPM			Peringkat		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Aceh	72,16	72,51	73,05	18	19	20
Sumatera Utara	74,65	75,13	75,55	8	8	8
Sumatera Barat	74,28	74,70	75,01	9	9	9
Riau	76,53	76,90	77,25	3	3	5
Jambi	73,30	73,78	74,35	13	13	13
Sumatera Selatan	73,42	73,99	74,36	10	10	12
Bengkulu	73,40	73,93	74,41	11	11	11
Lampung	71,94	72,45	72,87	20	20	21
Kep. Bangka Belitung	73,37	73,78	74,29	12	12	14
Kep. Riau	75,78	76,20	76,56	6	6	6
DKI Jakarta	77,97	78,33	78,59	1	1	1
Jawa Barat	72,73	73,11	73,58	16	16	17
Jawa Tengah	72,94	73,36	74,05	14	15	16
DI Yogyakarta	76,32	76,75	77,37	4	4	2
Jawa Timur	72,18	72,83	73,54	17	17	18
Banten	70,95	71,49	71,90	23	23	24
Bali	72,84	73,49	74,11	15	14	15
Nusa Tenggara Barat	66,23	66,89	67,73	32	32	33
Nusa Tenggara Timur	67,75	68,28	68,77	31	31	32
Kalimantan Barat	69,66	70,31	70,93	28	28	29
Kalimantan Tengah	75,06	75,46	75,68	7	7	7
Kalimantan Selatan	70,44	71,08	71,74	26	25	26
Kalimantan Timur	76,22	76,71	77,33	5	5	4
Kalimantan Utara	-	-	74,72	-	-	10
Sulawesi Utara	76,54	76,95	77,36	2	2	3
Sulawesi Tengah	71,62	72,14	72,54	22	22	23
Sulawesi Selatan	72,14	72,70	73,28	19	18	19
Sulawesi Tenggara	70,55	71,05	71,73	25	26	27
Gorontalo	70,82	71,31	71,77	24	24	25
Sulawesi Barat	70,11	70,73	71,41	27	27	28
Maluku	71,87	72,42	72,70	21	21	22
Maluku Utara	69,47	69,98	70,63	30	30	30
Papua Barat	69,65	70,22	70,62	29	29	31
Papua	65,36	65,86	66,25	33	33	34

Selain itu pergeseran peringkat terjadi karena masuknya Provinsi Kalimantan Utara sebagai provinsi baru di Indonesia. Provinsi ini menduduki peringkat 10 sehingga provinsi ini menggeser peringkat provinsi lainnya.

Pergeseran peringkat pada pencapaian IPM bukan berarti terjadi penurunan kualitas manusia, namun pembangunan manusia pada provinsi-provinsi tersebut kalah cepat dibandingkan provinsi-provinsi lain. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan reduksi *shortfall* antarprovinsi.

Provinsi yang konsisten berada pada lima peringkat IPM terendah dari tahun 2011-2013 adalah provinsi yang berada pada kawasan timur Indonesia yaitu Papua, NTB, NTT, Maluku Utara, dan Papua Barat. Selama kurun waktu 3 tahun (2011-2013) terdapat beberapa provinsi yang mengalami penurunan peringkat IPM.



Gambar 2.7
Reduksi *shortfall*
Menurut Provinsi,
2011-2013

Sumber: Badan Pusat Statistik

Selain capaian IPM, keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah juga dilihat berdasarkan kecepatan pergerakan IPM menuju nilai ideal yang direpresentasikan melalui reduksi *shortfall*. Nilai reduksi *shortfall* selama periode 2011-2013 menunjukkan bahwa kecepatan peningkatan IPM provinsi per tahun berkisar antara 2,48 sampai 4,91 persen (Gambar 2.7). Provinsi dengan kecepatan IPM tertinggi diantaranya adalah Jawa Timur, Bali, dan Kalimantan Timur. Sementara itu, provinsi yang paling lambat adalah Kalimantan Tengah, Papua, dan DKI Jakarta.

Kemajuan pencapaian pembangunan manusia juga dapat dilihat dengan menghitung banyak provinsi yang telah meningkat status pencapaian IPM-nya. Pada tahun 2011 dan 2012 masih terdapat satu provinsi yang masuk dalam kategori IPM menengah bawah,

yaitu Provinsi Papua. Namun, pada tahun 2013, Papua berhasil meningkatkan status pencapaian IPM-nya menjadi menengah atas sehingga seluruh provinsi di Indonesia termasuk dalam kategori IPM menengah atas.

Tabel 2.2
Jumlah Provinsi Menurut Status Pencapaian IPM, 2011-2013

Kategori	2011	2012	2013
Rendah	0	0	0
Menengah Bawah	1	1	0
Menengah Atas	32	32	34
Tinggi	0	0	0

Sumber: Badan Pusat Statistik

“PDRB tidak Selalu Sejalan dengan Capaian Pembangunan Manusia”

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang selama ini digunakan untuk mengukur kemajuan ekonomi suatu wilayah, tidak secara langsung berkaitan dengan pembangunan manusia. Di satu sisi, provinsi-provinsi tertentu memperlihatkan adanya keterkaitan antara kekayaan ekonomi daerah dengan pembangunan manusia yang sejalan dengan nilai IPM-nya. Di sisi lain, provinsi yang memiliki kekayaan ekonomi yang besar tetapi justru memiliki nilai IPM yang rendah.

Tabel 2.3 memperlihatkan bahwa potensi ekonomi suatu wilayah yang diukur dengan PDRB per kapita tidak serta merta mencerminkan tingkat pembangunan manusia yang telah dicapai. Provinsi Papua Barat dengan peringkat ke-4 PDRB per kapita secara nasional pada kenyataannya kualitas pembangunannya tidak lebih baik dari Bengkulu yang peringkat PDRB per kapitanya di bawah Papua Barat. Sebaliknya, DI Yogyakarta dengan PDRB per kapita yang berada pada peringkat ke-23 nasional ternyata tingkat pembangunan manusia yang dicapai cukup tinggi yaitu peringkat ke-2 nasional.

Fenomena-fenomena di atas pada dasarnya telah melemahkan berbagai pendapat yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah jalan tercepat mencapai pembangunan manusia. Pada hakikatnya, pembangunan manusia bertujuan untuk memperluas pilihan-pilihan manusia, salah satunya pada aspek ekonomi. Jadi, pembangunan manusia tidak anti terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi yang perlu dipahami adalah pertumbuhan ekonomi bukan satu-satunya alat mencapai pembangunan manusia. Pemahaman yang keliru tentang konsep pembangunan manusia akan memunculkan anggapan bahwa PDRB gagal menjadi indikator kemajuan ekonomi.

Tabel 2.3
IPM dan PDRB per Kapita menurut Provinsi di Indonesia, 2013

Provinsi	IPM	PDRB (juta)	Rank IPM	Rank PDRB	Selisih Rank
Aceh	73,05	7,90	20	20	0
Sumatera Utara	75,55	10,49	8	8	0
Sumatera Barat	75,01	9,21	9	15	-6
Riau	77,25	18,08	5	5	0
Jambi	74,35	6,69	13	25	-12
Sumatera Selatan	74,36	9,76	12	10	2
Bengkulu	74,41	5,54	11	28	-17
Lampung	72,87	5,81	21	27	-6
Kep. Bangka Belitung	74,29	9,81	14	9	5
Kepulauan Riau	76,56	26,68	6	3	3
DKI Jakarta	78,59	47,87	1	1	0
Jawa Barat	73,58	8,53	17	17	0
Jawa Tengah	74,05	6,71	16	24	-8
D I Yogyakarta	77,37	6,83	2	23	-21
Jawa Timur	73,54	10,93	18	7	11
Banten	71,90	9,24	24	14	10
Bali	74,11	8,58	15	16	-1
Nusa Tenggara Barat	67,73	4,33	33	30	3
Nusa Tenggara Timur	68,77	2,98	32	34	-2
Kalimantan Barat	70,93	7,77	29	21	8
Kalimantan Tengah	75,68	9,64	7	12	-5
Kalimantan Selatan	71,74	9,39	26	13	13
Kalimantan Timur	77,33	34,35	4	2	2
Kalimantan Utara	74,72	16,47	10	6	4
Sulawesi Utara	77,36	9,69	3	11	-8
Sulawesi Tengah	72,54	8,25	23	18	5
Sulawesi Selatan	73,28	7,71	19	22	-3
Sulawesi Tenggara	71,73	6,28	27	26	1
Gorontalo	71,77	3,32	25	31	-6
Sulawesi Barat	71,41	4,95	28	29	-1
Maluku	72,70	3,14	22	33	-11
Maluku Utara	70,63	3,28	30	32	-2
Papua Barat	70,62	18,18	31	4	27
Papua	66,25	8,12	34	19	15

Sumber: Badan Pusat Statistik

2.3 Gambaran Capaian Pembangunan Manusia Level Kabupaten/Kota

Tujuan pembangunan manusia yang paling utama adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi penduduknya untuk memperluas pilihan-pilihan yang dimiliki manusia. Lingkungan tersebut harus tersedia hingga wilayah yang paling kecil untuk memastikan bahwa pembangunan manusia merata di semua wilayah sesuai dengan amanah konstitusi yang tercantum dalam Pancasila yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh

Rakyat Indonesia”. Pemerataan pembangunan dalam berbagai bidang akan mampu mendorong peningkatan capaian pembangunan manusia tidak hanya pada level provinsi tetapi juga pada level kabupaten/kota.

“Sepuluh Kabupaten/Kota dengan IPM Tertinggi Mengalami Pertukaran pada Tahun 2011-2013”

Perkembangan IPM pada level kabupaten/kota menunjukkan peningkatan dari tahun 2011-2013. Selama periode 2011-2013, kabupaten/kota yang bertahan menduduki peringkat 1 dan 2 dalam capaian IPM secara berturut-turut adalah Kota Yogyakarta dan Kota Jakarta Selatan. Selama periode tersebut juga terjadi pergeseran peringkat pada beberapa kabupaten/kota dengan sepuluh IPM tertinggi.

Tabel 2.4

Sepuluh Kabupaten/Kota dengan IPM Tertinggi, 2011-2013

Kab/Kota	IPM 2011	Kab/Kota	IPM 2012	Kab/Kota	IPM 2013
Kota Yogyakarta	79,89	Kota Yogyakarta	80,24	Kota Yogyakarta	80,51
Kota Jakarta Selatan	79,82	Kota Jakarta Selatan	80,17	Kota Jakarta Selatan	80,47
Kota Depok	79,36	Kota Jakarta Timur	79,80	Kota Makasar	80,17
Kota Jakarta Timur	79,31	Kota Depok	79,71	Kota Depok	80,14
Kota Makasar	79,11	Kota Makasar	79,49	Kota Jakarta Timur	80,07
Kota Jakarta Barat	79,09	Kota Jakarta Barat	79,43	Sleman	79,97
Kota Ambon	78,97	Kota Ambon	79,41	Kota Balikpapan	79,87
Kota Balikpapan	78,85	Sleman	79,39	Kota Jakarta Barat	79,69
Sleman	78,79	Kota Balikpapan	79,38	Kota Ambon	79,58
Kota Palangka Raya	78,78	Kota Palangka Raya	79,30	Kota Palangka Raya	79,52

Sumber: Badan Pusat Statistik

Kota Makasar pada tahun 2013 menduduki peringkat ke-3 menggantikan Kota Jakarta Timur dan Kota Depok yang pada tahun-tahun sebelumnya memiliki capaian di atas Kota Makasar. Jika dibandingkan dengan Kota Depok, dalam jangka waktu 3 tahun (2011-2013) Kota Makasar berhasil meningkatkan angka harapan hidup sebesar 0,56 tahun sementara Kota Depok hanya 0,42 tahun. Selain itu rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf Kota Makasar juga meningkat lebih cepat dari Kota Depok selama periode 2011-2013.

“Sepuluh Kabupaten/Kota dengan IPM Terendah Berada di Provinsi Papua”

Secara umum, kabupaten yang menempati 10 terendah dalam capaian IPM sama dari tahun 2011-2013, perbedaan hanya terjadi pada perubahan peringkat. Sepuluh posisi terbawah diisi oleh kabupaten-kabupaten yang berada di Provinsi Papua. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Papua untuk meningkatkan pembangunan manusia.

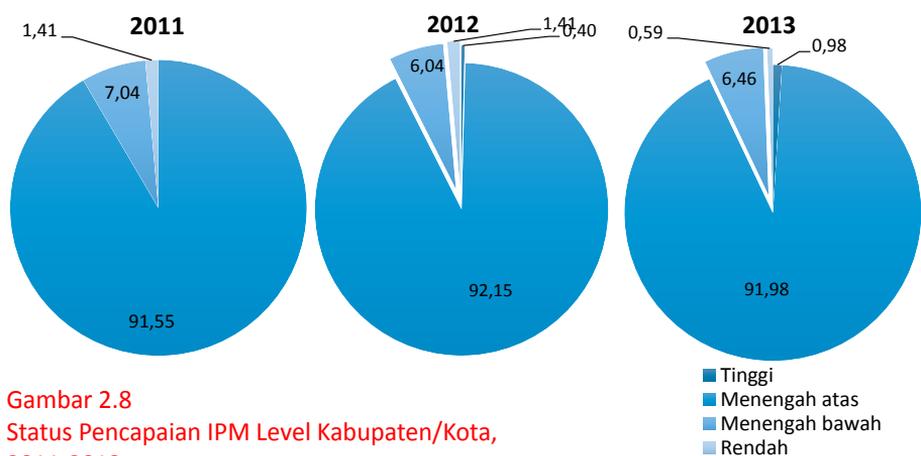
Tabel 2.5
Sepuluh Kabupaten/Kota dengan IPM Terendah, 2011-2013

Kab/Kota	IPM 2011	Kab/Kota	IPM 2012	Kab/Kota	IPM 2013
Nduga	48,43	Nduga	48,80	Nduga	49,29
Intan Jaya	48,74	Intan Jaya	49,17	Intan Jaya	49,61
Yalimo	48,90	Yalimo	49,31	Yalimo	49,86
Deiyai	49,31	Mamberamo Tengah	49,73	Mamberamo Tengah	50,11
Mamberamo Tengah	49,32	Puncak	49,77	Puncak	50,18
Puncak	49,35	Deiyai	49,80	Deiyai	50,19
Pegunungan Bintang	49,45	Pegunungan Bintang	49,83	Pegunungan Bintang	50,32
Lanny Jaya	50,20	Lanny Jaya	50,60	Lanny Jaya	51,07
Yahukimo	50,30	Yahukimo	50,73	Yahukimo	51,14
Dogiyai	50,49	Dogiyai	51,09	Dogiyai	51,42

Sumber: Badan Pusat Statistik

“Masih terdapat Kabupaten/Kota di Indonesia yang Berada di Level IPM Rendah”

Apabila dilihat dari status pencapaiannya, pada tahun 2011 belum ada satupun kabupaten/kota yang masuk dalam kategori capaian IPM tinggi. Namun, pada tahun 2012 status pencapaian kabupaten/kota memperlihatkan prestasi yang menggembirakan karena terdapat 2 kota yang masuk ke dalam kategori capaian IPM tinggi yaitu Kota Yogyakarta dan Kota Jakarta Selatan. Kemudian pada tahun 2013, kabupaten/kota yang masuk ke dalam kategori capaian IPM tinggi bertambah menjadi 5 kota yaitu Kota Yogyakarta, Kota Jakarta Selatan, Kota Makassar, Kota Depok, dan Kota Jakarta Timur. Selain itu, upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan manusia di wilayahnya masing-masing juga telah nampak membuahkan hasil karena dari tahun ke tahun terdapat penurunan jumlah kabupaten/kota dengan capaian rendah dan menengah bawah. Pada tahun 2013 provinsi dengan status pencapaian IPM menengah atas meningkat 0,48 persen dibanding tahun 2011 (91,98 persen).



Gambar 2.8
Status Pencapaian IPM Level Kabupaten/Kota, 2011-2013

Sumber: Badan Pusat Statistik

Kotak 2.1 Menerapkan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia

Setelah desentralisasi dilaksanakan, tanggung jawab atas sebagian besar kegiatan pembangunan dilimpahkan ke kabupaten. Banyak pejabat di daerah dihadapkan untuk pertama kalinya pada tugas untuk mempromosikan pembangunan manusia di daerah mereka. Apa manfaat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bagi mereka itu?

Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama-tama kita perlu melihat hubungan antara konsep pembangunan manusia dan indeks pembangunan manusia. Konsep pembangunan manusia sangatlah luas – mencakup hampir seluruh aspek kehidupan manusia – dari kebebasan mengungkapkan pendapat, kesetaraan gender, lapangan pekerjaan, gizi anak, sampai melek huruf orang dewasa. Sebaliknya, indeks pembangunan manusia mempunyai lingkup yang lebih sempit. Indeks ini hanya dapat mengukur sebagian saja dari keadaan pembangunan manusia, terutama karena banyak aspek dari kehidupan manusia, seperti kebahagiaan atau hubungan di dalam masyarakat tak dapat diukur dengan angka. Oleh karena itu, pusat perhatian haruslah diletakkan lebih pada konsep daripada indeksinya. Ini berarti dalam setiap aspek dari pekerjaannya, pejabat daerah harus mendahulukan manusia – dengan menganggap manusia bukan sebagai sarana tetapi tujuan. Daripada mencoba mendidik orang dan menjaga kesehatan mereka agar tersedia angkatan kerja yang lebih baik, misalkan saja, atau mencoba meningkatkan kemakmuran ekonomi, lebih baik bila mereka berupaya membantu para bapak, ibu dan anak-anak warga masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih kaya dan lebih membahagiakan. Jadi setiap kegiatan, entah investasi membangun jalan, mengeluarkan ijin untuk usaha pertambangan, atau membangun fasilitas-fasilitas kesehatan yang baru, harus bertujuan untuk memperluas pilihan yang tersedia bagi seluruh warga dan semuanya harus dilaksanakan secara setara dan berkelanjutan.

Indeks pembangunan manusia memberikan beberapa petunjuk. Kesenjangan antara indeks terkini dan 100 mencerminkan “kekurangan” pembangunan manusia – jarak yang perlu ditempuh oleh setiap kabupaten. Perbandingan selama beberapa waktu akan memperlihatkan kepada kita kemajuan atau kurangnya kemajuan suatu kabupaten tertentu. Antarkabupaten juga dapat dibandingkan dan diberi peringkat. Dengan demikian IPM dapat berfungsi sebagai pegangan untuk alokasi sumber daya – dan formula yang sekarang ada untuk Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat memang telah memasukkan IPM sebagai suatu indikator. Walaupun demikian, penggunaan IPM untuk tujuan-tujuan ini ataupun untuk tujuan-tujuan lainnya perlu dilakukan dengan hati-hati. Jika kekurangan dalam suatu kabupaten adalah dua kali lebih besar daripada kabupaten lainnya, maka pembangunan di kabupaten pertama tidak dengan sendirinya harus dua kali lebih besar daripada di kabupaten kedua.

Sumber: Laporan Pembangunan Manusia Indonesia 2004

Peningkatan Kapabilitas Dasar Manusia

Pembangunan manusia merupakan suatu upaya untuk memperluas pilihan-pilihan yang dimiliki manusia yang dapat terealisasi apabila manusia berumur panjang dan sehat, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, serta dapat memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya dalam kegiatan yang produktif. Hal tersebut sekaligus merupakan tujuan utama dari pembangunan yaitu untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan aset kekayaan bangsa sekaligus sebagai modal dasar pembangunan. Pendidikan dan kesehatan merupakan modal utama yang harus dimiliki manusia agar mampu meningkatkan potensinya. Umumnya, semakin tinggi kapabilitas dasar yang dimiliki suatu bangsa, semakin tinggi peluang untuk meningkatkan potensi bangsa itu.

3.1 Capaian dan Tantangan Bidang Pendidikan

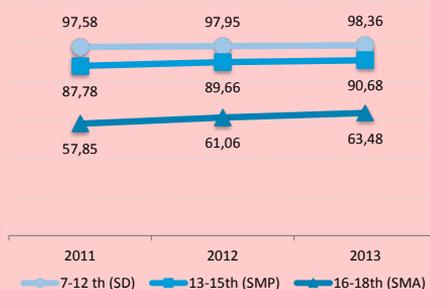
Salah satu upaya peningkatan kapabilitas dasar penduduk di bidang pendidikan adalah dengan memperluas cakupan pendidikan formal. Berbagai program di bidang pendidikan telah diupayakan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Diantaranya yaitu program untuk memberantas buta aksara, menekan angka putus sekolah melalui pemberian bantuan operasional sekolah atau yang lebih dikenal dengan sebutan BOS, serta menjamin kesempatan untuk memperoleh pendidikan melalui program penuntasan wajib belajar sembilan tahun.

“Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar Cukup Tinggi”

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator yang mengukur pemerataan akses terhadap pendidikan. Secara umum APS Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2011-2013. Gambar 3.1

Gambar 3.1
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Indonesia, 2011-2013

Sumber: Badan Pusat Statistik

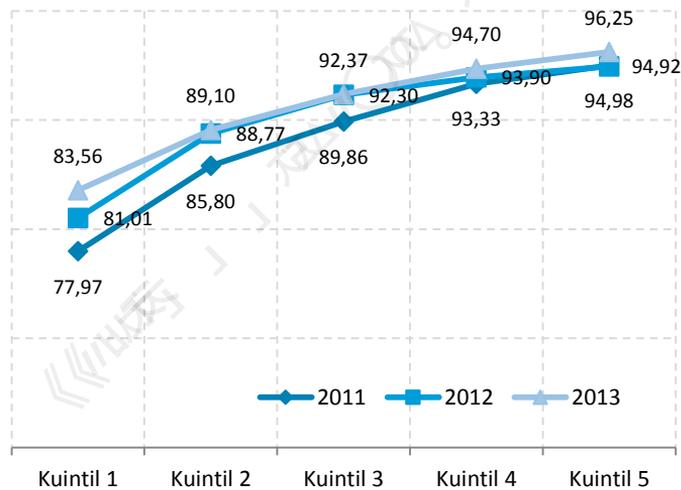


menunjukkan capaian APS pada setiap kelompok umur sekolah dimana capaian APS 7-12 tahun sudah cukup tinggi. Namun demikian dalam jangka waktu 3 tahun APS 7-12 tahun hanya meningkat 0,78 persen. Hal lain yang patut dicermati yaitu belum semua penduduk

pada kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun yang merupakan kelompok umur wajib belajar 9 tahun dapat berpartisipasi dalam pendidikan formal. Selain itu APS penduduk usia 16-18 tahun masih rendah.

“Pendidikan Formal Belum Dirasakan oleh Semua Kalangan”

Dengan adanya berbagai program bantuan dari pemerintah, seharusnya pendidikan dapat dirasakan oleh seluruh penduduk. Namun kenyataannya belum semua penduduk dapat mengenyam pendidikan formal terutama pada kelompok penduduk miskin. Apabila dilihat distribusinya menurut kelompok pengeluaran, masih terdapat disparitas capaian APS antarkelompok pengeluaran. Rentang capaian APS 13-15 tahun antara kuintil pertama (penduduk dengan 20 persen pengeluaran terendah) dan kuintil terakhir (penduduk dengan 20 persen pengeluaran tertinggi) pada tahun 2011 adalah 17,01 persen. Namun demikian, disparitas tersebut semakin menurun hingga 12,69 persen di tahun 2013. Selain itu perbaikan juga terlihat dari meningkatnya capaian APS di setiap kuintil pengeluaran dari tahun 2011-2013.



Gambar 3.2
APS 13-15 tahun
Indonesia menurut Kuintil
Pengeluaran, 2011-2013

Sumber: Badan Pusat Statistik

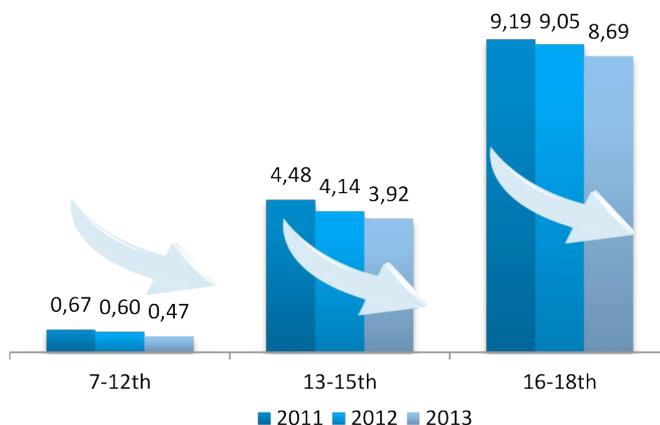
Disparitas capaian APS juga terjadi pada level provinsi. Selama periode 2011-2013, Provinsi DIY dan Provinsi Papua menjadi provinsi dengan capaian APS tertinggi dan terendah pada semua kelompok umur, kecuali pada tahun 2011 APS terendah untuk kelompok umur 16-18 tahun dicapai oleh Provinsi Bangka Belitung. Pada kelompok umur 7-12 tahun, perbedaan capaian APS antara provinsi dengan capaian tertinggi dan terendah sekitar 24 persen. Sedangkan pada kelompok umur 16-18 tahun perbedaannya mencapai 27 persen. Sementara itu 10 provinsi dengan capaian APS terendah hampir sama dari tahun ke tahun, hanya terjadi perubahan urutan.

Tabel 3.1 Disparitas Angka Partisipasi Sekolah antarprovinsi, 2011-2013

Kelp Umur	Tahun	Maksimum	Minimum	10 Provinsi dengan APS Terendah
7-12 tahun	2011	DIY (99,46)	Papua (73,36)	Papua, Papua Barat, Sulbar, NTT, Kalbar, Sulteng, Gorontalo, Kep.Babel, Maluku Utara, Sulsel
	2012	DIY (99,77)	Papua (75,34)	Papua, Papua Barat, Gorontalo, NTT, Sulbar, Sulsel, Kep. Babel, Kalsel, Kalbar, NTB
	2013	DIY (99,96)	Papua (75,51)	Papua, Sulbar, Papua Barat, Kalbar, NTT, Sulteng, Gorontalo, Maluku Utara, Sultra, Kep. Babel
13-15 tahun	2011	DIY (97,59)	Papua (71,29)	Papua, Sulbar, Kalsel, Gorontalo, Kep.Babel, Kalbar, Sulsel, Sulteng, Sumsel, Kalteng
	2012	DIY (98,32)	Papua (68,99)	Papua, Sulbar, NTT, Kep. Babel, Kalsel, Gorontalo, Banten, Sulsel, Jabar, Sulteng
	2013	DIY (96,71)	Papua (73,27)	Papua, Sulbar, Kep. Babel, Kalbar, Kalteng, Gorontalo, Kalsel, Sulteng, Sultra, Sumsel
16-18 tahun	2011	DIY (75,85)	Babel (49,17)	Kep.Babel, Kalbar, Jabar, Papua, Kalsel, Kalteng, Jateng, Lampung, Sulbar, Sumsel
	2012	DIY (80,22)	Papua (50,66)	Sulbar, Kep. Babel, Jabar, NTT, Gorontalo, Sulteng, Kalbar, Banten, Kalsel, Lampung
	2013	DIY (81,50)	Papua (53,28)	Papua, Kep. Babel, Sulbar, Kalteng, Kalbar, Gorontalo, Jabar, Klasel, Jateng, Sumsel

“Putus Sekolah Kelompok Umur 16-18 tahun Masih Tinggi”

Salah satu permasalahan pendidikan yang dapat menghambat peningkatan kapabilitas dasar penduduk adalah mahalannya biaya pendidikan. Ketidakmampuan untuk membayar biaya sekolah akan berdampak pada pilihan untuk tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau tidak menamatkan jenjang pendidikan yang sedang dijalani (putus sekolah). Angka putus sekolah tertinggi terjadi pada kelompok umur 16-18 tahun. Namun,



Gambar 3.3
Angka Putus Sekolah (APS)
Indonesia, 2011-2013

Sumber: Badan Pusat Statistik

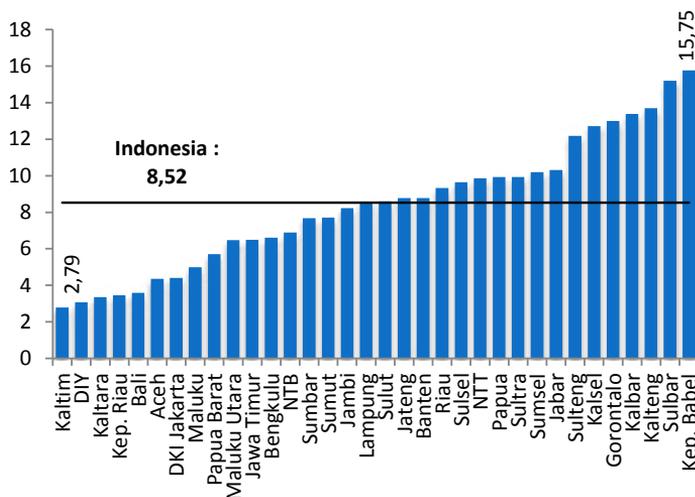
dalam kurun waktu 3 tahun angka putus sekolah di Indonesia pada setiap kelompok umur terus mengalami penurunan. Meskipun penurunan terbesar terjadi pada kelompok umur 13-15 tahun yaitu sebesar 0,57 persen, namun persentase angka putus sekolah relatif masih cukup tinggi pada kelompok umur 16-18 tahun, sehingga pemerintah harus lebih fokus dalam menekan angka putus sekolah terutama pada kelompok umur 13-15 tahun dan 16-18 tahun.

Kasus putus sekolah 13-15 tahun di perdesaan pada umumnya lebih besar jika dibandingkan dengan perkotaan. Demikian juga jika dilihat menurut kelompok pengeluaran, dimana kasus putus sekolah 13-15 tahun semakin tinggi dengan semakin rendahnya pengeluaran penduduk. Dari Tabel 3.2 terlihat bahwa terjadi kesenjangan angka putus sekolah 13-15 tahun yang nyata antarkelompok pengeluaran. Kesenjangan antarwilayah perdesaan dan perkotaan semakin meningkat seiring dengan peningkatan pengeluaran. Pola tersebut terjadi dari tahun ke tahun.

Tabel 3.2 Angka Putus Sekolah 13-15 tahun menurut Kelompok Pengeluaran, 2011-2013

Kelompok Pengeluaran	2011		2012		2013	
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan
Q1	7.93	7.61	7,23	7,17	7.21	6.59
Q2	5.35	5.51	4,81	4,64	4.24	4.54
Q3	3.33	4.07	2,74	3,57	2.83	3.51
Q4	1.97	3.24	2,14	2,70	1.89	3.12
Q5	1.19	3.31	1,76	3,16	1.43	2.90

Pada level provinsi kasus putus sekolah 13-15 tahun yang tinggi banyak ditemui di provinsi wilayah timur Indonesia. Gambar 3.4 menunjukkan grafik angka putus sekolah 13-15 tahun menurut provinsi di Indonesia. Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi dengan kasus putus sekolah 13-15 tahun tertinggi di Indonesia. Sementara itu, provinsi dengan angka putus sekolah 13-15 tahun terendah yaitu Provinsi Kalimantan Timur.



Gambar 3.4
Angka Putus Sekolah 13-15 tahun, 2013

Sumber: Badan Pusat Statistik

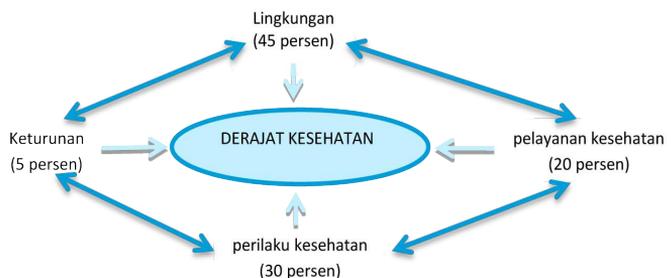
Disparitas antara kedua provinsi tersebut sebesar 12,96 persen. Jika diperhatikan pada Gambar 3.4 terdapat 16 provinsi di Indonesia yang memiliki angka putus sekolah 13-15 tahun di bawah angka nasional.

3.2 Capaian dan Tantangan Bidang Kesehatan

Peningkatan kualitas sumber daya manusia mutlak dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pembangunan manusia. Derajat kesehatan menjadi salah satu pilar penentu kualitas hidup manusia selain pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan kepedulian tinggi dari pemerintah dan seluruh masyarakat untuk senantiasa peduli pada peningkatan derajat kesehatan.

Tujuan pembangunan di bidang kesehatan adalah tercapainya status kesehatan yang optimal untuk mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur status kesehatan adalah angka morbiditas. Penduduk yang mengalami morbiditas adalah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Berdasarkan data Susenas tahun 2013, angka morbiditas penduduk di Indonesia adalah 13,46 persen. Angka tersebut sudah turun sebesar 1,56 persen dari tahun 2011.

Menurut Henrik L. Blum (www.depkes.go.id) peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang dapat diukur dari tingkat mortalitas dan morbiditas penduduk dipengaruhi oleh empat faktor penentu, yaitu: faktor-faktor lingkungan (45 persen), perilaku kesehatan (30 persen), pelayanan kesehatan (20 persen), dan keturunan (5 persen). Oleh karena itu, analisis mengenai derajat kesehatan penduduk dapat dilihat melalui empat aspek tersebut. Konsep Henrik L. Blum ini diilustrasikan lewat Gambar 3.5 yang memperlihatkan hubungan derajat kesehatan dengan keempat faktornya.



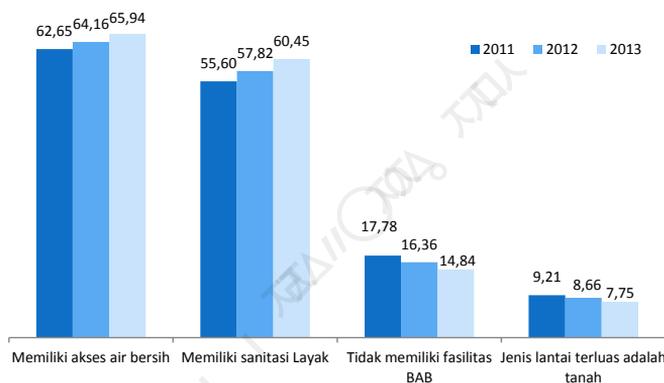
Gambar 3.5
Analisis Derajat Kesehatan
(Konsep Hendrik L. Blum)
Sumber: Kementerian Kesehatan RI

“Kondisi Lingkungan Belum Sepenuhnya Sehat”

Berdasarkan konsep derajat kesehatan yang dikemukakan oleh Blum, faktor terbesar yang memengaruhi derajat kesehatan seseorang yaitu faktor lingkungan. Konsep ini menegaskan bahwa lingkungan yang baik akan mendorong secara langsung peningkatan

derajat kesehatan. Tidak hanya itu, lingkungan yang baik juga secara tidak langsung berhubungan dengan keturunan dan pelayanan kesehatan.

Data Susenas tahun 2013 menunjukkan bahwa masih terdapat 14,84 persen rumah tangga di Indonesia yang tidak memiliki tempat buang air besar. Jika dibandingkan dengan tahun 2011, hanya terjadi penurunan sekitar 3 persen rumah tangga yang tidak memiliki tempat buang air besar. Sementara itu rumah tangga dengan akses sanitasi layak pada tahun 2013 hanya sebesar 60,45 persen. Sanitasi yang layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu dilengkapi dengan kloset leher angsa dan dengan tempat pembuangan tangki septik. Pemerintah melalui program MDG's menjadikan indikator sanitasi layak sebagai salah satu target dalam tujuan ke tujuh yaitu "Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup".



Gambar 3.6
Indikator Lingkungan,
2011-2013

Sumber: Badan Pusat Statistik

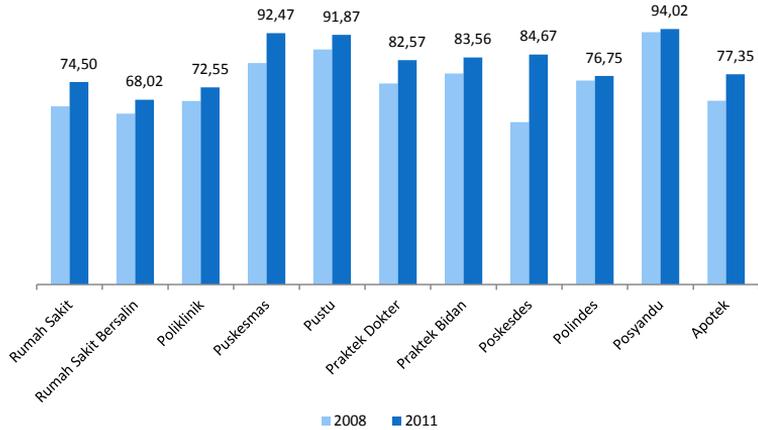
Selain akses terhadap sanitasi layak, indikator lingkungan lain yang tercantum dalam target MDG's adalah akses terhadap air bersih. Pada tahun 2013 masih terdapat 34,06 persen rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap sumber air minum bersih. Pada indikator jenis lantai rumah tercatat terdapat 7,75 persen rumah tangga dengan jenis lantai rumah tanah. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus dan serius karena lingkungan tempat tinggal yang kurang sehat akan menghambat Indonesia untuk mencapai kondisi masyarakat dengan derajat kesehatan yang baik. Dampak secara langsung terhadap kualitas pembangunan manusia adalah lambatnya peningkatan komponen kesehatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan nilai IPM.

"Fasilitas Kesehatan Sudah Cukup Merata"

Salah satu faktor penentu untuk mewujudkan peningkatan derajat dan status kesehatan penduduk adalah ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan. Menyediakan fasilitas kesehatan yang terjangkau dan memadai menjadi salah satu tugas pemerintah dalam rangka menciptakan pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Berdasarkan data Podes yang terlihat dari Gambar 3.7, secara nasional persentase desa dengan kemudahan akses terhadap fasilitas kesehatan semakin meningkat dari tahun

Gambar 3.7
Persentase Desa
Menurut Fasilitas
Kesehatan



Sumber: Badan Pusat Statistik

2008-2011. Hampir semua desa telah memiliki akses terhadap posyandu, puskesmas, dan puskesmas pembantu. Selain itu akses terhadap praktek dokter, praktek bidan, dan poskesdes juga cukup tinggi. Hal ini merupakan indikasi positif bahwa pembangunan infrastruktur di bidang kesehatan telah berjalan sebagaimana mestinya.

“Praktek Persalinan yang Aman Belum Merata”

Hal penting lainnya adalah ketersediaan pelayanan kesehatan reproduksi yang diupayakan agar persalinan dilakukan oleh tenaga medis (dokter, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya). Praktek persalinan yang aman menjadi salah satu faktor penentu keselamatan ibu dan bayi hingga pada akhirnya akan menurunkan resiko kematian keduanya.

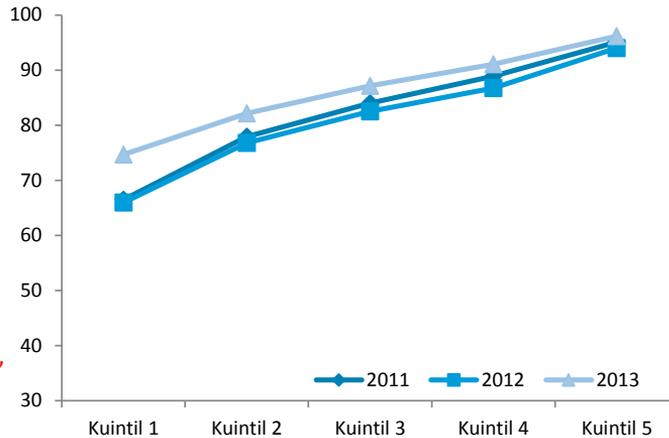
Di Indonesia, persentase persalinan terakhir yang ditolong oleh tenaga medis memperlihatkan tren peningkatan dari tahun 2011 hingga 2013. Pola yang sama juga terjadi di wilayah perkotaan dan perdesaan. Namun demikian, masih terlihat adanya kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan dimana persentase persalinan yang aman di perdesaan masih lebih rendah dibanding perkotaan.

Tabel 3.3 Persentase Persalinan yang Ditolong Tenaga Medis, 2011-2013

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Nasional
2011	90,88	71,93	81,25
2012	91,78	75,21	83,36
2013	92,78	78,10	85,31

Selain persoalan ketersediaan fasilitas pelayanan, persoalan kemampuan membayar untuk memperoleh pelayanan tersebut juga menjadi persoalan yang penting untuk ditelaah. Apabila dilihat menurut klasifikasi sosial ekonomi berdasar kelompok pengeluaran, terlihat bahwa persalinan oleh tenaga medis pada kelompok penduduk termiskin masih rendah. Pada tahun 2011 kesenjangan persalinan yang aman antara penduduk pada kelompok termiskin dan terkaya sebesar 28,60 persen. Disparitas tersebut terus menurun hingga pada tahun 2012 menjadi 28,05 persen. Dalam jangka waktu tiga tahun (2011-2013) terlihat adanya peningkatan persalinan oleh tenaga kesehatan pada setiap kelompok penduduk, namun pada periode 2011-2013 terjadi penurunan persentase persalinan yang

Gambar 3.8
Persentase Persalinan yang
Ditolong Tenaga Medis
menurut Kuintil Pengeluaran,
2011-2013

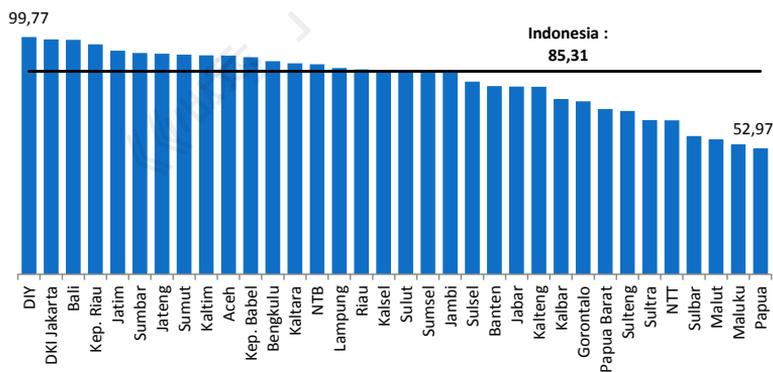


Sumber: Badan Pusat Statistik

aman pada kelompok penduduk terkaya (Kuintil 4 dan Kuintil 5).

Gambar 3.9 memperlihatkan disparitas antara provinsi di wilayah timur dan wilayah barat Indonesia pada tahun 2013 dimana persalinan oleh tenaga medis di wilayah timur Indonesia menunjukkan capaian yang rendah (jauh di bawah angka nasional). Lima provinsi dengan capaian persalinan aman yang tinggi berturut-turut adalah Provinsi DIY, DKI Jakarta, Bali, Kepulauan Riau, dan Jawa Timur. Sementara provinsi dengan capaian yang rendah yaitu NTT, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua. Kesenjangan antara provinsi dengan capaian tertinggi dan terendah adalah 46,80 persen.

Gambar 3.9
Persentase
Persalinan yang
Ditolong Tenaga
Medis Menurut
Provinsi, 2013



Sumber: Badan Pusat Statistik

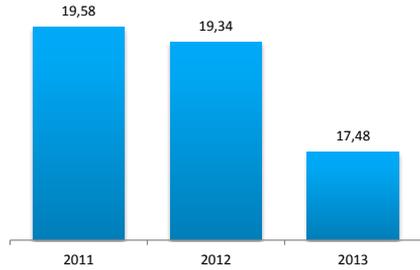
“Kesadaran terhadap Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan Meningkat meski Pemanfaatannya Masih Belum Merata”

Keberadaan fasilitas kesehatan tidak akan bermanfaat jika tidak disertai oleh kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas tersebut. Pada tahun 2013 terdapat 17,48 persen penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat sendiri. Angka tersebut menurun jika dibandingkan tahun 2011 yaitu 19,58 persen. Penurunan persentase penduduk yang berobat sendiri mengindikasikan bahwa kesadaran penduduk untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan semakin meningkat.

Akses terhadap pelayanan kesehatan dikatakan merata jika semua lapisan masyarakat dapat memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini, pelayanan kesehatan dikelompokkan menjadi lima yaitu rumah sakit, praktek dokter,

Gambar 3.10
Persentase
Penduduk yang
Mengalami Keluhan
Kesehatan dan
Berobat Sendiri,
2011-2013

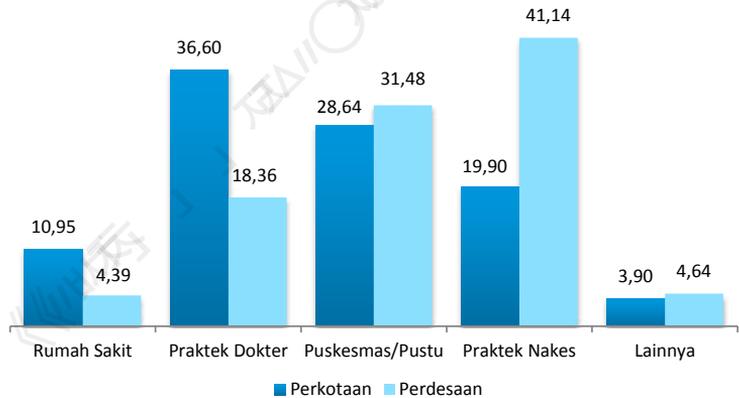
Sumber: Badan Pusat Statistik



puskesmas/pustu, praktek nakes, dan lainnya yang meliputi praktek batra, dukun bersalin serta praktek non medis lainnya. Tingkat akses penduduk terhadap fasilitas kesehatan berbeda antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Penduduk perkotaan lebih banyak memanfaatkan fasilitas praktek dokter (36,60 persen) dibanding fasilitas kesehatan lainnya. Sementara di perdesaan akses terhadap praktek tenaga kesehatan lebih tinggi dibanding akses terhadap fasilitas lainnya yaitu 41,14 persen. Pemanfaatan puskesmas/pustu umumnya hampir sama antara perkotaan dan perdesaan yaitu 28,64 persen dan 31,48 persen.

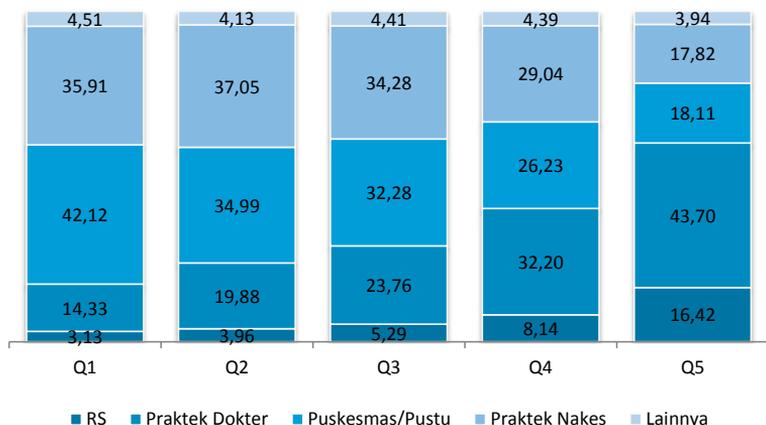
Gambar 3.11
Persentase
Penduduk Sakit
yang Memanfaatkan
Fasilitas Kesehatan,
2013

Sumber: Badan Pusat Statistik



Gambar 3.12
Persentase
Penduduk Sakit
yang Memanfaatkan
Fasilitas Kesehatan
menurut Kuintil,
2013

Sumber: Badan Pusat Statistik

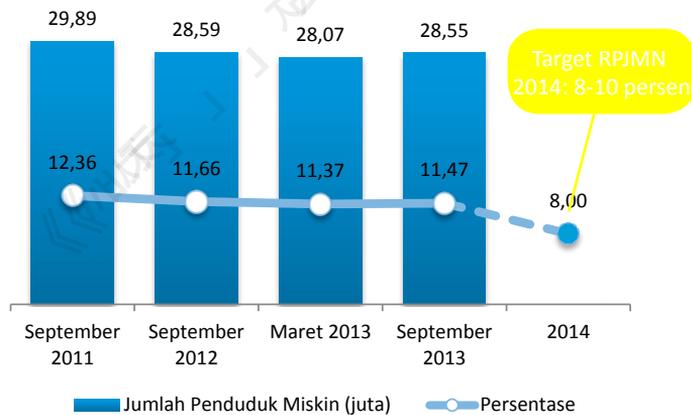


Pemanfaatan fasilitas kesehatan berkaitan dengan kemampuan ekonomi seseorang. Masalah biaya pada umumnya menjadi hambatan penduduk dalam mengakses fasilitas kesehatan. Gambar 3.12 memperlihatkan bahwa fasilitas rumah sakit dan praktek dokter lebih banyak dimanfaatkan oleh penduduk dengan pendapatan yang tinggi (kelompok Q4 dan Q5). Sedangkan penduduk dengan pendapatan menengah ke bawah (kelompok Q1, Q2, dan Q3) lebih banyak memanfaatkan fasilitas puskesmas/pustu dan praktek nakes. Berdasarkan hal tersebut, sudah selayaknya jika pemerintah terus meningkatkan kualitas tenaga medis serta sarana dan prasarana yang ada di puskesmas/pustu dan praktek nakes, sehingga masyarakat di kelompok bawah mendapat pelayanan terbaik.

3.3 Tantangan di Bidang Ekonomi

“Kemiskinan Menurun Tetapi Lambat”

Kemiskinan merupakan salah satu masalah pokok dalam pembangunan yang sifatnya multiaspek sehingga penanganannya juga perlu mendapat perhatian khusus. Kemiskinan menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kapabilitasnya. Hal tersebut masuk akal karena keterbatasan ekonomi menyebabkan seseorang tidak dapat mengakses fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai, padahal kedua aspek tersebut merupakan kapabilitas dasar dalam pembangunan manusia.



Gambar 3.13
Tren Kemiskinan di Indonesia, 2011-2013

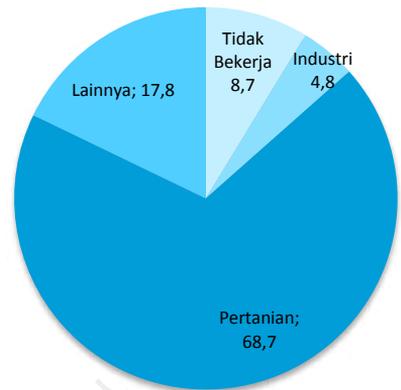
Sumber: Badan Pusat Statistik

Selama periode 2011 hingga 2013, tren kemiskinan menunjukkan penurunan dari 29,89 juta jiwa (12,36 persen) pada tahun 2011 menjadi 28,55 juta jiwa pada tahun 2013 (11,47 persen). Hal tersebut merupakan indikasi positif bagi perkembangan perekonomian Indonesia sehingga dapat mendorong peningkatan pembangunan manusia. Namun, penurunan kemiskinan cenderung bergerak lambat dan masih jauh dari target pemerintah untuk menurunkan kemiskinan hingga 8 persen di tahun 2014.

Karakteristik penduduk miskin di Indonesia pada umumnya tinggal di perdesaan dan bekerja di sektor pertanian. Lebih dari 68 persen rumah tangga miskin di perdesaan

menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. Di sisi lain, produktivitas sektor pertanian tergolong rendah. Hal ini menjadi pertanda bahwa untuk meningkatkan kualitas manusia, kemiskinan wajib diperangi dan dituntaskan oleh pemerintah. Dengan melihat karakteristik kemiskinan yang bercorak perdesaan dan pertanian, program-program harus dilakukan secara lebih terarah agar target RPJM 2014 bisa tercapai.

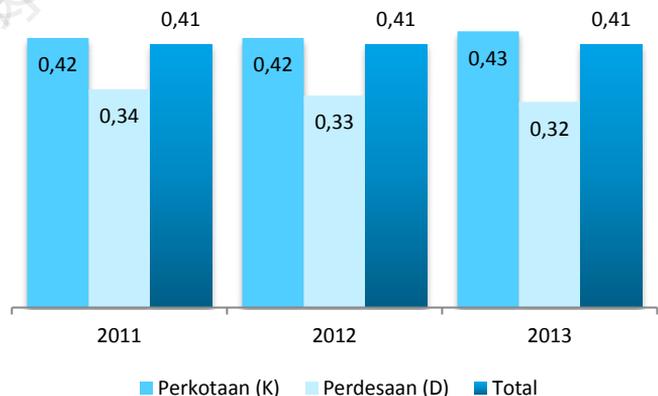
Gambar 3.14
Persentase Rumah Tangga Miskin di Perdesaan Menurut Sumber Penghasilan Utama, Maret 2013



Sumber: Badan Pusat Statistik

Selain karakteristik tersebut, lambatnya penurunan kemiskinan juga didukung dengan semakin lebarnya ketimpangan pengeluaran penduduk yang dicerminkan oleh Gini Rasio. Perkembangan Gini Rasio Indonesia dari tahun 2011 hingga 2013 cukup memprihatinkan. Tren Gini Rasio cenderung tetap yang menunjukkan bahwa ketimpangan semakin melebar. Hal ini juga terjadi di wilayah perkotaan dan perdesaan dimana tren Gini Rasio semakin meningkat dari tahun ke tahun. Ketimpangan juga cenderung tinggi di wilayah perkotaan dibanding wilayah perdesaan.

Gambar 3.15
Tren Gini Rasio Indonesia Menurut Perkotaan dan Perdesaan, 2011-2013



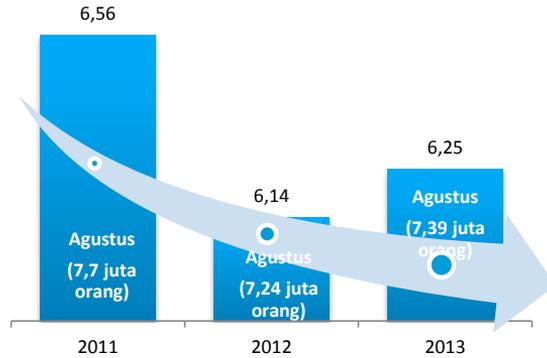
Sumber: Badan Pusat Statistik

“Penurunan Pengangguran Lambat”

Masalah pengangguran merupakan persoalan klasik pembangunan di negara-negara berkembang. Pengangguran memiliki dampak luas (multidimensi) terhadap kehidupan masyarakat. Pada periode 2011 hingga 2013, jumlah pengangguran telah berkurang dari

Gambar 3.16
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Indonesia, 2011-2013

Sumber: Badan Pusat Statistik

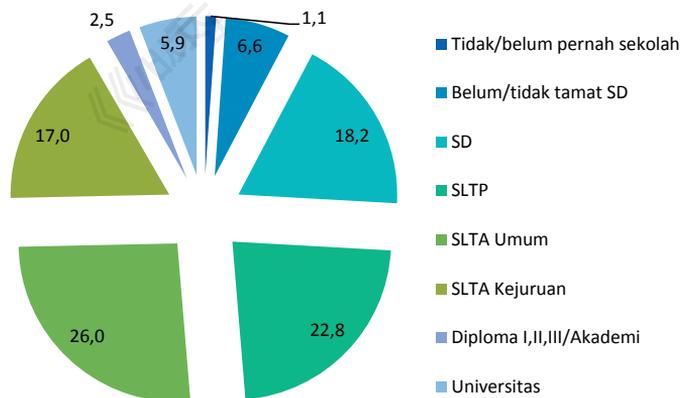


7,70 juta orang pada tahun 2011 menjadi 7,39 juta orang pada tahun 2013. Meskipun secara kuantitas jumlahnya berkurang, kondisi tersebut menyembunyikan fakta bahwa pengangguran turun lambat. Pada periode 2011 hingga 2012, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun dari 6,56 persen menjadi 6,14 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa penurunan TPT relatif bagus pada periode ini. Sebaliknya, pada periode 2012 hingga 2013, TPT naik dibanding periode sebelumnya, yaitu dari 6,14 persen menjadi 6,25 persen.

Dari 7,39 juta orang penganggur pada Agustus 2013, hampir 91 persen lebih penganggur berpendidikan di bawah SMA atau sederajat. Namun, sangat disayangkan bahwa hampir 3 persen penganggur berpendidikan Diploma I/II/III dan 5,5 persen berpendidikan Sarjana ke atas. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan yang tinggi tidak menjamin memperoleh pekerjaan.

Gambar 3.17
Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2013

Sumber: Badan Pusat Statistik



Kotak 3.1 Empat Komponen Penting dalam Paradigma Pembangunan Manusia

Paradigma pembangunan manusia terdiri dari empat komponen yang utama:

Produktivitas. Masyarakat harus dapat meningkatkan produktivitas mereka dan berpartisipasi secara penuh dalam proses memperoleh penghasilan dan pekerjaan berupah. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi adalah salah satu bagian dari jenis pembangunan manusia.

Pemerataan. Masyarakat harus punya akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapus agar masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan memperoleh manfaat dari kesempatan-kesempatan ini.

Kesinambungan. Akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tapi juga generasi yang akan datang. Segala bentuk pemodalanan – fisik, manusia, lingkungan hidup – harus dilengkapi.

Pemberdayaan. Pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat, dan bukan hanya untuk mereka. Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang memengaruhi kehidupan mereka.

Disparitas Pencapaian Pembangunan Manusia Antarwilayah

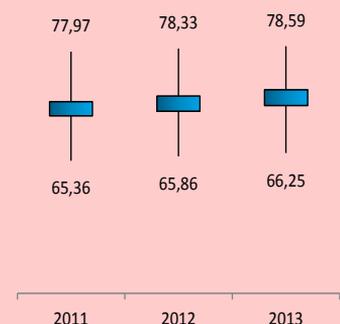
4.1 Disparitas IPM Antarprovinsi di Indonesia

Ketimpangan merupakan permasalahan yang selalu muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang umumnya terjadi karena ketidakmerataan dari distribusi program pembangunan serta ketidakmerataan kesempatan untuk berpartisipasi dalam program pembangunan. Perkembangan IPM Indonesia dari tahun 2011-2013 terus mengalami peningkatan. Namun kemajuan ini tidak terlepas dari masalah kesenjangan karena masing-masing provinsi dan kabupaten/kota mempunyai kecepatan capaian komponen yang berbeda.

“Kesenjangan Capaian Pembangunan Manusia Antarprovinsi Menyempit”

Kemajuan pencapaian IPM di tingkat nasional sebenarnya menyembunyikan fakta bahwa kesenjangan antarprovinsi masih terjadi. Angka IPM Indonesia tahun 2013 yang telah mencapai 73,81 ternyata menyimpan suatu variasi antardaerah, yang menggambarkan keberagaman pencapaian IPM antardaerah. Hal ini sangat disayangkan karena peningkatan yang cukup signifikan juga dibarengi oleh kesenjangan. Kenyataan ini menjadi catatan penting bagi pemerintah dalam memperbaiki mekanisme redistribusi pembangunan.

Ketimpangan pencapaian pembangunan manusia antarprovinsi di Indonesia pada tahun 2013 mencapai 12,34 persen. Ketimpangan tersebut terjadi akibat tingginya capaian di Provinsi DKI Jakarta (78,59) dan rendahnya capaian di Provinsi Papua (66,25). Namun sebenarnya dibalik kesenjangan tersebut telah terjadi perbaikan kondisi, ketimpangan pembangunan manusia semakin menyempit dari tahun ke tahun. Dalam periode tiga tahun (2011-2013) disparitas pembangunan manusia berkurang sebesar 0,28 persen dari 12,62 persen.



Gambar 4.1
Disparitas Pembangunan Manusia Antarprovinsi di Indonesia, 2011-2013

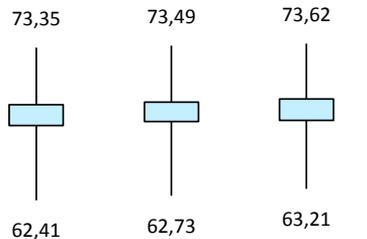
Sumber: Badan Pusat Statistik

“Pembangunan Bidang Kesehatan dan Pendidikan Makin Merata”

Ketidakmerataan pembangunan di Indonesia juga terlihat dari komponen penyusun IPM. Pada indikator angka harapan hidup yang merepresentasikan aspek umur panjang dan sehat, terlihat adanya kesenjangan yang cukup signifikan. Pada tahun 2013, rentang capaian AHH di Indonesia sebesar

10,41 tahun. Provinsi NTB sebagai provinsi dengan pencapaian terendah (63,21 tahun) dan Provinsi DI Yogyakarta sebagai provinsi dengan capaian tertinggi (73,62 tahun) menjadi penyumbang tingginya disparitas tersebut. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, telah terjadi perbaikan di bidang pemerataan kesehatan. Hal ini terlihat dengan semakin mengecilnya rentang capaian AHH dari tahun 2011 dan 2013 yaitu 10,94 tahun dan 10,41 tahun.

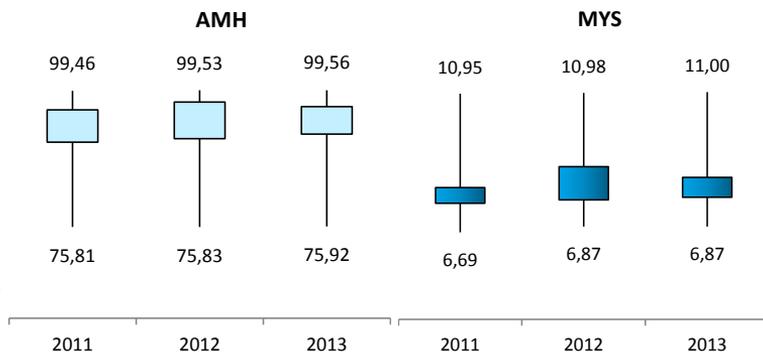
Gambar 4.2
Disparitas Angka Harapan Hidup Antarprovinsi di Indonesia, 2011-2013



Sumber: Badan Pusat Statistik

Dimensi pengetahuan yang diukur melalui angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah juga menggambarkan masih adanya kesenjangan antar provinsi di Indonesia. Pada komponen angka melek huruf terjadi kesenjangan antar provinsi sebesar 23,65 persen di tahun 2013. Rentang perbedaan ini telah mengalami penurunan, namun penurunannya tidak terlalu signifikan, yaitu sebesar 23,65 persen pada tahun 2011 dan 23,70 persen pada tahun 2013. Berbagai program pendidikan yang digalakkan pemerintah nampaknya belum dapat menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. Hal ini terlihat dari pencapaian angka melek huruf di Papua yang hanya 75,92 persen pada tahun 2013. Capaian tersebut sangat jauh tertinggal jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Utara yang telah mencapai angka 99,56 persen pada tahun 2013.

Gambar 4.3
Disparitas Komponen Pendidikan Antarprovinsi di Indonesia, 2011-2013



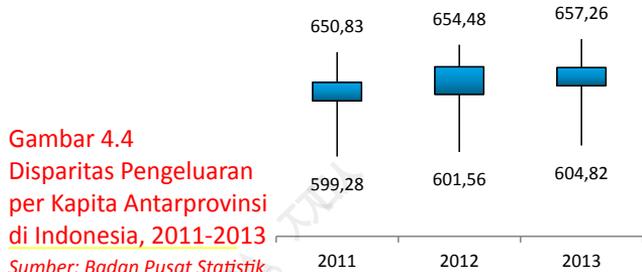
Sumber: Badan Pusat Statistik

Tingkat pencapaian rata-rata lama sekolah untuk setiap provinsi juga berbeda cukup signifikan. Pada tahun 2013 Provinsi DKI Jakarta mencatat kemajuan tertinggi dengan capaian rata-rata lama sekolah sebesar 11 tahun dan Provinsi Papua yang memiliki capaian rata-rata lama sekolah 6,87 tahun menjadi provinsi dengan capaian terendah.

Kedua provinsi tersebut memberikan kontribusi dalam tingginya disparitas rata-rata lama sekolah antar provinsi yaitu 4,14 tahun. Dibandingkan dengan tahun 2011 dan 2013, kondisi pada tahun 2013 relatif tidak berbeda karena perubahan yang terjadi relatif kecil. Hasil penghitungan mencatat bahwa tahun 2011 perbedaan mencapai capaian rata-rata lama sekolah antarprovinsi 4,27 tahun. Kondisi ini membutuhkan komitmen yang lebih serius sehingga kesenjangan di bidang pendidikan dapat diturunkan.

“Kesenjangan Dimensi Ekonomi Antarprovinsi Makin Melebar”

Ketimpangan pembangunan pada dimensi standar hidup layak terlihat dari besarnya perbedaan antarprovinsi pada indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan (PPP). Kondisi perekonomian yang dinamis telah mengakibatkan tingkat kemajuan setiap provinsi berbeda-beda. Pada



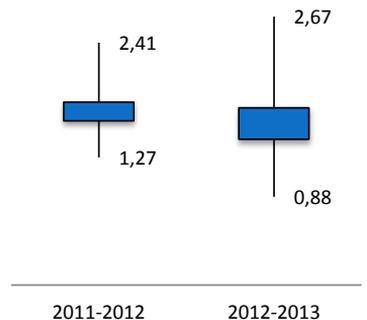
Gambar 4.4
Disparitas Pengeluaran per Kapita Antarprovinsi di Indonesia, 2011-2013

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2013, rentang pencapaian antara provinsi sebesar 52,44. Kondisi ini terjadi akibat perbedaan pencapaian antara dua provinsi yaitu Riau (657,26) dan Papua Barat (604,82). Tidak seperti komponen penyusun IPM lainnya yang mengalami penyempitan rentang, dimensi standar hidup justru memperlihatkan rentang antarprovinsi yang semakin jauh. Pada tahun 2011 perbedaan antarprovinsi sebesar 51,55 dan sempat mengalami kenaikan di tahun 2012 menjadi 52,92, namun kembali menurun di tahun 2013. Pada tahun 2011, 2012 dan 2013 provinsi yang menjadi penyumbang lebaranya rentang tersebut sama Provinsi Riau dan Papua Barat.

“Rentang Reduksi Shortfall pada Periode 2012-2013 Lebih Lebar Dibanding Periode 2011-2012”

Selain dilihat dari komponen penyusun IPM, kesenjangan capaian pembangunan manusia juga dapat dilihat dari kecepatannya dalam mencapai IPM ideal. Gambar 4.5 menunjukkan perbedaan variasi reduksi *shortfall* antarprovinsi, dimana reduksi *shortfall* pada periode waktu 2012-2013 lebih bervariasi dibandingkan reduksi *shortfall* pada periode 2011-2012. Provinsi Bali dan Aceh menjadi provinsi dengan reduksi *shortfall* tertinggi dan terendah pada kurun waktu 2011-2012. Sedangkan pada periode 2012-2013 provinsi dengan reduksi *shortfall* tertinggi dan terendah adalah



Gambar 4.5
Reduksi Shortfall Provinsi Selma Periode 2011-2012 dan Periode 2012-2013

Sumber: Badan Pusat Statistik

DI Yogyakarta dan Kalimantan Tengah. Hal ini menunjukkan kecepatan pembangunan manusia menuju ideal semakin berbeda antarprovinsi.

4.2 Disparitas IPM Antarkabupaten di Indonesia

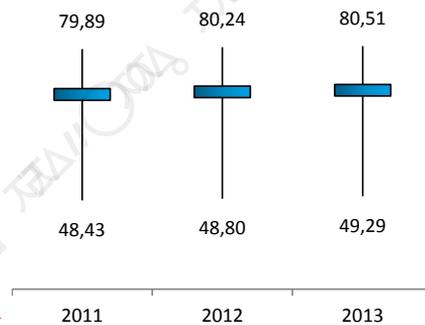
Fenomena kesenjangan antarprovinsi di Indonesia memperlihatkan perhatian yang tidak sama yang diberikan pemerintah daerah dalam hal pembangunan manusia. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat karena perbedaan perhatian tersebut juga terjadi sampai wilayah kabupaten/kota. Pemerintah pusat bertugas untuk memastikan bahwa kesenjangan semakin menyempit dari tahun ke tahun. Pemerintah pusat perlu memfasilitasi kabupaten/kota dalam menginventarisasi berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk meningkatkan dan memacu pembangunan manusia.

“Kesenjangan Capaian Pembangunan Manusia Antarkabupaten/kota Makin Menyempit”

Kesenjangan capaian pembangunan manusia antarkabupaten/kota lebih buruk dibandingkan di tingkat provinsi. Kesenjangan antarkabupaten/kota di tahun 2013 terlihat makin menyempit dibandingkan tahun 2011. Pada tahun 2013 rentang pencapaian

Gambar 4.6
Disparitas Pembangunan Manusia Antarkabupaten/kota di Indonesia, 2011-2013

Sumber: Badan Pusat Statistik



pembangunan manusia antarkabupaten/kota di Indonesia mencapai 31,22 poin dengan nilai tertinggi sebesar 80,51 dicapai oleh Kota Yogyakarta (Provinsi DI Yogyakarta) dan nilai terendah berada di Kab. Nduga (Provinsi Papua) sebesar 49,29. Pada tahun 2011 dan 2012 kesenjangan lebih tinggi dari tahun 2013 yaitu sebesar 31,46 dan 31,44 poin. Pada tahun 2011, 2012 dan 2013 kabupaten/kota yang menjadi penyumbang lebarnya rentang tersebut sama yaitu Kota Yogyakarta (Provinsi DI Yogyakarta) dan Kab. Nduga (Provinsi Papua)

Pembangunan manusia tentunya tidak terlepas dari komponen-komponen penyusunnya sehingga wajar jika kesenjangan pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota juga terjadi pada pada komponen pembentuknya. Gambar 4.7 sampai dengan Gambar 4.10 memperlihatkan secara jelas bahwa kesenjangan cukup lebar terjadi pada semua komponen pembentuk IPM.

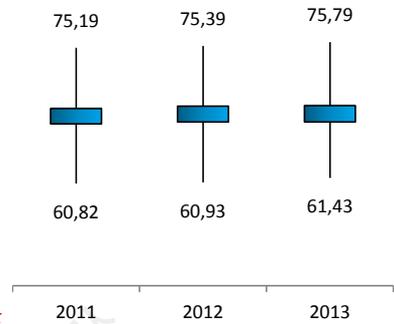
“Kesenjangan Capaian Kesehatan Antarkabupaten/kota Belum Menunjukkan Perbaikan”

Kesehatan sebagai salah satu komponen penyusun IPM yang memiliki peran dalam menciptakan manusia yang berkualitas dengan derajat kesehatan yang tinggi. Oleh karena itu, pembangunan di bidang kesehatan sudah seharusnya menjadi pusat perhatian

pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Pembangunan manusia di bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan manusia yang merata di semua wilayah. Namun, hal ini tampaknya masih menjadi persoalan klasik di tingkat kabupaten.

Disparitas di bidang kesehatan masih terlihat cukup lebar di tahun 2013. Pencapaian tertinggi dalam komponen angka harapan hidup terdapat di Kab. Sleman (Provinsi DI Yogyakarta) sebesar 75,79 tahun dan pencapaian terendah pada Kab. Sumbawa (Provinsi NTB) sebesar 61,43 tahun

Gambar 4.7
Disparitas Angka Harapan Hidup Antarkabupaten/kota di Indonesia, 2011-2013



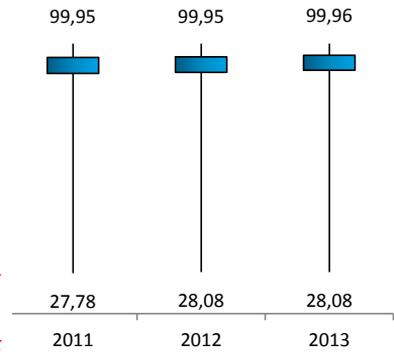
Sumber: Badan Pusat Statistik

sehingga rentang capaian antara kedua kabupaten tersebut adalah 14,36 poin. Apabila dibandingkan dengan tahun 2011 tidak tampak adanya perbaikan kondisi dimana rentang disparitas hampir sama di tahun 2013. Perbedaan capaian pada tahun 2011 tercatat sebesar 14,37 poin. Sedangkan pada tahun 2012 perbedaan capaian AHH lebih tinggi dari tahun 2013, yaitu sebesar 14,46.

“Kesenjangan Capaian Pendidikan Antarkabupaten/kota Makin Berkurang”

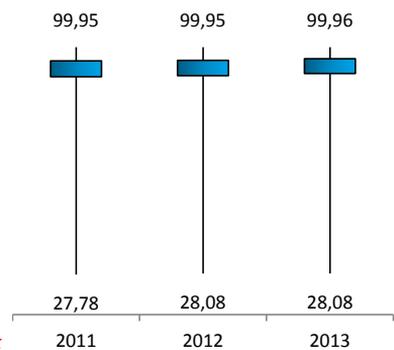
Pembangunan di bidang pendidikan pada setiap wilayah tampak sangat timpang. Hal ini terlihat dari rentang pencapaian pada indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah yang sangat lebar. Pada indikator angka melek huruf, indikator ini mencatat rentang yang cukup tinggi, yaitu 71,88 persen. Meski demikian, capaian ini relatif lebih baik dibanding capaian pada tahun 2011 (72,17 persen). Jika dibandingkan dengan tahun 2012 (71,87) pencapaian saat ini relatif sama.

Gambar 4.8
Disparitas Angka Melek Huruf Antarkabupaten/kota di Indonesia, 2011-2013



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 4.9
Disparitas Rata-rata Lama Sekolah Antarkabupaten/kota di Indonesia, 2011-2013



Sumber: Badan Pusat Statistik

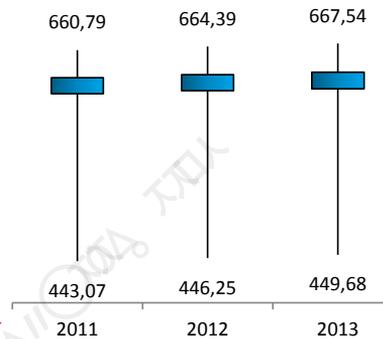
Pada indikator rata-rata lama sekolah kesenjangan antarwilayah juga cukup memprihatinkan. Kesenjangan capaian rata-rata lama sekolah pada tingkat kabupaten pada tahun 2013 jika dibandingkan tahun 2012 tidak menunjukkan perbaikan yang terlalu berarti. Namun jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2011, kesenjangan capaian antarkabupaten tampak semakin sempit. Pada tahun 2011 perbedaan rata-rata lama sekolah antarkabupaten/kota di Indonesia sebesar 10,10 tahun, kemudian menyempit menjadi 9,96 tahun pada 2012, dan terakhir pada tahun 2013 perbedaannya menjadi 9,97 tahun.

“Kesenjangan Ekonomi Antarkabupaten/kota Masih Lebar”

Kesenjangan capaian pembangunan manusia selanjutnya tampak pada komponen pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Seperti diperlihatkan pada Gambar 4.10, kesenjangan pada dimensi ini begitu lebar. Pada tahun 2011 rentang kesenjangan antarkabupaten 217,72 ribu.

Gambar 4.10
Disparitas Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Antarkabupaten/kota di Indonesia, 2011-2013

Sumber: Badan Pusat Statistik



Kemudian pada tahun 2012, data empiris menunjukkan bahwa rentang disparitas melebar menjadi 218,15 ribu. Pada tahun 2013 kesenjangan ekonomi masyarakat antarkabupaten/kota dilihat dari perbedaan pengeluaran per kapita disesuaikan antara kabupaten terendah dan tertinggi yang mencapai 217,87 ribu.

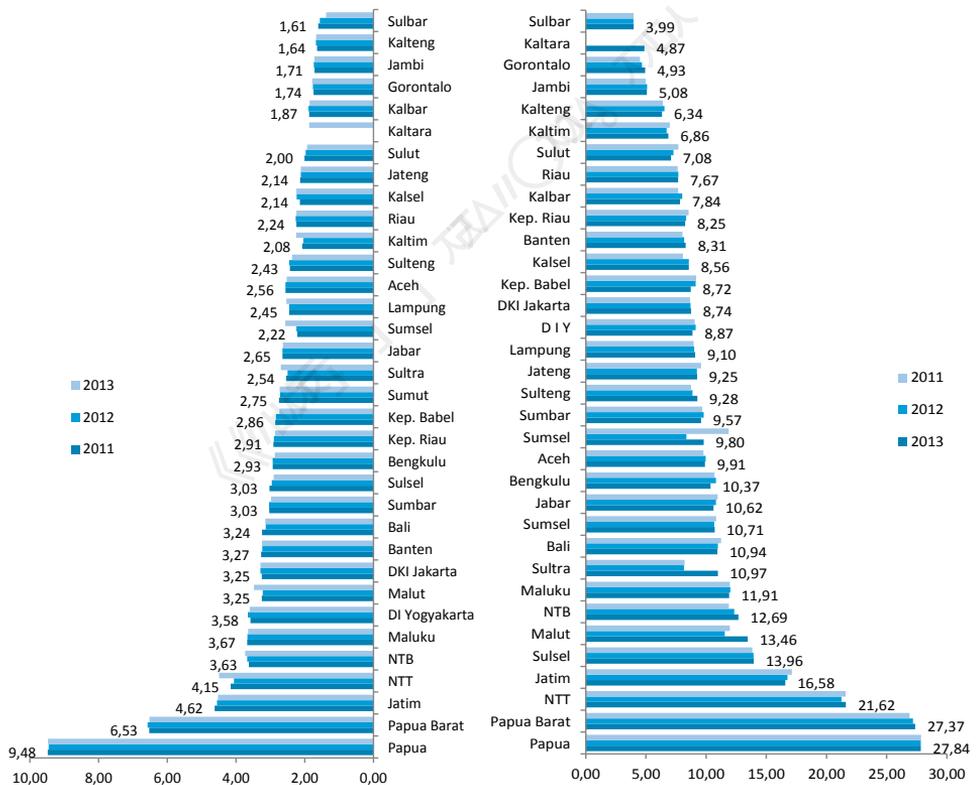
4.3 Disparitas IPM Antarkabupaten di dalam Provinsi

Peningkatan capaian pembangunan manusia Indonesia dapat dilakukan dengan cara mengurangi kesenjangan yang terjadi di level provinsi. Hal yang sama juga berlaku pada level provinsi, dimana peningkatan pembangunan manusia di level tersebut dilakukan dengan cara mengatasi kesenjangan capaian pembangunan manusia di level kabupaten/kota dalam provinsi.

Ukuran yang dapat digunakan untuk menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antarkabupaten di dalam provinsi adalah range dan standar deviasi. Range (rentang) merupakan ukuran yang menggambarkan selisih antara nilai tertinggi dengan nilai terendah. Semakin besar rentang yang dicapai, semakin tinggi pula kesenjangan terjadi, begitu pula sebaliknya. Sedangkan standar deviasi digunakan untuk melihat variasi data, bagaimana penyebaran data IPM kabupaten-kabupaten di dalam provinsi. Semakin besar nilai standar deviasi pada suatu provinsi, maka semakin besar variasi yang terjadi dan memberikan sebuah peringatan bahwa pembangunan manusia di provinsi tersebut masih belum merata.

“Kesenjangan IPM Antarkabupaten/kota dalam Provinsi Masih Melebar di Beberapa Provinsi”

Gambar 4.11 memperlihatkan rentang pencapaian pembangunan manusia dan standar deviasi di level kabupaten/kota pada masing-masing provinsi di Indonesia. Rentang dan standar deviasi tersebut telah diurutkan mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi pada tahun 2013. Secara umum kesenjangan IPM antarkabupaten/kota dalam provinsi semakin membaik. Meskipun secara nasional tampak adanya perbaikan kondisi kesenjangan namun dibalik fenomena tersebut tersimpan fakta bahwa masih terdapat provinsi yang justru mengalami pelebaran rentang capaian pembangunan manusia dari tahun 2011-2013. Provinsi tersebut antara lain NTT, Maluku Utara, dan Sulawesi Tenggara. Fenomena kesenjangan yang semakin lebar pada beberapa provinsi tersebut menjadi catatan penting bagi pemerintah, paling tidak dalam menentukan prioritas pembangunan manusia di level provinsi.



Gambar 4.11
Rentang Pencapaian dan Standar Deviasi IPM Kabupaten/Kota dalam Provinsi 2011-2013

Sumber: Badan Pusat Statistik

Apabila dilihat dari tingkat pemerataannya berdasarkan nilai standar deviasi secara umum pembangunan manusia pada level antarkabupaten/kota dalam provinsi semakin merata. Hal ini tergambar dari nilai standar deviasi yang semakin mengecil dari tahun 2011-2013. Namun, masih terdapat beberapa provinsi yang tingkat pemerataan

pembangunan manusia antarkabupaten/kota di dalam provinsinya semakin menurun dari tahun 2006-2012, diantaranya adalah Provinsi Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan NTB. Provinsi DKI Jakarta sebagai provinsi dengan capaian pembangunan manusia tertinggi ketiga di Indonesia ternyata menyimpan fakta terjadinya penurunan tingkat pemerataan pembangunan manusia.

“Kesenjangan IPM Tertinggi terjadi di Provinsi Papua dan Terendah di Provinsi Sulawesi Barat”

Pada tahun 2013 Provinsi Sulawesi Barat merupakan provinsi dengan capaian rentang terendah (3,99). Angka ini merupakan selisih antara pencapaian IPM tertinggi yaitu Kab. Majene (73,16) dan pencapaian IPM terendah yaitu Kab. Polewali Mamasa (69,17). Rentang pencapaian pembangunan manusia antarkabupaten di Sulawesi Barat dari tahun 2011-2013 berada pada kisaran 3,98 persen. Sementara itu, provinsi dengan rentang capaian yang cukup tinggi pada tahun 2013 antara lain Provinsi Jawa Timur (16,58), NTT (21,62), Papua Barat (27,37) dan Papua (27,84). Dari keempat provinsi tersebut hanya Provinsi Jawa Timur yang menunjukkan perbaikan atau mengalami penyempitan rentang capaian dari tahun 2011-2013. Sedangkan rentang capaian provinsi NTT berfluktuatif, nilainya turun pada tahun 2011 kemudian naik pada tahun 2013. Kondisi yang cukup memprihantinkan terjadi di Provinsi Papua Barat karena rentang capaian pembangunan manusia antar kabupaten justru semakin melebar dari tahun 2006-2012. Rentang capaian pada Provinsi Papua terlihat semakin melebar pada tahun 2012 (21,24) tetapi nilainya tetap pada tahun 2013 (21,62).

“Kesenjangan Capaian IPM di Papua Makin Melebar”

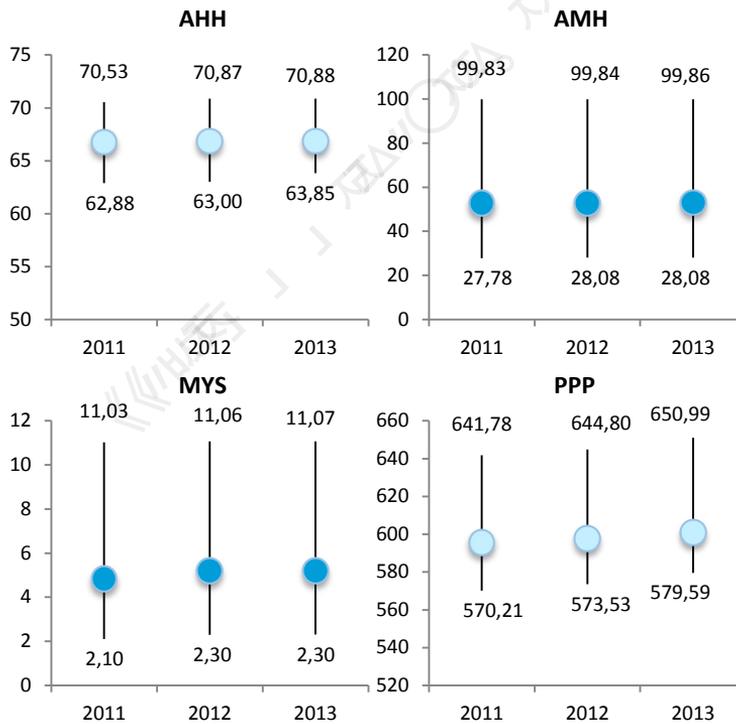
Provinsi Papua adalah provinsi dengan variasi capaian yang paling tinggi dari tahun 2011-2013. Standar deviasi di Provinsi Papua pada tahun 2012 sebesar 9,48. Tingginya nilai standar deviasi di Provinsi Papua merupakan gambaran ketidakmerataan pembangunan manusia di provinsi tersebut.

Lebarnya rentang capaian pembangunan manusia antar kabupaten di Papua pada tahun 2013 disebabkan oleh tingginya pencapaian IPM di Kota Jayapura (77,12) dan rendahnya pencapaian IPM di Kab. Nduga (49,29). Tingginya kesenjangan pembangunan manusia di Papua tidak lepas dari komponen penyusunnya. Pada dimensi kesehatan yang direpresentasikan oleh indikator angka harapan hidup terlihat adanya kesenjangan antarkabupaten dengan rentang sebesar 7,03 poin di tahun 2013. Rentang tersebut lebih kecil dari tahun 2011 dan 2012 yaitu 7,65 dan 7,87 poin. Disparitas antarkabupaten di tahun 2013 tersebut disumbang oleh Kab. Mimika (70,88 tahun) dan Kab. Merauke (63,85 tahun).

Kesenjangan yang cukup serius di Provinsi Papua sebenarnya terjadi pada dimensi pendidikan, yaitu pada komponen angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Rentang capaian angka melek huruf di Papua tahun 2013 mencapai 71,78 poin. Rentang ini tidak lebih baik dari tahun 2012 (71,76 poin) meskipun sudah mengalami penurunan jika

dibandingkan dengan tahun 2011 (72,05 poin). Pencapaian angka melek huruf di Kota Jayapura sebesar 99,86 persen dan pencapaian di Kab. Intan Jaya sebesar 28,08 persen menyebabkan rentang yang cukup ekstrim di Provinsi Papua. Selanjutnya, pada indikator rata-rata lama sekolah juga menunjukkan disparitas yang cukup serius. Rentang capaian komponen rata-rata lama sekolah di Papua tahun 2013 tercatat sebesar 8,77 poin diperoleh dari selisih antara Kota Jayapura (11,07 tahun) dan Kab. Intan Jaya (2,30 tahun). Rentang tersebut turun dari 8,93 poin pada tahun 2012.

Kondisi kesenjangan yang semakin melebar juga terjadi pada komponen pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pada tahun 2011, rentang capaian pada indikator tersebut sebesar 71,57 poin. Di tahun 2012 kesenjangan turun menjadi 71,27 poin namun kembali meningkat di tahun 2013. Kota Jayapura mencatat pencapaian tertinggi pada tahun 2013 yaitu 644,99 ribu dan Kab. Lanny Jaya mencatat pencapaian terendah yaitu 573,53 ribu PPP. Jarak capaian yang cukup jauh antar dua kabupaten/kota tersebut menyebabkan rentang yang lebar pada komponen PPP.



Gambar 4.12
Disparitas Komponen IPM Antarkabupaten di Provinsi Papua, 2011-2013

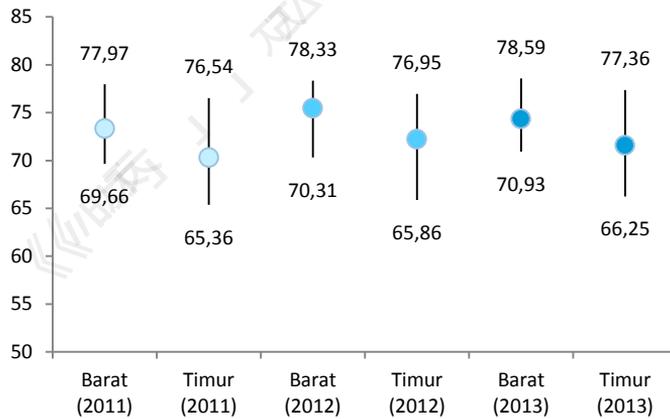
Sumber: Badan Pusat Statistik

4.4 Disparitas IPM Antara Wilayah Barat dan Wilayah Timur Indonesia

Program pembangunan yang dijalankan pemerintah nampaknya belum menunjukkan indikasi pemerataan. Lebarinya kesenjangan dalam capaian pembangunan manusia antara wilayah barat dan wilayah timur masih menjadi problematika yang memerlukan penanganan serius dari pemerintah.

“Disparitas IPM Antarprovinsi di Wilayah Indonesia Barat dan Wilayah Indonesia Timur Makin Mengecil”

Disparitas pembangunan manusia di wilayah timur tahun 2013 sebesar 11,11 poin, sedangkan di wilayah barat hanya 7,66 poin. Rentang disparitas tersebut sudah lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun 2011 yaitu 11,18 poin (wilayah timur) dan 8,32 poin (wilayah barat). Dari fakta tersebut terlihat bahwa penurunan rentang disparitas di wilayah timur lebih lambat dari wilayah barat. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan manusia di wilayah timur relatif stagnan. Minimnya infrastruktur di wilayah timur membuat pencapaian pembangunan manusia di wilayah tersebut relatif lebih lambat dibandingkan wilayah barat.



Gambar 4.13
Disparitas Pembangunan Manusia Antarprovinsi di Bagian Barat dan Timur, 2011-2013

Sumber: Badan Pusat Statistik

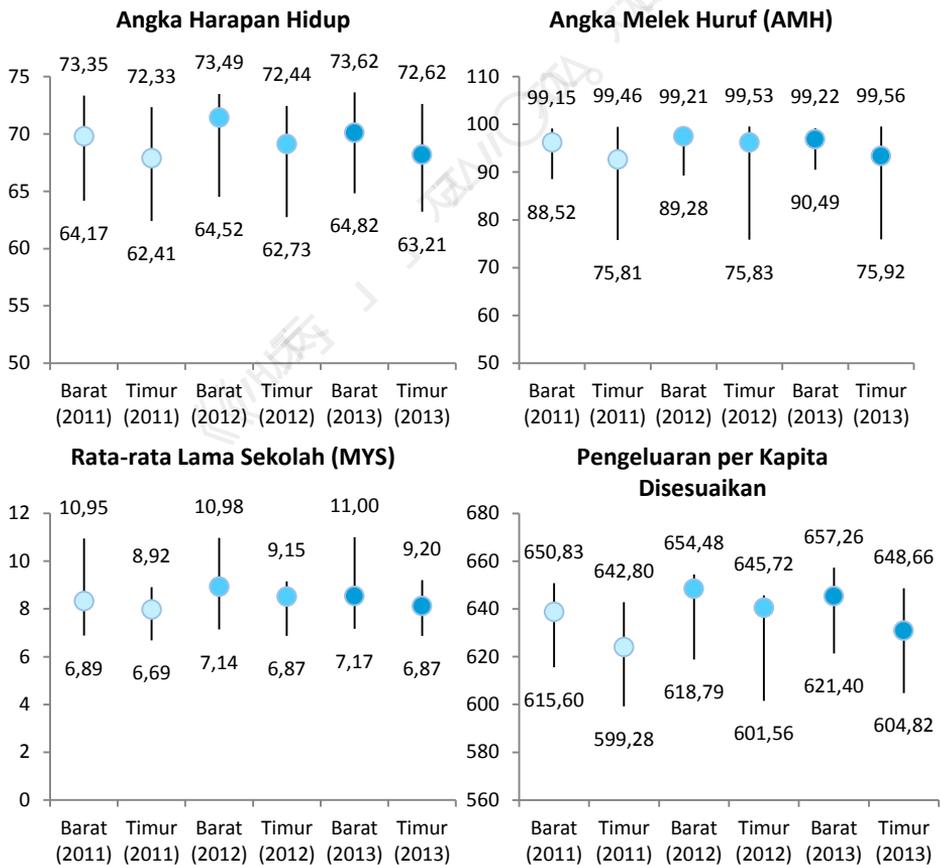
Kesenjangan pembangunan manusia antara wilayah bagian barat dan wilayah bagian timur nampak lebih jelas apabila dilihat menurut komponen penyusun IPM. Secara umum, kesenjangan tersebut terjadi akibat dari pencapaian di bidang pendidikan yaitu melek huruf dan rata-rata lama sekolah serta pencapaian dalam standar hidup layak yang dicerminkan oleh rata-rata pengeluaran per kapita. Sementara pencapaian di bidang kesehatan relatif sama antara wilayah bagian barat dan timur.

“Kesenjangan Capaian AMH di Wilayah Indonesia Barat makin Mengecil, sementara di Wilayah Indonesia Timur Tidak Berubah”

Di bidang pendidikan, terutama pada indikator angka melek huruf, terlihat bahwa rentang capaian angka melek huruf di wilayah barat tidak terlalu lebar. Ketersediaan sarana dan

infrastruktur yang lengkap mendukung keberhasilan program pemberantasan buta huruf di wilayah barat sehingga capaian angka melek huruf di wilayah tersebut lebih merata di banding wilayah timur.

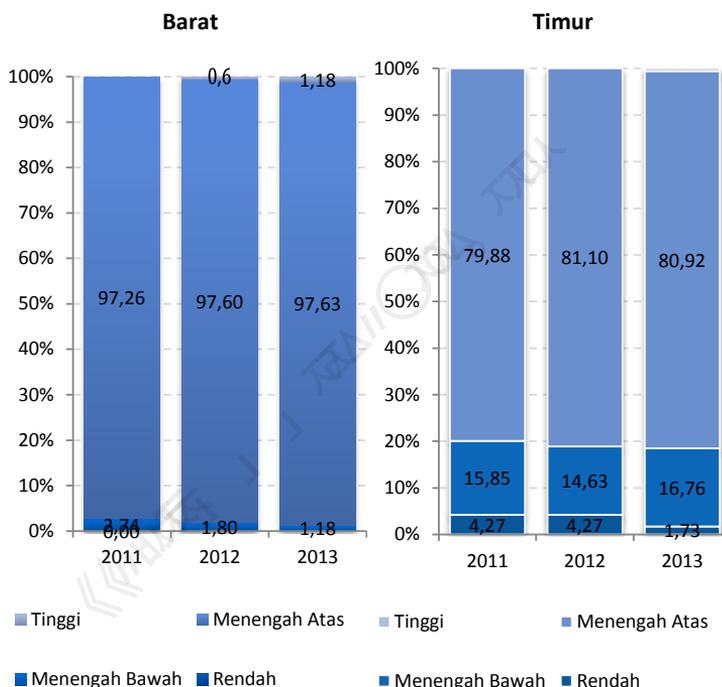
Pada tahun 2013 rentang capaian angka melek huruf di wilayah barat sebesar 8,73 persen. Provinsi dengan capaian tertinggi yaitu DKI Jakarta (99,22 persen) dan provinsi dengan capaian terendah adalah Jawa Timur (90,49 persen). Sementara itu, wilayah timur mencatat kesenjangan yang jauh lebih tinggi yaitu 23,65 persen. Provinsi Papua dengan capaian sebesar 75,92 persen dan Provinsi Sulawesi Utara yang capaian melek hurufnya sebesar 99,56 persen menjadi penyumbang tingginya kesenjangan tersebut. Jika dibandingkan dengan periode waktu sebelumnya yaitu tahun 2011 dan 2012, kesenjangan antarprovinsi di wilayah barat menunjukkan adanya perbaikan yang berarti. Sementara perbaikan di wilayah timur memang relatif lebih lambat dibanding wilayah barat. Dari Gambar 4.14 terlihat bahwa rentang capaian melek huruf provinsi di wilayah barat semakin mengecil dari tahun ke tahun, sementara di wilayah timur nampak stagnan.



Gambar 4.14 Disparitas Komponen IPM Antarprovinsi di Wilayah Barat dan Timur Indonesia, 2011-2013

Sumber: Badan Pusat Statistik

Selain pencapaian angka melek huruf, pemerintah juga perlu memusatkan perhatian pada capaian rata-rata lama sekolah di wilayah barat dan timur. Dalam hal ini perhatian justru harus ditekankan pada wilayah barat karena kesenjangan antarprovinsi terlihat lebih lebar di wilayah tersebut. Wilayah barat mencatat pencapaian tertinggi yaitu 11 tahun (DKI Jakarta) dan pencapaian terendah terdapat di Provinsi Kalimantan Barat (7,17 tahun). Capaian pada kedua provinsi tersebut membuat lebarnya rentang capaian di wilayah barat. Disparitas capaian rata-rata lama sekolah di wilayah barat tahun 2013 sebesar 3,84 tahun, sementara wilayah timur hanya 2,34 tahun. Provinsi dengan pencapaian tertinggi di wilayah timur adalah Provinsi Maluku (9,20 tahun) dan Provinsi Papua menjadi provinsi dengan capaian terendah (6,87 tahun).



Gambar 4.15
Jumlah Kabupaten/
Kota menurut
Kategori Pencapaian
Pembangunan Manusia
di Wilayah Indonesia
Bagian Barat dan Timur,
2011-2013

Sumber: Badan Pusat Statistik

Kesenjangan antara wilayah barat dan wilayah timur tidak hanya terjadi di bidang pendidikan, tetapi juga dalam hal standar hidup layak yang dicerminkan melalui indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Gejolak krisis global yang sempat melanda perekonomian dunia tidak terlalu berdampak pada kondisi perekonomian nasional. Namun, kesenjangan antara wilayah bagian barat dan timur masih terjadi. Disparitas antarprovinsi di wilayah barat tahun 2013 sebesar 35,86 poin dan di wilayah timur sebesar 43,84 poin. Pada tahun 2013, rentang nilai disparitas di wilayah timur mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2012. Sementara di wilayah barat justru terjadi peningkatan rentang setiap tahunnya dari tahun 2011 sampai 2013. Selain dari rentang tersebut, kesenjangan juga terlihat dari capaian tertinggi dan terendah pada masing-masing wilayah. Pencapaian tertinggi di kedua wilayah tidak terlalu berbeda jauh. Di wilayah bagian barat, Riau mencatat pencapaian tertinggi yaitu Rp 657,26 ribu PPP. Sementara itu, di wilayah bagian timur NTB mencatat pencapaian tertinggi yaitu Rp 648,66 ribu PPP. Kesenjangan tampak dari pencapaian terendah antara kedua wilayah.

Aceh menjadi provinsi dengan pencapaian terendah di wilayah bagian barat yaitu Rp 621,40 ribu PPP, sementara Papua Barat menempati posisi akhir di wilayah bagian timur dengan pencapaian sebesar Rp 604,82 ribu PPP.

Hasil penghitungan menunjukkan bahwa pada tahun 2013 masih terdapat 1,73 persen kabupaten/kota di wilayah timur masih tertinggal karena tingkat pencapaian pembangunan manusianya tergolong kategori rendah. Fakta ini memperlihatkan bahwa terdapat ketimpangan dengan wilayah bagian barat dimana tidak satu pun kabupaten tergolong kategori rendah. Pencapaian level menengah bawah dan level menengah atas juga menggambarkan adanya kesenjangan antara kedua wilayah. Sekitar 16,76 persen kabupaten di wilayah timur masuk kategori menengah bawah dan 80,92 persen mencapai kategori menengah atas, sementara di wilayah bagian barat hanya 1,18 persen yang masuk kategori menengah bawah dan kategori menengah atas 97,63 persen. Lebih jauh lagi, terdapat 1,18 persen kabupaten di wilayah barat yang masuk dalam kategori tinggi, sementara di wilayah timur belum ada satu pun kabupaten dengan kategori tersebut.

Kesimpulan

Pembangunan manusia Indonesia terus mengalami peningkatan selama periode 2011 hingga 2013. Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia telah meningkat dari 72,77 pada tahun 2011 menjadi 73,81 pada tahun 2013, atau naik sebesar 1,04 poin. Namun demikian, kecepatan IPM dalam periode 2011-2012 relatif sama dengan periode 2012-2013. Hal ini mengindikasikan bahwa sebenarnya pembangunan manusia di Indonesia tidak banyak bergerak. Angka harapan hidup saat lahir (e_0) masih jauh dari target RPJMN 2014. Sementara itu, upaya ekstra diperlukan untuk mengatasi penduduk buta aksara (15 tahun ke atas) yang hingga saat ini hanya tersisa 5,86 persen. Di sisi lain, capaian cukup baik ditunjukkan oleh rata-rata lama sekolah yang hampir mencapai target RPJMN 2014. Tugas lain yang harus segera dituntaskan yaitu meningkatkan ekonomi masyarakat sebab capaian pengeluaran per kapita disesuaikan masih jauh dari target Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 2018.

Pembangunan manusia pada level provinsi dan kabupaten/kota menunjukkan perkembangan yang semakin membaik. Hingga kini, seluruh provinsi telah masuk dalam kelompok pembangunan manusia “menengah atas” dan hanya tersisa satu provinsi yang masuk kelompok pembangunan manusia “menengah bawah”. Tantangan yang masih dihadapi dalam pembangunan manusia pada level kabupaten/kota adalah masih terdapat kabupaten/kota yang berada pada kelompok pembangunan manusia “rendah”. Selain itu, sepuluh kabupaten/kota dengan capaian IPM terendah masih berada di Provinsi Papua.

Peningkatan kapabilitas dasar manusia menjadi upaya penting dalam meningkatkan kualitas manusia yang akhirnya berdampak pada peningkatan pembangunan manusia. Di bidang pendidikan, partisipasi sekolah pada pendidikan dasar sudah cukup tinggi. Namun demikian, pendidikan formal belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh semua kalangan dan angka putus sekolah pada usia 16-18 tahun masih cukup tinggi. Di bidang kesehatan, fasilitas kesehatan sudah tersebar cukup merata. Akan tetapi, kondisi lingkungan masyarakat belum sepenuhnya sehat serta praktek persalinan belum aman dan merata. Kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan fasilitas kesehatan telah meningkat walaupun pemanfaatannya masih belum sepenuhnya merata. Di bidang ekonomi, tantangan yang dihadapi masih seputar kemiskinan dan pengangguran. Selama periode 2011 hingga 2013, kemiskinan cenderung turun tetapi relatif lambat. Karakteristik kemiskinan juga masih didominasi penduduk di wilayah perdesaan yang menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. Sementara itu, pengangguran juga menunjukkan tren yang menurun meskipun relatif lambat dan sekitar 91 persen (Agustus 2013) penganggur masih berpendidikan di bawah SMA/ sederajat.

Tantangan lain yang harus dihadapi adalah kesenjangan capaian pembangunan manusia antarwilayah di Indonesia. **Selama kurun waktu 2011 hingga 2013, kesenjangan capaian**

pembangunan manusia antarprovinsi semakin menyempit. Selain itu, pembangunan manusia di bidang kesehatan dan pendidikan juga semakin merata. Akan tetapi, kesenjangan dimensi ekonomi antarprovinsi justru semakin melebar. Meski kemajuan antarprovinsi terlihat, kecepatan pembangunan manusia antarprovinsi justru kurang merata pada periode 2012-2013 dibanding periode 2011-2012. Kemajuan pembangunan manusia antarprovinsi di Indonesia juga tercermin pada level kabupaten/kota. Kesenjangan capaian pembangunan manusia antarkabupaten/kota semakin menyempit. Menyempitnya kesenjangan ini merupakan kontribusi capaian pendidikan antarkabupaten/kota yang semakin membaik. Pada beberapa provinsi, kesenjangan capaian IPM di dalam provinsi masih cukup lebar. Pada tahun 2013, kesenjangan tertinggi terjadi di Provinsi Papua dan kesenjangan terendah terjadi di Provinsi Sulawesi Barat.

Kesenjangan antarprovinsi di wilayah Indonesia barat dengan timur semakin mengecil, tetapi kesenjangan di wilayah Indonesia barat lebih rendah dibanding wilayah Indonesia timur. Hal ini didukung oleh fakta bahwa kesenjangan capaian AMH di wilayah Indonesia barat semakin mengecil sementara di wilayah Indonesia timur relatif tidak berubah. Selain itu, kesenjangan ekonomi di wilayah Indonesia barat mengecil sedangkan di wilayah Indonesia timur justru melebar. Lebih lanjut, pada tahun 2013 masih terdapat kabupaten/kota di wilayah Indonesia timur dengan status capaian pembangunan manusia “rendah”.

- Badan Pusat Statistik. 2011. *Indeks Pembangunan Manusia 2009-2010*. Jakarta: CV. Rioma.
- Badan Pusat Statistik. 2012. *Indeks Pembangunan Manusia 2010-2011*. Jakarta: CV. Rioma
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Indeks Pembangunan Manusia 2012*. Jakarta: CV. Rioma
- _____. 2011. *Ensiklopedia Indikator Ekonomi dan Sosial*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Hinde, Andrew. 1998. *Demographic Method*. London: Arnold.
- H. Preston, Samuel, et. all. 2004. *Demography: Measuring and Modelling Population Processes*. USA: Blackwell.
- Imawan, Wynandin dan Uzair Suhaimi. 1997. *Status dan Perkembangan Upaya Pembangunan Manusia di Indonesia: Perbandingan Antar Provinsi*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Meneg PP dan BPS. 2008. *Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2007*. Jakarta.
- Ritonga, Razali. (20 Desember 2006). Indeks Pembangunan Manusia. *Kompas*. Opini hal. 4.
- Siegel, Jacob. 2002. *Applied Demographic*. USA: Academic Press.
- UNDP, BPS, dan Bappenas. 2001. *Indonesia Laporan Pembangunan Manusia 2001: Demokrasi dan Pembangunan Manusia*.
- _____. 2004. *Laporan Pembangunan Manusia Indonesia 2004: Ekonomi dari Demokrasi*.
- United Nations Development Programme. 1993. *Human Development Report*. New York: UNDP.
- _____. 2000. *Human Development Report*. New York: UNDP.
- _____. 2005. *Human Development Report*. New York: UNDP.
- _____. 2009. *Human Development Report*. New York: UNDP.
- _____. 2010. *Human Development Report*. New York: UNDP.
- _____. 2011. *Human Development Report*. New York: UNDP.
- _____. 2014. *Human Development Report*. New York: UNDP.
- <http://id.wikipedia.org>
- <http://smartstat.wordpress.com/2010/11/21/korelasi-pearson>
- <http://www.depkes.go.id>

Tim Penulis

Laporan ini disusun oleh:

Pengarah:

Suhariyanto
Margo Yuwono

Editor:

Harmawanti Marhaeni
Yoyo Karyono

Penulis:

Evi Rahma Hismadinda
Adi Nugroho

Pengolah Data:

Adi Nugroho
Evi Rahma Hismadinda

Perapihan Naskah:

Adi Nugroho

Lampiran 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Provinsi, 2013

Kode	Provinsi	Angka Harapan Hidup	Angka Melek Huruf	Rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran per Kapita per Tahun	IPM	Reduksi Shortfall
1100	ACEH	69,40	97,04	9,02	621,40	73,05	1,95
1200	SUMATERA UTARA	69,90	97,84	9,13	646,83	75,55	1,69
1300	SUMATERA BARAT	70,09	97,38	8,63	644,59	75,01	1,23
1400	RIAU	71,73	98,48	8,78	657,26	77,25	1,51
1500	JAMBI	69,61	96,85	8,32	644,05	74,35	2,20
1600	SUMATERA SELATAN	70,10	97,55	8,04	641,35	74,36	1,45
1700	BENGKULU	70,44	96,55	8,55	637,50	74,41	1,86
1800	LAMPUNG	70,09	95,92	7,89	628,24	72,87	1,54
1900	KEP. BANGKA BELITUNG	69,46	96,44	7,73	651,22	74,29	1,95
2100	KEPULAUAN RIAU	69,97	98,07	9,91	651,37	76,56	1,51
3100	DKI JAKARTA	73,56	99,22	11,00	637,92	78,59	1,21
3200	JAWA BARAT	68,84	96,87	8,11	641,63	73,58	1,75
3300	JAWA TENGAH	71,97	91,71	7,43	646,44	74,05	2,56
3400	D I YOGYAKARTA	73,62	92,86	9,33	656,19	77,37	2,67
3500	JAWA TIMUR	70,37	90,49	7,53	654,02	73,54	2,61
3600	BANTEN	65,47	96,87	8,61	639,28	71,90	1,45
5100	BALI	71,20	91,03	8,58	643,78	74,11	2,34
5200	NUSA TENGGARA BARAT	63,21	85,19	7,20	648,66	67,73	2,52
5300	NUSA TENGGARA TIMUR	68,05	90,34	7,16	612,88	68,77	1,57
6100	KALIMANTAN BARAT	67,40	91,70	7,17	641,41	70,93	2,09
6200	KALIMANTAN TENGAH	71,47	97,99	8,17	646,01	75,68	0,88
6300	KALIMANTAN SELATAN	64,82	97,18	8,01	646,77	71,74	2,29
6400	KALIMANTAN TIMUR	71,78	97,95	9,39	653,70	77,33	2,65
6500	KALIMANTAN UTARA	69,70	96,40	8,52	647,51	74,72	N/A
7100	SULAWESI UTARA	72,62	99,56	9,09	646,19	77,36	1,78
7200	SULAWESI TENGAH	67,21	96,22	8,22	640,69	72,54	1,44
7300	SULAWESI SELATAN	70,60	89,69	8,01	646,71	73,28	2,14
7400	SULAWESI TENGGARA	68,56	92,59	8,44	628,77	71,73	2,35
7500	GORONTALO	67,54	96,87	7,52	633,14	71,77	1,61
7600	SULAWESI BARAT	68,34	90,54	7,35	642,66	71,41	2,35
8100	MALUKU	67,88	98,25	9,20	622,59	72,70	1,00
8200	MALUKU UTARA	66,97	97,45	8,72	609,26	70,63	2,16
9100	PAPUA BARAT	69,14	94,14	8,53	604,82	70,62	1,34
9400	PAPUA	69,13	75,92	6,87	616,76	66,25	1,15
0000	Indonesia	70,07	94,14	8,14	643,36	73,81	1,97

Lampiran 2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota, 2013

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup	Angka Melek Huruf	Rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	IPM	Reduksi Shortfall
1100	ACEH	69,40	97,04	9,02	621,40	73,05	1,95
1101	Simeulue	63,32	99,79	8,97	628,09	70,76	2,24
1102	Aceh Singkil	65,58	96,27	7,83	620,40	69,79	1,39
1103	Aceh Selatan	67,54	96,60	8,51	616,71	71,18	1,60
1104	Aceh Tenggara	69,69	98,08	9,38	609,76	72,81	2,02
1105	Aceh Timur	70,26	98,33	8,58	599,27	71,79	2,14
1106	Aceh Tengah	70,26	98,98	9,77	628,15	75,04	2,41
1107	Aceh Barat	70,55	95,12	8,81	610,22	72,24	1,82
1108	Aceh Besar	71,17	97,00	9,86	619,61	74,51	1,46
1109	Pidie	70,34	96,32	8,75	622,80	73,32	1,86
1110	Bireuen	72,63	98,55	9,31	603,75	74,03	1,25
1111	Aceh Utara	70,26	97,87	9,26	616,46	73,51	1,65
1112	Aceh Barat Daya	67,78	96,51	8,35	628,41	72,07	1,93
1113	Gayo Lues	67,62	88,19	8,76	610,93	69,09	1,76
1114	Aceh Tamiang	68,75	98,38	8,89	610,37	72,04	1,35
1115	Nagan Raya	70,26	92,12	8,40	615,23	71,50	2,94
1116	Aceh Jaya	68,53	95,67	8,77	607,36	71,00	2,18
1117	Bener Meriah	68,04	98,94	8,98	617,52	72,39	1,86
1118	Pidie Jaya	69,76	95,54	8,75	634,12	73,69	2,10
1171	Kota Banda Aceh	71,72	99,39	12,27	643,83	79,00	2,35
1172	Kota Sabang	71,89	99,14	10,63	636,22	77,23	1,51
1173	Kota Langsa	71,23	99,36	10,60	613,00	75,10	1,42
1174	Kota Lhokseumawe	72,03	99,69	10,67	641,23	77,84	2,69
1175	Kota Subulussalam	66,63	96,57	7,66	624,12	70,60	1,82

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup	Angka Melek Huruf	Rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	IPM	Reduksi <i>Shortfall</i>
1200	SUMATERA UTARA	69,90	97,84	9,13	646,83	75,55	1,69
1201	Nias	70,12	90,80	6,47	618,20	69,93	1,22
1202	Mandailing Natal	63,79	99,36	7,99	647,85	71,72	1,00
1203	Tapanuli Selatan	67,61	99,88	8,98	653,60	75,13	1,40
1204	Tapanuli Tengah	68,57	96,40	8,21	630,49	72,55	1,81
1205	Tapanuli Utara	70,47	98,68	9,22	642,83	75,81	1,92
1206	Toba Samosir	70,86	98,57	9,89	655,68	77,49	1,20
1207	Labuhan Batu	70,25	99,08	8,79	646,10	75,71	1,71
1208	Asahan	69,32	98,27	8,33	640,40	74,23	1,65
1209	Simalungun	69,24	97,62	8,82	642,32	74,55	0,77
1210	Dairi	68,99	98,76	8,97	635,10	74,22	1,38
1211	Karo	72,44	99,08	9,60	636,24	76,76	2,30
1212	Deli Serdang	71,31	99,35	9,68	643,51	76,82	2,71
1213	Langkat	69,25	97,98	8,82	639,03	74,38	1,55
1214	Nias Selatan	70,86	85,38	6,47	611,02	68,58	1,10
1215	Humbang Hasundutan	68,09	98,23	9,38	624,50	73,09	1,07
1216	Pakpak Barat	68,20	97,52	8,81	624,12	72,54	1,94
1217	Samosir	70,01	97,99	9,57	634,56	75,02	1,20
1218	Serdang Bedagai	69,27	97,94	8,69	640,64	74,41	1,33
1219	Batu Bara	68,92	97,18	8,03	636,82	73,26	2,01
1220	Padang Lawas Utara	66,76	99,59	8,97	645,38	73,96	1,40
1221	Padang Lawas	67,19	99,67	8,46	637,97	73,27	1,12
1222	Labuhan Batu Selatan	70,67	99,05	8,63	641,73	75,48	2,31
1223	Labuhan Batu Utara	70,47	99,35	8,71	644,49	75,70	3,12
1224	Nias Utara	69,39	91,02	6,46	615,94	69,39	2,18
1225	Nias Barat	69,40	84,48	6,19	618,17	67,91	1,00
1271	Kota Sibolga	70,39	99,34	10,08	638,23	76,19	1,90
1272	Kota Tanjung Balai	71,25	99,43	9,09	631,55	75,44	1,52
1273	Kota Pematang Siantar	72,54	99,67	10,97	644,74	78,62	1,61
1274	Kota Tebing Tinggi	71,68	99,54	10,14	650,73	77,96	2,74
1275	Kota Medan	72,37	99,57	10,90	646,92	78,62	1,70
1276	Kota Binjai	72,07	99,47	10,08	646,49	77,79	1,88
1277	Kota Padang Sidempuan	69,89	99,77	10,37	639,36	76,31	1,14
1278	Kota Gunung Sitoli	70,82	94,92	8,51	621,32	72,99	1,39

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup	Angka Melek Huruf	Rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	IPM	Reduksi Shortfall
1300	SUMATERA BARAT	70,09	97,38	8,63	644,59	75,01	1,23
1301	Kepulauan Mentawai	68,72	93,88	6,76	613,89	69,72	1,48
1302	Pesisir Selatan	67,92	96,56	8,43	638,20	72,98	1,99
1303	Solok	67,33	97,30	8,06	637,14	72,46	1,10
1304	Sawah Lunto/Sijunjung	67,63	94,83	7,59	642,70	72,15	1,26
1305	Tanah Datar	71,75	97,41	8,43	638,22	75,29	1,17
1306	Padang Pariaman	69,44	94,86	7,47	640,82	72,93	1,46
1307	Agam	69,43	98,36	8,63	640,06	74,50	1,51
1308	Limapuluh Koto	69,20	99,08	8,02	620,00	72,54	1,08
1309	Pasaman	68,17	98,93	7,87	649,47	74,10	1,20
1310	Solok Selatan	64,94	97,72	8,17	623,15	70,23	1,78
1311	Dharmas Raya	66,55	97,33	8,26	615,50	70,52	0,90
1312	Pasaman Barat	65,77	98,37	8,06	631,43	71,39	1,11
1371	Kota Padang	71,44	99,52	10,94	656,01	78,82	1,26
1372	Kota Solok	70,05	99,32	10,51	645,09	76,85	1,30
1373	Kota Sawah Lunto	72,11	98,64	9,42	633,06	76,11	0,99
1374	Kota Padang Panjang	72,08	99,35	10,76	653,52	78,81	1,42
1375	Kota Bukit Tinggi	71,89	99,94	10,59	660,99	79,29	1,07
1376	Kota Payakumbuh	70,96	99,36	9,91	646,09	76,99	1,01
1377	Kota Pariaman	69,54	99,05	10,04	636,08	75,46	0,92
1400	RIAU	71,73	98,48	8,78	657,26	77,25	1,51
1401	Kuantan Singingi	68,61	98,12	8,17	654,50	74,77	1,05
1402	Indragiri Hulu	69,03	98,23	8,14	657,21	75,21	1,25
1403	Indragiri Hilir	71,95	99,20	7,66	653,45	76,41	1,10
1404	Pelalawan	69,17	98,53	8,37	640,80	74,27	1,31
1405	Siak	72,07	98,69	9,16	652,96	77,44	0,72
1406	Kampar	68,92	98,64	8,97	656,90	75,83	1,22
1407	Rokan Hulu	67,28	98,44	7,96	653,49	73,87	0,94
1408	Bengkalis	70,61	98,18	9,22	647,40	76,12	1,07
1409	Rokan Hilir	67,41	98,20	7,90	648,34	73,45	1,03
1410	Kepulauan Meranti	69,00	90,57	7,41	642,18	71,80	1,13
1471	Kota Pekanbaru	71,94	99,90	11,42	655,07	79,47	1,48
1473	Kota Dumai	72,29	99,43	9,76	663,70	78,99	1,23

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup	Angka Melek Huruf	Rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	IPM	Reduksi Shortfall
1500	JAMBI	69,61	96,85	8,32	644,05	74,35	2,20
1501	Kerinci	71,19	97,27	8,38	645,68	75,49	1,52
1502	Merangin	69,15	97,54	7,69	637,61	73,28	1,60
1503	Sarolangun	69,85	95,35	7,60	650,05	74,08	1,80
1504	Batanghari	69,80	97,59	7,95	642,88	74,25	1,61
1505	Muara Jambi	69,49	97,60	8,21	640,61	74,10	1,94
1506	Tanjung Jabung Timur	71,23	92,44	6,53	645,12	73,03	1,84
1507	Tanjung Jabung Barat	70,29	97,94	7,69	640,23	74,21	1,92
1508	Tebo	69,47	96,27	7,60	641,12	73,38	2,55
1509	Bungo	67,95	96,68	8,20	645,78	73,44	1,45
1571	Kota Jambi	70,15	99,08	10,57	653,23	77,52	1,91
1572	Kota Sungai Penuh	71,19	98,15	9,69	664,55	78,11	2,16
1600	SUMATERA SELATAN	70,10	97,55	8,04	641,35	74,36	1,45
1601	Ogan Komering Ulu	69,70	98,54	8,51	637,63	74,42	1,55
1602	Ogan Komering Ilir	68,52	96,65	6,83	633,91	71,82	1,27
1603	Muara Enim (Liot)	68,11	98,90	7,65	625,64	72,06	1,43
1604	Lahat	68,99	97,92	8,37	623,27	72,68	1,43
1605	Musi Rawas	65,56	97,37	7,19	620,49	69,57	1,78
1606	Musi Banyuasin	70,44	98,86	7,70	629,37	73,67	1,93
1607	Banyuasin	67,84	96,55	7,09	627,15	71,08	1,30
1608	Ogan Komering Ulu Selatan	69,59	98,36	7,70	624,03	72,67	1,39
1609	Ogan Komering Ulu Timur	68,56	94,93	7,42	624,78	71,19	1,61
1610	Ogan Ilir	66,90	97,80	7,62	622,74	70,89	1,28
1611	Empat Lawang	65,78	98,71	7,69	616,16	70,02	1,09
1612	Penukal Abab Lematang Ilir	64,95	96,30	7,09	612,77	68,31	N/A
1613	Musi Rawas Utara	63,82	97,64	6,24	620,24	67,94	N/A
1671	Kota Palembang	71,67	98,95	10,30	648,11	77,74	1,59
1672	Kota Prabumulih	72,80	98,74	9,29	625,47	75,83	1,54
1673	Kota Pagar Alam	70,70	98,63	9,01	626,01	74,47	1,26
1674	Kota Lubuk Linggau	66,05	98,55	9,44	621,44	71,83	1,30

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup	Angka Melek Huruf	Rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	IPM	Reduksi Shortfall
1700	BENGKULU	70,44	96,55	8,55	637,50	74,41	1,86
1701	Bengkulu Selatan	67,77	96,57	9,05	642,13	73,66	1,81
1702	Rejang Lebong	68,03	96,32	8,02	637,51	72,63	1,52
1703	Bengkulu Utara	69,97	95,41	8,10	638,82	73,67	3,39
1704	Kaur	67,93	97,37	8,17	619,56	71,54	1,42
1705	Seluma	66,26	95,46	7,63	601,69	68,40	2,20
1706	Mukomuko	68,17	94,40	7,74	633,86	71,79	0,93
1707	Lebong	67,49	96,70	7,95	627,40	71,58	1,61
1708	Kepahiang	64,93	96,56	8,10	621,20	69,76	1,16
1709	Bengkulu Tengah	70,28	92,63	7,47	602,25	69,93	1,91
1771	Kota Bengkulu	70,86	99,44	11,26	656,70	78,77	1,22
1800	LAMPUNG	70,09	95,92	7,89	628,24	72,87	1,54
1801	Lampung Barat	67,81	97,59	7,47	611,41	70,37	0,69
1802	Tanggamus	70,21	95,74	7,43	629,53	72,66	1,22
1803	Lampung Selatan	69,05	94,98	7,57	620,44	71,25	1,03
1804	Lampung Timur	70,74	94,52	7,76	619,34	72,14	1,76
1805	Lampung Tengah	69,72	94,88	7,60	629,24	72,30	1,74
1806	Lampung Utara	68,49	96,60	8,10	620,66	71,70	1,49
1807	Way Kanan	69,96	95,22	7,36	613,01	71,08	0,81
1808	Tulang Bawang	69,46	96,13	7,39	623,78	71,86	0,90
1809	Pesawaran	68,71	97,14	7,57	616,73	71,25	1,21
1810	Pringsewu	68,77	96,20	8,64	634,31	73,22	1,56
1811	Mesuji	68,50	94,48	6,39	605,29	68,79	1,56
1812	Tulang Bawang Barat	68,78	95,36	7,49	610,75	70,38	1,83
1813	Pesisir Barat	63,98	96,55	7,71	614,52	68,43	N/A
1871	Kota Bandar Lampung	71,68	98,78	10,30	641,13	77,17	1,46
1872	Kota Metro	72,98	98,45	10,15	638,80	77,53	0,97
1900	KEP. BANGKA BELITUNG	69,46	96,44	7,73	651,22	74,29	1,95
1901	Bangka	68,26	96,80	8,10	652,23	74,05	1,47
1902	Belitung	69,56	97,65	7,99	651,40	74,82	2,69
1903	Bangka Barat	68,32	94,08	7,09	635,73	71,46	1,80
1904	Bangka Tengah	68,39	96,81	7,18	641,67	72,64	1,33
1905	Bangka Selatan	68,33	94,60	6,44	603,00	68,58	2,63
1906	Belitung Timur	69,50	97,63	7,76	636,50	73,46	2,19
1971	Kota Pangkal Pinang	70,95	98,30	10,06	651,75	77,30	1,93

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup	Angka Melek Huruf	Rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	IPM	Reduksi Shortfall
2100	KEPULAUAN RIAU	69,97	98,07	9,91	651,37	76,56	1,51
2101	Karimun	70,11	97,35	8,22	647,71	74,95	1,95
2102	Bintan	69,91	97,32	9,01	656,68	76,10	1,75
2103	Natuna	68,57	97,22	7,94	626,93	72,25	1,71
2104	Lingga	70,48	91,86	7,31	636,68	72,41	1,14
2105	Kepulauan Anambas	67,80	92,14	6,68	636,19	70,48	1,23
2171	Kota Batam	70,96	99,30	10,90	659,27	78,73	1,26
2172	Kota Tanjung Pinang	69,75	98,74	10,18	643,61	76,19	0,92
3100	DKI JAKARTA	73,56	99,22	11,00	637,92	78,59	1,21
3101	Kep. Seribu	70,84	98,43	8,29	596,77	71,73	0,97
3171	Kota Jakarta Selatan	73,96	99,48	11,12	657,61	80,47	1,52
3172	Kota Jakarta Timur	73,75	99,56	11,13	653,50	80,07	1,34
3173	Kota Jakarta Pusat	72,57	99,56	10,87	655,52	79,37	1,19
3174	Kota Jakarta Barat	73,88	99,06	10,76	652,73	79,69	1,27
3175	Kota Jakarta Utara	73,12	99,32	10,11	648,81	78,54	1,32

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup	Angka Melek Huruf	Rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	IPM	Reduksi Shortfall
3200	JAWA BARAT	68,84	96,87	8,11	641,63	73,58	1,75
3201	Bogor	70,20	96,77	8,01	637,42	73,92	3,14
3202	Sukabumi	67,90	98,03	6,97	634,88	71,96	1,61
3203	Cianjur	66,80	98,02	6,88	623,21	70,38	1,20
3204	Bandung	69,37	98,80	8,49	648,36	75,11	1,51
3205	Garut	66,51	99,03	7,39	644,10	72,43	1,10
3206	Tasikmalaya	68,80	98,98	7,35	639,00	73,26	1,57
3207	Ciamis	67,73	98,71	7,68	636,81	72,68	1,95
3208	Kuningan	68,11	97,04	7,52	637,63	72,47	1,71
3209	Cirebon	66,04	93,26	6,90	640,62	70,25	2,21
3210	Majalengka	67,38	96,03	7,27	640,85	71,90	2,58
3211	Sumedang	68,13	98,23	8,06	643,30	73,58	2,32
3212	Indramayu	67,74	86,11	6,25	645,70	69,52	2,01
3213	Subang	69,89	92,54	6,98	638,23	72,10	1,10
3214	Purwakarta	67,74	97,19	7,71	641,64	72,75	1,94
3215	Karawang	67,80	93,45	7,42	639,28	71,56	2,28
3216	Bekasi	70,45	94,94	8,84	644,37	74,80	2,59
3217	Bandung Barat	69,23	99,17	8,14	645,01	74,59	2,17
3218	Pangandaran	66,59	94,22	7,51	634,33	70,74	N/A
3271	Kota Bogor	69,25	99,05	9,82	657,97	76,82	1,51
3272	Kota Sukabumi	70,36	99,74	9,37	643,75	76,16	1,79
3273	Kota Bandung	70,13	99,74	10,63	648,33	77,32	2,00
3274	Kota Cirebon	69,04	98,24	10,14	656,73	76,67	2,73
3275	Kota Bekasi	70,16	98,60	10,85	653,79	77,67	2,16
3276	Kota Depok	73,64	99,04	10,98	658,25	80,14	2,11
3277	Kota Cimahi	69,82	99,82	10,76	643,19	76,86	2,48
3278	Kota Tasikmalaya	70,80	99,79	8,89	639,11	75,71	1,45
3279	Kota Banjar	66,89	98,41	8,19	640,72	72,84	2,64

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup	Angka Melek Huruf	Rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	IPM	Reduksi Shortfall
3300	JAWA TENGAH	71,97	91,71	7,43	646,44	74,05	2,56
3301	Cilacap	71,63	91,97	7,06	642,66	73,34	2,11
3302	Banyumas	70,23	94,77	7,80	645,54	73,96	2,37
3303	Purbalingga	71,08	93,78	7,23	641,63	73,49	1,96
3304	Banjarnegara	69,56	89,02	6,36	644,06	71,13	1,46
3305	Kebumen	69,73	91,78	6,93	644,00	72,25	1,38
3306	Purworejo	71,44	93,53	8,02	641,04	74,18	2,45
3307	Wonosobo	70,58	92,30	6,56	635,33	71,90	1,57
3308	Magelang	70,63	93,64	7,55	644,48	73,67	1,97
3309	Boyolali	70,71	88,12	7,46	637,53	71,88	1,35
3310	Klaten	72,16	90,01	8,33	652,61	74,91	1,76
3311	Sukoharjo	70,64	91,36	8,82	654,95	74,91	2,73
3312	Wonogiri	72,82	84,60	6,71	655,31	73,09	1,83
3313	Karanganyar	72,56	90,32	8,27	654,01	75,27	2,54
3314	Sragen	73,05	84,49	7,34	637,91	72,31	1,65
3315	Grobogan	70,45	91,78	6,86	640,93	72,37	2,13
3316	Blora	72,02	85,46	6,55	647,35	72,10	2,16
3317	Rembang	70,64	92,07	7,30	649,63	73,53	2,65
3318	Pati	73,05	89,56	7,04	655,69	74,58	2,97
3319	Kudus	69,83	94,16	8,49	645,15	74,09	1,49
3320	Jepara	71,23	94,26	7,70	642,98	74,13	2,25
3321	Demak	71,95	93,09	7,62	638,22	73,85	1,22
3322	Semarang	72,90	94,59	8,07	643,84	75,48	2,00
3323	Temanggung	72,87	95,99	7,10	643,28	75,00	1,05
3324	Kendal	69,42	90,23	7,19	645,34	72,03	1,94
3325	Batang	70,97	90,67	6,74	637,12	72,03	2,16
3326	Pekalongan	69,96	93,42	6,80	650,31	73,14	2,79
3327	Pemalang	68,52	91,09	6,56	645,35	71,26	2,04
3328	Tegal	69,58	91,03	6,62	649,84	72,22	1,70
3329	Brebes	68,36	87,68	6,07	642,84	69,85	1,59
3371	Kota Magelang	70,74	98,11	10,42	658,26	77,91	2,84
3372	Kota Surakarta	72,75	96,87	10,53	661,88	79,10	2,36
3373	Kota Salatiga	71,45	96,73	9,98	656,59	77,54	1,81
3374	Kota Semarang	72,44	97,72	10,37	655,84	78,54	2,54
3375	Kota Pekalongan	70,83	96,24	8,75	651,02	75,75	2,02
3376	Kota Tegal	69,42	94,93	8,33	659,71	75,02	1,56

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup	Angka Melek Huruf	Rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	IPM	Reduksi Shortfall
3400	D I YOGYAKARTA	73,62	92,86	9,33	656,19	77,37	2,67
3401	Kulon Progo	75,03	93,13	8,37	635,96	75,95	2,50
3402	Bantul	71,62	92,81	9,02	656,07	76,01	2,04
3403	Gunung Kidul	71,36	85,22	7,79	634,88	71,64	1,82
3404	Sleman	75,79	95,11	10,55	656,00	79,97	2,80
3471	Kota Yogyakarta	73,71	98,43	11,56	658,76	80,51	1,38

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup	Angka Melek Huruf	Rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	IPM	Reduksi Shortfall
3500	JAWA TIMUR	70,37	90,49	7,53	654,02	73,54	2,61
3501	Pacitan	72,18	91,67	7,01	640,29	73,36	1,78
3502	Ponorogo	70,85	89,37	7,49	642,06	72,61	2,47
3503	Trenggalek	72,33	93,07	7,33	646,05	74,44	1,34
3504	Tulungagung	72,02	94,92	7,97	641,29	74,79	1,34
3505	Blitar	71,80	92,12	7,41	658,05	74,92	1,90
3506	Kediri	70,65	92,97	7,75	639,53	73,29	2,11
3507	Malang	69,70	91,22	7,08	645,48	72,34	1,42
3508	Lumajang	67,95	86,63	6,52	639,89	69,50	1,63
3509	Jember	63,64	83,79	6,80	638,75	66,60	1,78
3510	Banyuwangi	68,58	88,44	7,25	642,85	71,02	1,66
3511	Bondowoso	63,95	81,22	5,94	636,55	65,39	1,18
3512	Situbondo	63,95	78,62	6,28	645,21	65,73	1,92
3513	Probolinggo	62,10	80,95	6,31	644,49	65,19	2,35
3514	Pasuruan	64,81	91,71	6,89	647,78	69,77	1,95
3515	Sidoarjo	71,43	97,91	10,23	658,79	78,15	3,47
3516	Mojokerto	71,13	94,47	8,22	652,72	75,26	3,27
3517	Jombang	70,64	94,45	8,06	647,56	74,47	2,33
3518	Nganjuk	69,82	91,16	7,62	641,55	72,49	1,92
3519	Madiun	69,68	90,04	7,47	633,89	71,46	2,01
3520	Magetan	71,96	91,42	7,86	647,09	74,34	1,89
3521	Ngawi	70,97	85,99	7,06	632,35	70,86	2,20
3522	Bojonegoro	67,81	85,13	6,72	627,94	68,32	1,80
3523	Tuban	68,71	86,00	6,82	640,27	70,04	2,78
3524	Lamongan	68,98	89,09	7,79	643,16	71,81	2,65
3525	Gresik	71,57	96,38	9,00	650,79	76,36	1,59
3526	Bangkalan	64,02	82,93	5,75	643,34	66,19	1,48
3527	Sampang	64,52	69,47	4,39	642,16	62,39	1,88
3528	Pamekasan	65,19	84,48	6,42	636,61	67,17	1,96
3529	Sumenep	65,49	78,75	5,73	654,08	66,89	1,43
3571	Kota Kediri	71,36	97,86	10,29	654,26	77,80	2,63
3572	Kota Blitar	73,00	97,48	9,87	659,38	78,70	1,80
3573	Kota Malang	71,14	98,38	10,89	661,39	78,78	1,61
3574	Kota Probolinggo	71,16	92,66	8,79	661,00	75,94	2,04
3575	Kota Pasuruan	66,75	97,12	9,07	661,84	74,75	1,63
3576	Kota Mojokerto	72,48	97,58	10,12	659,92	78,66	2,98
3577	Kota Madiun	71,89	98,15	10,54	652,16	78,17	2,98
3578	Kota Surabaya	72,13	98,40	10,12	664,11	78,97	2,96
3579	Kota Batu	70,32	98,37	8,76	652,91	76,09	2,72

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup	Angka Melek Huruf	Rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	IPM	Reduksi Shortfall
3600	BANTEN	65,47	96,87	8,61	639,28	71,90	1,45
3601	Pandeglang	64,35	96,78	7,04	633,32	69,64	1,36
3602	Lebak	63,62	96,05	6,29	637,32	68,82	1,25
3603	Tangerang	66,33	96,37	8,96	643,04	72,82	1,66
3604	Serang	64,39	96,04	7,48	638,78	70,25	1,38
3671	Kota Tangerang	68,56	98,48	10,07	652,08	76,05	1,34
3672	Kota Cilegon	68,97	98,87	9,72	654,88	76,31	1,75
3673	Kota Serang	66,65	97,35	8,59	645,47	73,12	2,95
3674	Kota Tangerang Selatan	69,17	98,62	10,99	652,52	77,13	2,21
5100	BALI	71,20	91,03	8,58	643,78	74,11	2,34
5101	Jembrana	72,31	92,65	7,87	640,30	74,29	2,55
5102	Tabanan	74,91	91,92	8,40	643,24	76,19	2,64
5103	Badung	72,24	93,93	9,51	648,25	76,37	2,77
5104	Gianyar	72,56	89,38	8,90	647,37	75,02	2,09
5105	Klungkung	69,52	84,47	7,43	661,73	72,25	1,75
5106	Bangli	72,18	85,91	6,70	645,69	72,28	1,68
5107	Karangasem	68,32	76,94	5,90	657,79	68,47	2,01
5108	Buleleng	70,00	90,53	7,55	643,38	72,54	2,17
5171	Kota Denpasar	73,46	97,95	11,05	652,54	79,41	2,86
5200	NUSA TENGGARA BARAT	63,21	85,19	7,20	648,66	67,73	2,52
5201	Lombok Barat	62,13	79,22	6,11	633,44	63,82	1,72
5202	Lombok Tengah	62,44	75,89	6,19	636,00	63,51	2,52
5203	Lombok Timur	62,14	86,16	6,92	630,94	65,78	2,48
5204	Sumbawa	61,43	92,07	7,65	641,66	68,06	2,52
5205	Dompu	61,68	89,07	7,99	648,44	68,31	2,22
5206	Bima	63,95	88,42	7,60	625,11	67,34	2,44
5207	Sumbawa Barat	62,13	93,14	8,03	635,60	68,50	2,03
5208	Lombok Utara	61,72	77,03	5,73	621,41	61,90	1,37
5271	Kota Mataram	68,12	93,68	9,69	653,79	74,58	3,37
5272	Kota Bima	63,62	95,91	10,22	624,72	70,73	3,01

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup	Angka Melek Huruf	Rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	IPM	Reduksi Shortfall
5300	NUSA TENGGARA TIMUR	68,05	90,34	7,16	612,88	68,77	1,57
5301	Sumba Barat	65,75	82,16	6,64	615,31	65,49	1,74
5302	Sumba Timur	62,33	87,31	6,49	604,68	63,80	1,28
5303	Kupang	65,94	90,99	7,49	609,65	67,74	1,90
5304	Timor Tengah Selatan	67,26	84,44	6,71	614,65	66,83	0,67
5305	Timor Tengah Utara	69,19	88,82	6,94	613,28	68,94	1,17
5306	Belu	66,75	85,54	6,76	606,93	66,24	2,08
5307	Alor	67,67	96,02	7,56	607,09	69,67	1,05
5308	Lembata	66,88	93,98	7,38	613,77	69,17	1,53
5309	Flores Timur	68,79	91,55	7,10	620,89	70,03	2,73
5310	Sikka	69,66	92,10	6,80	604,90	69,18	1,38
5311	Ende	65,31	95,01	7,76	612,03	68,67	1,84
5312	Ngada	67,46	96,94	7,66	620,81	70,89	0,92
5313	Manggarai	67,74	93,16	6,87	608,68	68,69	1,25
5314	Rote Nda	68,74	90,14	6,71	598,92	67,70	1,84
5315	Manggarai Barat	66,84	93,04	6,87	598,49	67,38	1,62
5316	Sumba Barat Daya	64,20	75,60	6,23	617,75	63,05	1,53
5317	Sumba Tengah	63,14	77,60	5,39	617,82	62,29	1,53
5318	Nageko	63,89	96,39	7,39	612,24	67,93	2,14
5319	Manggarai Timur	68,19	93,82	6,57	592,53	67,62	1,69
5320	Sabu Raijua	68,01	78,33	5,72	518,35	57,74	1,42
5321	Malaka	66,87	82,43	6,07	501,83	57,01	N/A
5371	Kota Kupang	73,46	98,62	11,29	638,03	78,62	1,18
6100	KALIMANTAN BARAT	67,40	91,70	7,17	641,41	70,93	2,09
6101	Sambas	62,31	91,59	6,22	634,12	66,81	1,83
6102	Bengkayang	69,61	91,42	6,55	612,23	69,38	2,80
6103	Landak	66,35	94,23	7,55	620,61	69,58	1,71
6104	Pontianak	67,66	91,59	6,66	634,52	70,13	2,32
6105	Sanggau	69,39	91,60	6,74	623,43	70,30	2,63
6106	Ketapang	68,37	91,63	6,65	624,23	69,74	2,21
6107	Sintang	69,04	91,60	6,74	619,57	69,81	2,17
6108	Kapuas Hulu	67,17	92,67	7,18	640,73	70,97	1,54
6109	Sekadau	67,71	92,09	6,84	616,12	68,99	1,65
6110	Melawai	68,29	92,45	7,29	617,95	69,86	1,55
6111	Kayong Utara	66,30	89,07	6,02	614,92	66,83	1,90
6112	Kubu Raya	66,83	89,10	7,12	632,59	69,32	1,48
6171	Kota Pontianak	67,88	96,07	9,86	647,82	74,64	1,67
6172	Kota Singkawang	67,86	92,17	7,70	628,29	70,66	2,96

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup	Angka Melek Huruf	Rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran per Kapita D disesuaikan	IPM	Reduksi Shortfall
6200	KALIMANTAN TENGAH	71,47	97,99	8,17	646,01	75,68	0,88
6201	Kotawaringin Barat	71,79	96,12	7,99	643,40	75,11	1,65
6202	Kotawaringin Timur	69,92	98,78	8,08	652,24	75,40	1,07
6203	Kapuas	71,11	97,29	7,35	643,00	74,48	0,58
6204	Barito Selatan	68,47	99,28	8,48	646,15	74,54	0,77
6205	Barito Utara	72,39	98,72	8,41	640,84	76,13	0,68
6206	Sukamara	68,04	96,61	7,62	648,38	73,24	1,33
6207	Lamandau	67,45	98,70	7,84	645,12	73,29	0,62
6208	Seruyan	68,12	99,33	7,80	639,78	73,36	0,43
6209	Katingan	67,72	99,50	8,45	641,96	73,83	0,62
6210	Pulang Pisau	67,79	96,56	7,93	646,52	73,18	1,56
6211	Gunung Mas	68,28	99,70	8,81	639,58	74,26	0,72
6212	Barito Timur	68,00	98,03	8,84	640,91	73,86	0,43
6213	Murung Raya	68,28	99,96	7,53	647,49	73,98	0,80
6271	Kota Palangka Raya	73,69	99,55	10,90	649,15	79,52	1,06
6300	KALIMANTAN SELATAN	64,82	97,18	8,01	646,77	71,74	2,29
6301	Tanah Laut	69,29	96,77	7,65	641,54	73,46	2,62
6302	Kota Baru	66,45	96,73	7,10	663,33	73,15	2,59
6303	Banjar	66,18	96,73	7,33	652,07	72,30	1,18
6304	Barito Kuala	63,04	94,19	7,27	643,78	69,31	1,28
6305	Tapin	68,03	96,87	7,36	636,41	72,18	1,66
6306	Hulu Sungai Selatan	64,87	96,83	7,40	656,68	72,00	1,27
6307	Hulu Sungai Tengah	66,43	97,50	7,61	644,16	72,21	1,91
6308	Hulu Sungai Utara	64,17	96,73	7,57	641,95	70,58	2,17
6309	Tabalong	63,72	97,82	8,25	648,21	71,56	1,76
6310	Tanah Bumbu	65,86	96,59	7,73	644,72	71,82	2,54
6311	Balangan	62,50	96,73	7,05	629,42	68,30	1,82
6371	Kota Banjarmasin	66,66	98,91	10,06	654,79	75,28	1,81
6372	Kota Banjar Baru	68,32	99,54	10,68	655,46	76,86	2,45

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup	Angka Melek Huruf	Rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	IPM	Reduksi Shortfall
6400	KALIMANTAN TIMUR	71,78	97,95	9,39	653,70	77,33	2,65
6401	Pasir	73,99	97,13	8,35	640,09	76,56	2,95
6402	Kutai Barat	70,63	97,12	8,43	638,13	74,61	2,14
6403	Kutai	68,39	98,34	8,89	648,89	74,80	2,18
6404	Kutai Timur	69,17	99,32	8,63	635,61	74,23	1,84
6405	Berau	70,73	97,85	8,82	647,45	75,83	3,11
6409	Penajam Paser Utara	71,94	95,81	7,82	641,13	74,82	1,81
6411	Mahakam Ulu	70,14	97,12	7,33	631,45	73,00	N/A
6471	Kota Balikpapan	72,81	98,99	10,49	665,61	79,87	2,36
6472	Kota Samarinda	71,92	98,62	10,38	660,08	78,79	2,45
6474	Kota Bontang	73,12	99,25	10,45	643,88	78,40	2,45
6500	KALIMANTAN UTARA*	69,70	96,40	8,52	647,51	74,72	N/A
6501	Malinau**	68,62	94,11	8,54	656,74	74,33	2,65
6502	Bulongan**	73,32	95,97	8,24	646,03	76,31	1,17
6503	Tana Tidung**	72,76	91,39	7,65	628,59	73,20	1,99
6504	Nunukan**	72,01	94,82	7,57	649,91	75,13	1,12
6571	Kota Tarakan**	72,19	98,98	9,50	656,27	78,07	1,42
7100	SULAWESI UTARA	72,62	99,56	9,09	646,19	77,36	1,78
7101	Bolaang Mongondow	72,06	98,34	7,48	628,58	74,22	1,49
7102	Minahasa	72,80	99,90	9,55	635,56	77,06	1,60
7103	Kep.Sangihe Talaud	73,55	98,78	7,76	647,10	76,79	1,54
7104	Kepulauan Talaud	72,57	99,60	8,82	637,53	76,47	1,36
7105	Minahasa Selatan	72,76	99,87	8,80	627,05	75,82	1,45
7106	Minahasa Utara	73,09	99,79	9,42	637,33	77,23	1,39
7107	Bolaang Mongondow Utara	70,42	98,68	7,44	636,06	73,94	1,75
7108	Kep. Siau Tagulandang Biaro	69,00	99,82	8,65	639,39	74,56	1,92
7109	Minahasa Tenggara	70,34	99,56	8,43	622,70	73,79	1,40
7110	Bolaang Mongondow Selatan	71,47	99,09	7,32	606,76	72,27	2,25
7111	Bolaang Mongondow Timur	71,51	99,59	7,50	622,45	73,75	1,26
7171	Manado	72,96	99,93	10,92	650,81	79,34	2,01
7172	Kota Bitung	70,90	99,44	9,47	646,31	76,66	1,53
7173	Kota Tomohon	73,13	99,88	10,30	635,90	77,82	1,87
7174	Kota Kotamobago	72,34	99,68	9,54	639,49	77,05	1,56

* Provinsi Kalimantan Utara terbentuk mulai tahun 2012 dengan diterbitkannya UU Nomor 20 Tahun 2012 dan IPM mulai dihitung tahun 2013.

** Sebelum tahun 2013, Kab. Malinau, Kab. Bulongan, Kab. Tana Tidung, Kab. Nunukan, dan Kota Tarakan masih tergabung dalam Provinsi Kalimantan Timur.

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup	Angka Melek Huruf	Rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	IPM	Reduksi Shortfall
7200	SULAWESI TENGAH	67,21	96,22	8,22	640,69	72,54	1,44
7201	Banggai Kepulauan	64,85	95,11	7,96	618,98	69,12	0,70
7202	Banggai	69,03	96,05	8,05	632,34	72,75	1,34
7203	Morowali	65,95	97,54	8,28	641,88	72,27	1,16
7204	Poso	65,52	97,98	8,82	629,02	71,54	1,19
7205	Donggala	66,29	94,75	7,67	642,32	71,42	1,67
7206	Toli-Toli	64,82	95,76	8,09	630,53	70,24	1,87
7207	Buol	65,95	98,75	8,38	621,86	71,07	1,24
7208	Parigi Moutong	66,02	94,85	7,19	634,41	70,33	1,92
7209	Tojo Una-Una	64,22	97,58	7,94	628,01	70,00	0,95
7210	Sigi	66,00	96,59	8,09	603,03	68,96	1,09
7211	Banggai Laut	63,33	97,57	8,08	615,02	68,61	N/A
7212	Morowali Utara	69,46	95,20	8,29	609,31	71,20	N/A
7271	Kota Palu	70,72	99,37	11,07	648,20	77,88	1,78
7300	SULAWESI SELATAN	70,60	89,69	8,01	646,71	73,28	2,14
7301	Selayar	68,08	91,76	7,26	636,53	71,00	1,74
7302	Bulukumba	72,62	88,23	7,17	643,43	73,21	3,17
7303	Bantaeng	74,59	81,40	6,48	642,77	72,22	2,49
7304	Jeneponto	65,40	78,92	6,27	640,30	66,22	1,89
7305	Takalar	70,30	84,69	7,02	640,22	70,77	2,12
7306	Gowa	72,04	83,11	7,37	646,35	72,12	1,84
7307	Sinjai	72,83	88,44	7,10	619,20	71,45	2,77
7308	Maros	73,55	85,52	7,27	647,13	73,48	3,41
7309	Pangkajene Kepulauan	69,16	90,21	7,22	636,88	71,26	2,08
7310	Barru	69,52	89,55	7,89	641,47	72,16	1,62
7311	Bone	70,56	89,04	6,73	645,58	72,08	2,15
7312	Soppeng	71,93	88,74	7,37	646,38	73,31	2,70
7313	Wajo	72,11	85,62	6,98	647,99	72,55	3,10
7314	Sidenreng Rappang	73,38	90,25	7,77	637,24	74,05	2,58
7315	Pinrang	72,81	91,99	7,89	645,86	74,87	1,86
7316	Enrekang	75,66	91,35	8,39	632,76	75,67	1,52
7317	Luwu	74,68	91,82	7,94	638,45	75,33	2,59
7318	Tana Toraja	74,28	90,14	8,26	622,62	73,76	3,15
7322	Luwu Utara	72,03	93,11	7,51	658,27	75,36	1,54
7325	Luwu Timur	71,29	93,87	8,21	636,53	73,96	1,53
7326	Toraja Utara	73,66	87,38	7,88	611,88	71,69	2,24
7371	Kota Makasar	74,38	97,83	10,90	657,68	80,17	3,33
7372	Kota Pare Pare	75,04	97,36	9,91	648,80	79,02	1,84
7373	Kota Palopo	72,93	97,45	10,19	643,94	77,70	1,85

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup	Angka Melek Huruf	Rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	IPM	Reduksi <i>Shortfall</i>
7400	SULAWESI TENGGARA	68,56	92,59	8,44	628,77	71,73	2,35
7401	Buton	69,38	86,65	7,13	634,61	70,35	1,30
7402	Muna	66,66	88,73	7,55	626,42	68,97	1,97
7403	Konawe/Kab Kendari	68,32	94,73	8,90	619,08	71,67	2,48
7404	Kolaka	67,74	93,46	8,28	642,27	72,39	1,41
7405	Konawe Selatan	68,24	94,15	7,69	620,40	70,70	1,54
7406	Bombana	68,52	91,47	7,57	613,89	69,67	3,67
7407	Wakatobi	68,60	93,03	8,07	605,36	69,77	3,19
7408	Kolaka Utara	66,13	94,54	7,82	632,73	70,65	2,61
7409	Buton Utara	69,32	89,36	8,14	614,64	70,13	2,65
7410	Konawe Utara	67,93	94,03	8,43	615,24	70,66	2,69
7411	Kolaka Timur	63,53	92,64	8,98	618,93	68,59	N/A
7412	Konawe Kepulauan	64,81	90,99	6,86	601,74	66,04	N/A
7471	Kota Kendari	69,64	98,69	11,41	643,47	77,02	2,15
7472	Kota Bau-Bau	71,39	95,71	9,97	628,36	75,10	2,04
7500	GORONTALO	67,54	96,87	7,52	633,14	71,77	1,61
7501	Boalemo	68,64	95,82	6,60	611,25	69,78	0,93
7502	Gorontalo	69,57	95,55	6,90	624,02	71,45	1,14
7503	Pokuwato	68,17	97,09	7,04	626,72	71,32	1,92
7504	Bone Bolango	69,28	98,87	7,86	630,70	73,24	2,17
7505	Gorontalo Utara	67,37	96,67	6,93	628,08	70,81	2,89
7571	Kota Gorontalo	67,54	99,67	10,28	636,58	74,71	2,06
7600	SULAWESI BARAT	68,34	90,54	7,35	642,66	71,41	2,35
7601	Majene	66,11	96,53	8,51	652,90	73,16	2,71
7602	Polewali Mamasa	65,62	87,64	7,08	644,06	69,17	2,31
7603	Mamasa	71,48	89,43	7,19	639,65	72,56	1,77
7604	Mamuju	69,08	91,20	7,58	632,74	71,38	2,10
7605	Mamuju Utara	67,66	95,65	7,37	628,95	71,14	1,20
7606	Mamuju Tengah	70,95	91,14	6,66	631,00	71,59	N/A

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup	Angka Melek Huruf	Rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	IPM	Reduksi Shortfall
8100	MALUKU	67,88	98,25	9,20	622,59	72,70	1,00
8101	Maluku Tenggara Barat	64,62	99,94	8,99	606,50	69,87	0,99
8102	Maluku Tenggara	68,47	99,60	8,93	628,71	73,60	1,21
8103	Maluku Tengah	66,09	99,15	8,90	624,30	71,81	0,92
8104	Buru	68,98	92,87	7,95	617,56	70,79	0,87
8105	Kepulauan Aru	68,24	99,16	8,31	607,65	71,29	1,30
8106	Seram Bagian Barat	66,88	98,33	8,74	608,75	70,75	1,20
8107	Seram Bagian Timur	66,35	98,21	7,95	599,09	69,11	0,65
8108	Maluku Barat Daya	64,59	98,60	8,11	590,54	67,67	0,88
8109	Buru Selatan	67,85	89,80	7,34	632,97	70,23	0,85
8171	Kota Ambon	73,33	99,67	11,39	647,46	79,58	0,85
8172	Kota Tual	69,41	99,78	9,96	667,54	77,91	1,30
8200	MALUKU UTARA	66,97	97,45	8,72	609,26	70,63	2,16
8201	Halmahera Barat	65,23	97,51	8,03	601,37	68,56	2,82
8202	Halmahera Tengah	67,78	96,86	8,27	608,39	70,55	1,73
8203	Kepulauan Sula	66,01	97,48	8,58	603,81	69,59	2,43
8204	Halmahera Selatan	66,30	96,27	7,70	611,91	69,45	1,84
8205	Halmahera Utara	66,61	97,91	8,46	609,45	70,36	1,71
8206	Halmahera Timur	66,28	97,26	7,85	607,40	69,42	2,28
8207	Pulau Morotai	66,07	95,45	7,41	587,29	67,03	2,80
8208	Pulau Taliabu	64,74	94,55	7,66	570,58	64,99	N/A
8271	Kota Ternate	71,66	99,56	11,24	646,53	78,44	3,68
8272	Kota Tidore Kepulauan	65,54	97,76	9,06	617,58	70,80	1,18
9100	PAPUA BARAT	69,14	94,14	8,53	604,82	70,62	1,34
9101	Fak-Fak	71,33	99,12	9,65	599,05	73,33	2,51
9102	Kaimana	70,11	97,49	8,39	605,73	71,87	2,25
9103	Teluk Wondama	68,06	85,79	7,62	605,45	67,54	2,22
9104	Teluk Bintuni	68,90	87,41	7,22	604,05	67,95	1,15
9105	Manokwari	68,73	89,98	8,62	592,86	68,61	1,68
9106	Sorong Selatan	67,07	88,56	8,10	596,59	67,28	1,34
9107	Sorong	68,65	92,09	8,19	606,19	69,74	1,66
9108	Raja Ampat	67,07	94,86	7,64	567,35	66,08	1,73
9109	Tambrauw	66,48	77,72	5,83	449,68	51,54	0,74
9110	Maybrat	66,95	91,41	8,64	588,25	67,60	1,05
9111	Manokwari Selatan	66,64	77,45	7,10	571,62	61,91	N/A
9112	Pegunungan Arfak	66,93	74,89	8,09	565,41	61,75	N/A
9171	Kota Sorong	72,80	99,71	11,02	646,11	78,92	2,56

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup	Angka Melek Huruf	Rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	IPM	Reduksi Shortfall
9400	PAPUA	69,13	75,92	6,87	616,76	66,25	1,15
9401	Merauke	63,85	88,55	9,47	609,35	67,48	2,87
9402	Jayawijaya	66,86	53,08	5,32	600,90	57,55	0,76
9403	Jayapura	67,74	97,21	9,79	635,13	73,79	2,61
9404	Nabire	68,05	83,73	7,33	626,51	68,49	1,43
9408	Yapen Waropen	69,10	90,94	6,76	641,47	71,40	1,44
9409	Biak Namfor	67,06	99,01	9,67	600,19	71,03	1,21
9410	Paniai	68,36	62,97	6,23	595,13	60,81	0,68
9411	Puncak Jaya	67,86	86,83	6,13	632,95	68,68	0,97
9412	Mimika	70,88	88,27	6,94	621,51	70,39	1,25
9413	Boven Digoel	67,62	35,28	3,65	589,86	51,93	1,04
9414	Mappi	66,66	33,50	4,37	596,97	52,08	1,15
9415	Asmat	67,34	31,18	4,44	602,78	52,44	0,52
9416	Yahukimo	67,44	32,77	2,93	595,08	51,14	0,82
9417	Pegunungan Bintang	66,24	32,64	2,62	596,51	50,32	0,98
9418	Tolikara	66,24	33,56	3,48	621,15	53,06	0,86
9419	Sarmi	66,58	87,77	7,02	624,57	68,18	1,40
9420	Keerom	67,53	92,50	7,45	628,84	70,42	1,56
9426	Waropen	66,24	78,35	6,56	614,24	64,77	1,46
9427	Supiori	66,53	96,76	8,15	605,17	69,50	1,00
9428	Membramo Raya	66,34	65,43	5,21	610,20	60,64	1,15
9429	Nduga	66,02	30,61	2,82	588,62	49,29	0,96
9430	Lanny Jaya	66,70	36,93	3,75	579,59	51,07	0,95
9431	Mamberamo Tengah	66,62	34,58	2,94	582,29	50,11	0,76
9432	Yalimo	66,78	33,72	2,85	581,32	49,86	1,10
9433	Puncak	67,85	32,17	2,86	582,12	50,18	0,82
9434	Dogiyai	67,44	34,68	4,17	581,24	51,42	0,67
9435	Intan Jaya	66,87	28,08	2,30	598,91	49,61	0,86
9436	Deiyai	66,64	31,05	2,97	593,06	50,19	0,77
9471	Kota Jayapura	68,77	99,86	11,07	650,99	77,12	2,08
0000	INDONESIA	70,07	94,14	8,14	643,36	73,81	1,97

Lampiran 3 Tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota, 2011-2013

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	2011	2012	2013
1100	ACEH	72,16	72,51	73,05
1101	Simeulue	69,73	70,09	70,76
1102	Aceh Singkil	68,98	69,37	69,79
1103	Aceh Selatan	70,36	70,71	71,18
1104	Aceh Tenggara	71,94	72,25	72,81
1105	Aceh Timur	70,94	71,17	71,79
1106	Aceh Tengah	74,18	74,42	75,04
1107	Aceh Barat	71,20	71,73	72,24
1108	Aceh Besar	73,83	74,13	74,51
1109	Pidie	72,43	72,81	73,32
1110	Bireuen	73,38	73,70	74,03
1111	Aceh Utara	72,85	73,07	73,51
1112	Aceh Barat Daya	70,95	71,53	72,07
1113	Gayo Lues	68,22	68,54	69,09
1114	Aceh Tamiang	71,26	71,65	72,04
1115	Nagan Raya	69,68	70,64	71,50
1116	Aceh Jaya	69,99	70,35	71,00
1117	Bener Meriah	71,51	71,86	72,39
1118	Pidie Jaya	72,82	73,13	73,69
1171	Kota Banda Aceh	78,00	78,50	79,00
1172	Kota Sabang	76,47	76,88	77,23
1173	Kota Langsa	74,37	74,75	75,10
1174	Kota Lhokseumawe	76,68	77,23	77,84
1175	Kota Subulussalam	69,63	70,06	70,60

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	2011	2012	2013
1200	SUMATERA UTARA	74,65	75,13	75,55
1201	Nias	69,09	69,55	69,93
1202	Mandailing Natal	71,04	71,44	71,72
1203	Tapanuli Selatan	74,45	74,78	75,13
1204	Tapanuli Tengah	71,63	72,04	72,55
1205	Tapanuli Utara	74,86	75,33	75,81
1206	Toba Samosir	76,93	77,21	77,49
1207	Labuhan Batu	74,65	75,29	75,71
1208	Asahan	73,25	73,80	74,23
1209	Simalungun	73,94	74,35	74,55
1210	Dairi	73,49	73,86	74,22
1211	Karo	75,79	76,22	76,76
1212	Deli Serdang	75,78	76,17	76,82
1213	Langkat	73,62	73,98	74,38
1214	Nias Selatan	67,72	68,23	68,58
1215	Humbang Hasundutan	72,43	72,80	73,09
1216	Pakpak Barat	71,20	72,00	72,54
1217	Samosir	74,27	74,72	75,02
1218	Serdang Bedagai	73,64	74,07	74,41
1219	Batu Bara	72,08	72,71	73,26
1220	Padang Lawas Utara	73,25	73,59	73,96
1221	Padang Lawas	72,55	72,96	73,27
1222	Labuhan Batu Selatan	74,38	74,90	75,48
1223	Labuhan Batu Utara	74,14	74,92	75,70
1224	Nias Utara	68,18	68,71	69,39
1225	Nias Barat	67,10	67,59	67,91
1271	Kota Sibolga	75,50	75,73	76,19
1272	Kota Tanjung Balai	74,72	75,06	75,44
1273	Kota Pematang Siantar	77,93	78,27	78,62
1274	Kota Tebing Tinggi	76,91	77,34	77,96
1275	Kota Medan	77,81	78,25	78,62
1276	Kota Binjai	76,88	77,36	77,79
1277	Kota Padang Sidempuan	75,58	76,04	76,31
1278	Gunung Sitoli	72,21	72,61	72,99

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	2011	2012	2013
1300	SUMATERA BARAT	74,28	74,70	75,01
1301	Kepulauan Mentawai	69,06	69,26	69,72
1302	Pesisir Selatan	71,77	72,43	72,98
1303	Solok	71,73	72,15	72,46
1304	Sawah Lunto/Sijunjung	71,40	71,80	72,15
1305	Tanah Datar	74,58	75,00	75,29
1306	Padang Pariaman	71,98	72,53	72,93
1307	Agam	73,74	74,11	74,50
1308	Limapuluh Koto	71,78	72,24	72,54
1309	Pasaman	73,19	73,78	74,10
1310	Solok Selatan	69,34	69,69	70,23
1311	Dharmas Raya	69,89	70,25	70,52
1312	Pasaman Barat	70,62	71,07	71,39
1371	Kota Padang	78,15	78,55	78,82
1372	Kota Solok	76,04	76,54	76,85
1373	Kota Sawah Lunto	75,41	75,87	76,11
1374	Kota Padang Panjang	78,12	78,51	78,81
1375	Kota Bukit Tinggi	78,73	79,07	79,29
1376	Kota Payakumbuh	76,29	76,76	76,99
1377	Kota Pariaman	74,89	75,23	75,46
1400	RIAU	76,53	76,90	77,25
1401	Kuantan Sengingi	74,15	74,50	74,77
1402	Indragiri Hulu	74,54	74,90	75,21
1403	Indragiri Hilir	75,71	76,15	76,41
1404	Pelalawan	73,59	73,92	74,27
1405	Siak	76,92	77,27	77,44
1406	Kampar	75,18	75,54	75,83
1407	Rokan Hulu	73,10	73,62	73,87
1408	Bengkalis	75,53	75,86	76,12
1409	Rokan Hilir	72,83	73,17	73,45
1410	Kepulauan Meranti	71,08	71,47	71,80
1471	Kota Pekanbaru	78,72	79,16	79,47
1473	Kota Dumai	78,25	78,73	78,99

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	2011	2012	2013
1500	JAMBI	73,30	73,78	74,35
1501	Kerinci	74,76	75,11	75,49
1502	Merangin	72,40	72,85	73,28
1503	Sarolangun	73,08	73,61	74,08
1504	Batanghari	73,44	73,83	74,25
1505	Muara Jambi	73,12	73,59	74,10
1506	Tanjung Jabung Timur	72,05	72,52	73,03
1507	Tanjung Jabung Barat	73,24	73,70	74,21
1508	Tebo	72,30	72,69	73,38
1509	Bungo	72,50	73,05	73,44
1571	Kota Jambi	76,60	77,08	77,52
1572	Kota Sungai Penuh	77,02	77,63	78,11
1600	SUMATERA SELATAN	73,42	73,99	74,36
1601	Ogan Komering Ulu	73,59	74,01	74,42
1602	Ogan Komering Ilir	71,07	71,45	71,82
1603	Muara Enim (Liot)	71,26	71,65	72,06
1604	Lahat	71,83	72,29	72,68
1605	Musi Rawas	68,38	69,01	69,57
1606	Musi Banyuasin	72,44	73,15	73,67
1607	Banyuasin	70,28	70,70	71,08
1608	Ogan Komering Ulu Selatan	71,82	72,29	72,67
1609	Ogan Komering Ulu Timur	70,34	70,72	71,19
1610	Ogan Ilir	70,09	70,52	70,89
1611	Empat Lawang	69,08	69,69	70,02
1612	Penukal Abab Lematang Ilir	N/A	N/A	68,31
1613	Musi Rawas Utara	N/A	N/A	67,94
1671	Kota Palembang	76,69	77,38	77,74
1672	Kota Prabumulih	74,94	75,45	75,83
1673	Kota Pagar Alam	73,70	74,15	74,47
1674	Kota Lubuk Linggau	71,10	71,46	71,83

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	2011	2012	2013
1700	BENGKULU	73,40	73,93	74,41
1701	Bengkulu Selatan	72,78	73,18	73,66
1702	Rejang Lebong	71,70	72,21	72,63
1703	Bengkulu Utara	72,19	72,74	73,67
1704	Kaur	70,43	71,13	71,54
1705	Seluma	67,29	67,69	68,40
1706	Mukomuko	71,11	71,53	71,79
1707	Lebong	70,66	71,12	71,58
1708	Kepahiang	68,63	69,41	69,76
1709	Bengkulu Tengah	69,01	69,35	69,93
1771	Bengkulu	77,99	78,51	78,77
1800	LAMPUNG	71,94	72,45	72,87
1801	Lampung Barat	69,72	70,17	70,37
1802	Tanggamus	71,83	72,32	72,66
1803	Lampung Selatan	70,53	70,95	71,25
1804	Lampung Timur	71,26	71,64	72,14
1805	Lampung Tengah	71,29	71,81	72,30
1806	Lampung Utara	70,81	71,28	71,70
1807	Way Kanan	70,43	70,84	71,08
1808	Tulang Bawang	70,96	71,60	71,86
1809	Pesawaran	70,30	70,90	71,25
1810	Pringsewu	72,37	72,80	73,22
1811	Mesuji	67,98	68,30	68,79
1812	Tulang Bawang Barat	69,32	69,82	70,38
1813	Pesisir Barat	N/A	N/A	68,43
1871	Kota Bandar Lampung	76,29	76,83	77,17
1872	Kota Metro	76,95	77,30	77,53
1900	KEP. BANGKA BELITUNG	73,37	73,78	74,29
1901	Bangka	73,23	73,67	74,05
1902	Belitung	73,77	74,13	74,82
1903	Bangka Barat	70,54	70,94	71,46
1904	Bangka Tengah	71,63	72,27	72,64
1905	Bangka Selatan	67,36	67,73	68,58
1906	Belitung Timur	72,44	72,87	73,46
1971	Kota Pangkal Pinang	76,54	76,85	77,30

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	2011	2012	2013
2100	KEPULAUAN RIAU	75,78	76,20	76,56
2101	Karimun	73,99	74,45	74,95
2102	Kepulauan Riau	75,17	75,68	76,10
2103	Natuna	71,26	71,77	72,25
2104	Lingga	71,68	72,09	72,41
2105	Kepulauan Anambas	69,50	70,11	70,48
2171	Kota Batam	78,03	78,46	78,73
2172	Kota Tanjung Pinang	75,25	75,97	76,19
3100	DKI JAKARTA	77,97	78,33	78,59
3101	Kep. Seribu	71,16	71,45	71,73
3171	Kota Jakarta Selatan	79,82	80,17	80,47
3172	Kota Jakarta Timur	79,31	79,80	80,07
3173	Kota Jakarta Pusat	78,68	79,12	79,37
3174	Kota Jakarta Barat	79,09	79,43	79,69
3175	Kota Jakarta Utara	77,93	78,25	78,54

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	2011	2012	2013
3200	JAWA BARAT	72,73	73,11	73,58
3201	Bogor	72,58	73,08	73,92
3202	Sukabumi	71,06	71,50	71,96
3203	Cianjur	69,59	70,02	70,38
3204	Bandung	74,43	74,73	75,11
3205	Garut	71,70	72,12	72,43
3206	Tasikmalaya	72,51	72,84	73,26
3207	Ciamis	71,81	72,14	72,68
3208	Kuningan	71,55	71,99	72,47
3209	Cirebon	69,27	69,58	70,25
3210	Majalengka	70,81	71,16	71,90
3211	Sumedang	72,67	72,95	73,58
3212	Indramayu	68,40	68,89	69,52
3213	Subang	71,50	71,79	72,10
3214	Purwakarta	71,59	72,21	72,75
3215	Karawang	70,28	70,89	71,56
3216	Bekasi	73,54	74,13	74,80
3217	Bandung Barat	73,80	74,03	74,59
3218	Pangandaran	N/A	N/A	70,74
3271	Kota Bogor	76,08	76,47	76,82
3272	Kota Sukabumi	75,36	75,73	76,16
3273	Kota Bandung	76,39	76,86	77,32
3274	Kota Cirebon	75,42	76,02	76,67
3275	Kota Bekasi	76,68	77,17	77,67
3276	Kota Depok	79,36	79,71	80,14
3277	Kota Cimahi	76,01	76,28	76,86
3278	Kota Tasikmalaya	74,85	75,35	75,71
3279	Kota Banjar	71,82	72,10	72,84

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	2011	2012	2013
3300	JAWA TENGAH	72,94	73,36	74,05
3301	Cilacap	72,34	72,77	73,34
3302	Banyumas	72,96	73,33	73,96
3303	Purbalingga	72,50	72,97	73,49
3304	Banjarnegara	70,39	70,70	71,13
3305	Kebumen	71,62	71,86	72,25
3306	Purworejo	72,91	73,53	74,18
3307	Wonosobo	71,06	71,45	71,90
3308	Magelang	72,69	73,14	73,67
3309	Boyolali	71,25	71,50	71,88
3310	Klaten	74,10	74,46	74,91
3311	Sukoharjo	73,97	74,21	74,91
3312	Wonogiri	71,86	72,59	73,09
3313	Karanganyar	73,82	74,62	75,27
3314	Sragen	71,33	71,85	72,31
3315	Grobogan	71,27	71,77	72,37
3316	Blora	71,25	71,49	72,10
3317	Rembang	72,45	72,81	73,53
3318	Pati	73,49	73,81	74,58
3319	Kudus	73,24	73,69	74,09
3320	Jepara	73,12	73,54	74,13
3321	Demak	73,09	73,52	73,85
3322	Semarang	74,45	74,98	75,48
3323	Temanggung	74,47	74,74	75,00
3324	Kendal	70,85	71,48	72,03
3325	Batang	71,06	71,41	72,03
3326	Pekalongan	71,86	72,37	73,14
3327	Pemalang	70,22	70,66	71,26
3328	Tegal	71,09	71,74	72,22
3329	Brebes	68,61	69,37	69,85
3371	Kota Magelang	76,83	77,26	77,91
3372	Kota Surakarta	78,18	78,60	79,10
3373	Kota Salatiga	76,83	77,13	77,54
3374	Kota Semarang	77,42	77,98	78,54
3375	Kota Pekalongan	74,90	75,25	75,75
3376	Kota Tegal	74,20	74,63	75,02

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	2011	2012	2013
3400	D I YOGYAKARTA	76,32	76,75	77,37
3401	Kulon Progo	75,04	75,33	75,95
3402	Bantul	75,05	75,51	76,01
3403	Gunung Kidul	70,84	71,11	71,64
3404	Sleman	78,79	79,39	79,97
3471	Kota Yogyakarta	79,89	80,24	80,51

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	2011	2012	2013
3500	JAWA TIMUR	72,18	72,83	73,54
3501	Pacitan	72,48	72,88	73,36
3502	Ponorogo	71,15	71,91	72,61
3503	Trenggalek	73,66	74,09	74,44
3504	Tulungagung	73,76	74,45	74,79
3505	Blitar	74,06	74,43	74,92
3506	Kediri	72,28	72,72	73,29
3507	Malang	71,17	71,94	72,34
3508	Lumajang	68,55	69,00	69,50
3509	Jember	65,53	65,99	66,60
3510	Banyuwangi	69,58	70,53	71,02
3511	Bondowoso	63,81	64,98	65,39
3512	Situbondo	64,67	65,06	65,73
3513	Probolinggo	63,84	64,35	65,19
3514	Pasuruan	68,24	69,17	69,77
3515	Sidoarjo	76,90	77,36	78,15
3516	Mojokerto	73,89	74,42	75,26
3517	Jombang	73,14	73,86	74,47
3518	Nganjuk	71,48	71,96	72,49
3519	Madiun	70,50	70,88	71,46
3520	Magetan	73,17	73,85	74,34
3521	Ngawi	69,73	70,20	70,86
3522	Bojonegoro	67,32	67,74	68,32
3523	Tuban	68,71	69,18	70,04
3524	Lamongan	70,52	71,05	71,81
3525	Gresik	75,17	75,97	76,36
3526	Bangkalan	65,01	65,69	66,19
3527	Sampang	60,78	61,67	62,39
3528	Pamekasan	65,48	66,51	67,17
3529	Sumenep	66,01	66,41	66,89
3571	Kota Kediri	76,79	77,20	77,80
3572	Kota Blitar	77,89	78,31	78,70
3573	Kota Malang	77,76	78,43	78,78
3574	Kota Probolinggo	74,85	75,44	75,94
3575	Kota Pasuruan	73,89	74,33	74,75
3576	Kota Mojokerto	77,50	78,01	78,66
3577	Kota Madiun	77,07	77,50	78,17
3578	Kota Surabaya	77,85	78,33	78,97
3579	Kota Batu	74,93	75,42	76,09

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	2011	2012	2013
3600	BANTEN	70,95	71,49	71,90
3601	Pandeglang	68,77	69,22	69,64
3602	Lebak	67,98	68,43	68,82
3603	Tangerang	72,05	72,36	72,82
3604	Serang	69,33	69,83	70,25
3671	Kota Tangerang	75,44	75,72	76,05
3672	Kota Cilegon	75,60	75,89	76,31
3673	Kota Serang	71,45	72,30	73,12
3674	Kota Tangerang Selatan	76,01	76,61	77,13
5100	BALI	72,84	73,49	74,11
5101	Jembrana	73,18	73,62	74,29
5102	Tabanan	75,24	75,55	76,19
5103	Badung	75,35	75,69	76,37
5104	Gianyar	73,43	74,49	75,02
5105	Klungkung	71,02	71,76	72,25
5106	Bangli	71,42	71,80	72,28
5107	Karangasem	67,07	67,83	68,47
5108	Buleleng	71,12	71,93	72,54
5171	Kota Denpasar	78,31	78,80	79,41
5200	NUSA TENGGARA BARAT	66,23	66,89	67,73
5201	Lombok Barat	62,50	63,19	63,82
5202	Lombok Tengah	61,66	62,57	63,51
5203	Lombok Timur	63,93	64,91	65,78
5204	Sumbawa	66,67	67,23	68,06
5205	Dompu	66,70	67,58	68,31
5206	Bima	65,74	66,52	67,34
5207	Sumbawa Barat	67,08	67,85	68,50
5208	Lombok Utara	60,93	61,37	61,90
5271	Kota Mataram	72,83	73,70	74,58
5272	Kota Bima	69,10	69,83	70,73

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	2011	2012	2013
5300	NUSA TENGGARA TIMUR	67,75	68,28	68,77
5301	Sumba Barat	64,31	64,88	65,49
5302	Sumba Timur	62,50	63,33	63,80
5303	Kupang	66,77	67,12	67,74
5304	Timor Tengah Selatan	66,29	66,61	66,83
5305	Timor Tengah Utara	67,93	68,57	68,94
5306	Belu	64,75	65,52	66,24
5307	Alor	68,92	69,35	69,67
5308	Lembata	68,07	68,69	69,17
5309	Flores Timur	68,71	69,19	70,03
5310	Sikka	68,22	68,74	69,18
5311	Ende	67,58	68,08	68,67
5312	Ngada	70,13	70,63	70,89
5313	Manggarai	67,81	68,30	68,69
5314	Rote Nda	66,61	67,10	67,70
5315	Manggarai Barat	66,09	66,84	67,38
5316	Sumba Barat Daya	61,42	62,48	63,05
5317	Sumba Tengah	61,22	61,70	62,29
5318	Nageko	66,59	67,23	67,93
5319	Manggarai Timur	66,55	67,06	67,62
5320	Sabu Rajjua	56,12	57,12	57,74
5321	Malaka	N/A	N/A	57,01
5371	Kota Kupang	77,71	78,37	78,62
6100	KALIMANTAN BARAT	69,66	70,31	70,93
6101	Sambas	65,80	66,19	66,81
6102	Bengkayang	67,98	68,50	69,38
6103	Landak	68,16	69,05	69,58
6104	Pontianak	69,07	69,42	70,13
6105	Sanggau	68,97	69,50	70,30
6106	Ketapang	68,63	69,05	69,74
6107	Sintang	68,77	69,14	69,81
6108	Kapuas Hulu	70,38	70,52	70,97
6109	Sekadau	67,52	68,47	68,99
6110	Melawai	69,01	69,39	69,86
6111	Kayong Utara	65,75	66,19	66,83
6112	Kubu Raya	68,06	68,86	69,32
6171	Kota Pontianak	73,43	74,21	74,64
6172	Kota Singkawang	69,21	69,77	70,66

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	2011	2012	2013
6200	KALIMANTAN TENGAH	75,06	75,46	75,68
6201	Kotawaringin Barat	74,19	74,69	75,11
6202	Kotawaringin Timur	74,74	75,14	75,40
6203	Kapuas	74,00	74,33	74,48
6204	Barito Selatan	74,01	74,34	74,54
6205	Barito Utara	75,50	75,97	76,13
6206	Sukamara	72,42	72,88	73,24
6207	Lamandau	72,74	73,13	73,29
6208	Seruyan	72,93	73,24	73,36
6209	Katingan	73,32	73,67	73,83
6210	Pulang Pisau	72,37	72,75	73,18
6211	Gunung Mas	73,73	74,08	74,26
6212	Barito Timur	73,33	73,75	73,86
6213	Murung Raya	73,34	73,77	73,98
6271	Kota Palangka Raya	78,78	79,30	79,52
6300	KALIMANTAN SELATAN	70,44	71,08	71,74
6301	Tanah Laut	72,00	72,75	73,46
6302	Kota Baru	71,69	72,43	73,15
6303	Banjar	71,35	71,96	72,30
6304	Barito Kuala	68,36	68,92	69,31
6305	Tapin	71,00	71,71	72,18
6306	Hulu Sungai Selatan	71,20	71,64	72,00
6307	Hulu Sungai Tengah	71,19	71,67	72,21
6308	Hulu Sungai Utara	69,45	69,92	70,58
6309	Tabalong	70,45	71,05	71,56
6310	Tanah Bumbu	70,41	71,09	71,82
6311	Balangan	67,35	67,71	68,30
6371	Kota Banjarmasin	74,24	74,83	75,28
6372	Kota Banjar Baru	75,43	76,28	76,86
6400	KALIMANTAN TIMUR	76,22	76,71	77,33
6401	Pasir	75,40	75,85	76,56
6402	Kutai Barat	73,69	74,05	74,61
6403	Kutai	73,51	74,24	74,80
6404	Kutai Timur	72,88	73,75	74,23
6405	Berau	74,63	75,05	75,83
6409	Penajam Paser Utara	74,03	74,35	74,82
6411	Mahakam Ulu	N/A	N/A	73,00
6471	Kota Balikpapan	78,85	79,38	79,87
6472	Kota Samarinda	77,63	78,26	78,79
6474	Kota Bontang	77,52	77,85	78,40

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	2011	2012	2013
6500	KALIMANTAN UTARA*	N/A	N/A	74,72
6501	Malinau**	73,26	73,63	74,33
6502	Bulongan**	75,54	76,03	76,31
6503	Tana Tidung**	71,87	72,66	73,20
6504	Nunukan**	74,38	74,84	75,13
6571	Kota Tarakan**	77,19	77,76	78,07
7100	SULAWESI UTARA	76,54	76,95	77,36
7101	Bolaang Mongondow	73,47	73,83	74,22
7102	Minahasa	76,12	76,69	77,06
7103	Kep. Sangihe Talaud	76,07	76,42	76,79
7104	Kepulauan Talaud	75,76	76,14	76,47
7105	Minahasa Selatan	75,10	75,46	75,82
7106	Minahasa Utara	76,54	76,91	77,23
7107	Bolaang Mongondow Utara	73,08	73,48	73,94
7108	Kep. Siau Tagulandang Biaro	73,70	74,06	73,79
7109	Minahasa Tenggara	73,09	73,42	74,56
7110	Bolaang Mongondow Selatan	70,87	71,63	72,27
7111	Bolaang Mongondow Timur	72,97	73,41	73,75
7171	Manado	78,57	78,92	79,34
7172	Kota Bitung	75,96	76,30	76,66
7173	Kota Tomohon	76,92	77,40	77,82
7174	Kota Kotamobago	76,03	76,68	77,05
7200	SULAWESI TENGAH	71,62	72,14	72,54
7201	Banggai Kepulauan	68,28	68,90	69,12
7202	Banggai	71,84	72,37	72,75
7203	Morowali	71,47	71,95	72,27
7204	Poso	70,71	71,20	71,54
7205	Donggala	70,32	70,94	71,42
7206	Toli-Toli	69,25	69,67	70,24
7207	Buol	70,27	70,71	71,07
7208	Parigi Moutong	69,28	69,75	70,33
7209	Tojo Una-Una	69,28	69,71	70,00
7210	Sigi	68,16	68,61	68,96
7211	Banggai Laut	N/A	N/A	68,61
7212	Morowali Utara	N/A	N/A	71,20
7271	Kota Palu	76,92	77,48	77,88

* Provinsi Kalimantan Utara terbentuk mulai tahun 2012 dengan diterbitkannya UU Nomor 20 Tahun 2012 dan IPM mulai dihitung tahun 2013.

** Sebelum tahun 2013, Kab. Malinau, Kab. Bulongan, Kab. Tana Tidung, Kab. Nunukan, dan Kota Tarakan masih tergabung dalam Provinsi Kalimantan Timur.

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	2011	2012	2013
7300	SULAWESI SELATAN	72,14	72,70	73,28
7301	Selayar	70,00	70,49	71,00
7302	Bulukumba	71,77	72,33	73,21
7303	Bantaeng	70,66	71,51	72,22
7304	Jeneponto	65,27	65,56	66,22
7305	Takalar	69,09	70,14	70,77
7306	Gowa	71,29	71,60	72,12
7307	Sinjai	70,16	70,64	71,45
7308	Maros	71,74	72,54	73,48
7309	Pangkajene Kepulauan	69,89	70,65	71,26
7310	Barru	71,19	71,70	72,16
7311	Bone	70,77	71,47	72,08
7312	Soppeng	72,23	72,57	73,31
7313	Wajo	71,04	71,67	72,55
7314	Sidenreng Rappang	72,74	73,36	74,05
7315	Pinrang	73,80	74,39	74,87
7316	Enrekang	74,84	75,30	75,67
7317	Luwu	74,42	74,68	75,33
7318	Tana Toraja	72,29	72,90	73,76
7322	Luwu Utara	74,69	74,97	75,36
7325	Luwu Timur	73,11	73,56	73,96
7326	Toraja Utara	70,15	71,04	71,69
7371	Kota Makasar	79,11	79,49	80,17
7372	Kota Pare Pare	78,19	78,63	79,02
7373	Kota Palopo	76,85	77,28	77,70
7400	SULAWESI TENGGARA	70,55	71,05	71,73
7401	Buton	69,34	69,95	70,35
7402	Muna	67,95	68,35	68,97
7403	Konawe/Kab Kendari	70,42	70,95	71,67
7404	Kolaka	71,46	72,00	72,39
7405	Konawe Selatan	69,80	70,24	70,70
7406	Bombana	67,85	68,51	69,67
7407	Wakatobi	68,04	68,78	69,77
7408	Kolaka Utara	69,33	69,87	70,65
7409	Buton Utara	68,86	69,31	70,13
7410	Konawe Utara	69,24	69,84	70,66
7411	Kolaka Timur	N/A	N/A	68,59
7412	Konawe Kepulauan	N/A	N/A	66,04
7471	Kota Kendari	76,07	76,51	77,02
7472	Kota Bau-Bau	74,10	74,58	75,10

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	2011	2012	2013
7500	GORONTALO	70,82	71,31	71,77
7501	Boalemo	69,16	69,49	69,78
7502	Gorontalo	70,63	71,12	71,45
7503	Pokuwato	70,36	70,76	71,32
7504	Bone Bolango	72,22	72,65	73,24
7505	Gorontalo Utara	69,37	69,94	70,81
7571	Kota Gorontalo	73,67	74,17	74,71
7600	SULAWESI BARAT	70,11	70,73	71,41
7601	Majene	71,86	72,41	73,16
7602	Polewali Mamasa	67,88	68,44	69,17
7603	Mamasa	71,62	72,07	72,56
7604	Mamuju	69,78	70,76	71,38
7605	Mamuju Utara	70,41	70,79	71,14
7606	Mamuju Tengah	N/A	N/A	71,59
8100	MALUKU	71,87	72,42	72,70
8101	Maluku Tenggara Barat	69,23	69,57	69,87
8102	Maluku Tenggara	72,85	73,27	73,60
8103	Maluku Tengah	71,25	71,55	71,81
8104	Buru	69,75	70,54	70,79
8105	Kepulauan Aru	70,33	70,91	71,29
8106	Seram Bagian Barat	70,07	70,40	70,75
8107	Seram Bagian Timur	68,53	68,90	69,11
8108	Maluku Barat Daya	66,99	67,38	67,67
8109	Buru Selatan	69,13	69,97	70,23
8171	Kota Ambon	78,97	79,41	79,58
8172	Kota Tual	77,10	77,62	77,91
8200	MALUKU UTARA	69,47	69,98	70,63
8201	Halmahera Barat	67,38	67,65	68,56
8202	Halmahera Tengah	69,60	70,03	70,55
8203	Kepulauan Sula	68,42	68,83	69,59
8204	Halmahera Selatan	68,50	68,87	69,45
8205	Halmahera Utara	68,87	69,84	70,36
8206	Halmahera Timur	68,30	68,71	69,42
8207	Pulau Morotai	65,09	66,08	67,03
8208	Pulau Taliabu	N/A	N/A	64,99
8271	Kota Ternate	77,05	77,62	78,44
8272	Kota Tidore Kepulauan	69,97	70,45	70,80

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	2011	2012	2013
9100	PAPUA BARAT	69,65	70,22	70,62
9101	Fak-Fak	72,13	72,64	73,33
9102	Kaimana	70,71	71,22	71,87
9103	Teluk Wondama	66,06	66,80	67,54
9104	Teluk Bintuni	67,17	67,58	67,95
9105	Manokwari	67,67	68,07	68,61
9106	Sorong Selatan	66,59	66,83	67,28
9107	Sorong	68,93	69,23	69,74
9108	Raja Ampat	65,06	65,49	66,08
9109	Tambrauw	50,81	51,18	51,54
9110	Maybrat	66,43	67,26	67,60
9111	Manokwari Selatan	N/A	N/A	61,91
9112	Pegunungan Arfak	N/A	N/A	61,75
9171	Kota Sorong	77,72	78,36	78,92

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	2011	2012	2013
9400	PAPUA	65,36	65,86	66,25
9401	Merauke	66,19	66,52	67,48
9402	Jayawijaya	56,60	57,22	57,55
9403	Jayapura	72,75	73,09	73,79
9404	Nabire	67,33	68,03	68,49
9408	Yapen Waropen	70,19	70,98	71,40
9409	Biak Namfor	70,33	70,68	71,03
9410	Paniai	60,22	60,54	60,81
9411	Puncak Jaya	68,34	68,37	68,68
9412	Mimika	69,68	70,02	70,39
9413	Boven Digoel	50,64	51,43	51,93
9414	Mappi	50,83	51,53	52,08
9415	Asmat	51,92	52,19	52,44
9416	Yahukimo	50,30	50,73	51,14
9417	Pegunungan Bintang	49,45	49,83	50,32
9418	Tolikara	52,43	52,66	53,06
9419	Sarmi	67,15	67,73	68,18
9420	Keerom	69,64	69,95	70,42
9426	Waropen	63,71	64,24	64,77
9427	Supiori	68,92	69,19	69,50
9428	Membramo Raya	59,86	60,18	60,64
9429	Nduga	48,43	48,80	49,29
9430	Lanny Jaya	50,20	50,60	51,07
9431	Mamberamo Tengah	49,32	49,73	50,11
9432	Yalimo	48,90	49,31	49,86
9433	Puncak	49,35	49,77	50,18
9434	Dogiyai	50,49	51,09	51,42
9435	Intan Jaya	48,74	49,17	49,61
9436	Deiyai	49,31	49,80	50,19
9471	Kota Jayapura	76,29	76,64	77,12
0000	INDONESIA	72,77	73,29	73,81

Lampiran 4 Tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Provinsi, 2007-2013

Kode	Provinsi	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1100	ACEH	70,35	70,76	71,31	71,70	72,16	72,51	73,05
1200	SUMATERA UTARA	72,78	73,29	73,80	74,19	74,65	75,13	75,55
1300	SUMATERA BARAT	72,23	72,96	73,44	73,78	74,28	74,70	75,01
1400	RIAU	74,63	75,09	75,60	76,07	76,53	76,90	77,25
1500	JAMBI	71,46	71,99	72,45	72,74	73,30	73,78	74,35
1600	SUMATERA SELATAN	71,40	72,05	72,61	72,95	73,42	73,99	74,36
1700	BENGKULU	71,57	72,14	72,55	72,92	73,40	73,93	74,41
1800	LAMPUNG	69,78	70,30	70,93	71,42	71,94	72,45	72,87
1900	KEP. BANGKA BELITUNG	71,62	72,19	72,55	72,86	73,37	73,78	74,29
2100	KEPULAUAN RIAU	73,68	74,18	74,54	75,07	75,78	76,20	76,56
3100	DKI JAKARTA	76,59	77,03	77,36	77,60	77,97	78,33	78,59
3200	JAWA BARAT	70,71	71,12	71,64	72,29	72,73	73,11	73,58
3300	JAWA TENGAH	70,92	71,60	72,10	72,49	72,94	73,36	74,05
3400	D I YOGYAKARTA	74,15	74,88	75,23	75,77	76,32	76,75	77,37
3500	JAWA TIMUR	69,78	70,38	71,06	71,62	72,18	72,83	73,54
3600	BANTEN	69,29	69,70	70,06	70,48	70,95	71,49	71,90
5100	BALI	70,53	70,98	71,52	72,28	72,84	73,49	74,11
5200	NUSA TENGGARA BARAT	63,71	64,12	64,66	65,20	66,23	66,89	67,73
5300	NUSA TENGGARA TIMUR	65,36	66,15	66,60	67,26	67,75	68,28	68,77
6100	KALIMANTAN BARAT	67,53	68,17	68,79	69,15	69,66	70,31	70,93
6200	KALIMANTAN TENGAH	73,49	73,88	74,36	74,64	75,06	75,46	75,68
6300	KALIMANTAN SELATAN	68,01	68,72	69,30	69,92	70,44	71,08	71,74
6400	KALIMANTAN TIMUR	73,77	74,52	75,11	75,56	76,22	76,71	77,33
6500	KALIMANTAN UTARA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	74,72
7100	SULAWESI UTARA	74,68	75,16	75,68	76,09	76,54	76,95	77,36
7200	SULAWESI TENGAH	69,34	70,09	70,70	71,14	71,62	72,14	72,54
7300	SULAWESI SELATAN	69,62	70,22	70,94	71,62	72,14	72,70	73,28
7400	SULAWESI TENGGARA	68,32	69,00	69,52	70,00	70,55	71,05	71,73
7500	GORONTALO	68,83	69,29	69,79	70,28	70,82	71,31	71,77
7600	SULAWESI BARAT	67,72	68,55	69,18	69,64	70,11	70,73	71,41
8100	MALUKU	69,96	70,38	70,96	71,42	71,87	72,42	72,70
8200	MALUKU UTARA	67,82	68,18	68,63	69,03	69,47	69,98	70,63
9100	PAPUA BARAT	67,28	67,95	68,58	69,15	69,65	70,22	70,62
9400	PAPUA	63,41	64,00	64,53	64,94	65,36	65,86	66,25
0000	Indonesia	70,59	71,17	71,76	72,27	72,77	73,29	73,81

Lampiran 5 Tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Negara ASEAN, 2000-2013

Peringkat th 2012	Peringkat th 2013	Negara	2000	2005	2008	2010	2011	2012	2013
12	9	Singapura	0,800	0,840	0,868	0,894	0,896	0,899	0,901
30	30	Brunei Darussalam	0,822	0,838	0,843	0,844	0,846	0,852	0,852
62	62	Malaysia	0,717	0,747	0,760	0,766	0,768	0,770	0,773
89	89	Thailand	0,649	0,685	0,704	0,715	0,716	0,720	0,722
108	108	Indonesia	0,609	0,640	0,654	0,671	0,678	0,681	0,684
118	117	Filipina	0,619	0,638	0,648	0,651	0,652	0,656	0,660
121	121	Vietnam	0,563	0,598	0,617	0,629	0,632	0,635	0,638
137	136	Kamboja	0,466	0,536	0,564	0,571	0,575	0,579	0,584
139	139	Laos	0,473	0,511	0,533	0,549	0,560	0,565	0,569
150	150	Myanmar	0,421	0,472	0,500	0,514	0,517	0,520	0,524

Sumber: Human Development Report 2014

Catatan Teknis

Konsep Pembangunan Manusia

“Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan yang sederhana. Tetapi hal ini seringkali terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang.”

Kalimat pembuka pada *Human Development Report* (HDR) pertama yang dipublikasikan oleh UNDP tahun 1990 secara jelas menekankan arti pentingnya pembangunan yang berpusat pada manusia – yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir, dan bukan sebagai alat pembangunan.

Konsep ini terdengar berbeda dibanding konsep klasik pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan manusia memperluas pembahasan tentang konsep pembangunan dari diskusi tentang cara-cara (pertumbuhan PDB) ke diskusi tentang tujuan akhir dari pembangunan. Pembangunan manusia juga merupakan perwujudan jangka panjang, yang meletakkan pembangunan di sekeliling manusia, dan bukan manusia di sekeliling pembangunan.

Mengutip isi HDR pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.

Untuk menghindari kekeliruan dalam memaknai konsep ini, perbedaan antara cara pandang pembangunan manusia terhadap pembangunan dengan pendekatan konvensional yang menekankan pertumbuhan ekonomi, pembentukan modal manusia, pembangunan sumber daya manusia, kesejahteraan rakyat, dan pemenuhan kebutuhan dasar, perlu diperjelas. Konsep pembangunan manusia mempunyai cakupan yang lebih luas dari teori konvensional pembangunan ekonomi.

Model ‘pertumbuhan ekonomi’ lebih menekankan pada peningkatan PNB daripada memperbaiki kualitas hidup manusia. ‘Pembangunan sumber daya manusia’ cenderung untuk memperlakukan manusia sebagai input dari proses produksi – sebagai alat, bukan sebagai tujuan akhir. Pendekatan ‘kesejahteraan’ melihat manusia sebagai penerima dan bukan sebagai agen dari perubahan dalam proses pembangunan. Adapun pendekatan

'kebutuhan dasar' terfokus pada penyediaan barang-barang dan jasa-jasa untuk kelompok masyarakat tertinggal, bukannya memperluas pilihan yang dimiliki manusia di segala bidang.

Pendekatan pembangunan manusia menggabungkan aspek produksi dan distribusi komoditas, serta peningkatan dan pemanfaatan kemampuan manusia. Pembangunan manusia melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat – pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik ataupun nilai-nilai kultural – dari sudut pandang manusia. Pembangunan manusia juga mencakup isu penting lainnya, yaitu gender. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua sektor.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak (Gambar A). Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (*Purchasing Power Parity*). Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Penghitungan angka harapan hidup melalui pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Paket program *Mortpack* digunakan untuk menghitung angka harapan hidup berdasarkan input data ALH dan AMH. Selanjutnya, dipilih metode *Trussel* dengan model *West*, yang sesuai dengan histori kependudukan dan kondisi Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara umumnya (Preston, 2004).

Indeks harapan hidup dihitung dengan menghitung nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, yaitu angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 25 tahun.

Tingkat Pendidikan

Salah satu komponen pembentuk IPM adalah dari dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) dan angka melek huruf. Pada proses pembentukan IPM, rata-rata lama sekolah memiliki bobot sepertiga dan angka melek huruf diberi bobot dua pertiga, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pendidikan sebagai salah satu komponen pembentuk IPM.

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun.

Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, angka melek huruf juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara. Batas maksimum untuk angka melek huruf adalah 100, sedangkan batas minimumnya 0 (nol). Nilai 100 menggambarkan kondisi 100 persen atau semua masyarakat mampu membaca dan menulis, sedangkan nilai 0 mencerminkan kondisi sebaliknya.

Standar Hidup Layak

Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula *Atkinson*.

$$\begin{aligned}
 C(i) &= C_{(i)} && \text{Jika } C_{(i)} < Z \\
 &= Z + 2(C_{(i)} - Z)1/2 && \text{Jika } Z < C_{(i)} < 2Z \\
 &= Z + 2(Z)1/2 + 3(C_{(i)} - 2Z)1/3 && \text{Jika } 2Z < C_{(i)} < 3Z
 \end{aligned}$$

dan seterusnya.

Keterangan: $C(i)$ = PPP dari nilai riil pengeluaran per kapita

Z = Batas tingkat pengeluaran yang ditetapkan secara arbiter sebesar Rp549.500 per kapita per tahun atau Rp 1.500 per kapita per hari

Penghitungan indeks daya beli dilakukan berdasarkan 27 komoditas kebutuhan pokok seperti terlihat dalam Tabel A. Batas maksimum dan minimum penghitungan daya beli digunakan seperti terlihat dalam Tabel 2. Batas maksimum daya beli adalah sebesar Rp 732.720,- sementara sampai dengan tahun 1996 batas minimumnya adalah Rp 300.000. Pada tahun 1996 dengan mengikuti kondisi pascakrisis ekonomi batas minimum

penghitungan PPP diubah dan disepakati menjadi Rp 360.000.

Komoditi	Unit	Komoditi	Unit
1. Beras Lokal	Kg	15. Pepaya	Kg
2. Tepung terigu	Kg	16. Kelapa	Butir
3. Singkong	Kg	17. Gula	Ons
4. Tuna/Cakalang	Kg	18. Kopi	Ons
5. Teri	Ons	19. Garam	Ons
6. Daging sapi	Kg	20. Merica	Ons
7. Ayam	Kg	21. Mie instan	80 Gram
8. Telur	Butir	22. Rokok Kretek	10 batang
9. Susu kental manis	397 Gram	23. Listrik	Kwh
10. Bayam	Kg	24. Air minum	M3
11. Kacang panjang	Kg	25. Bensin	Liter
12. Kacang tanah	Kg	26. Minyak tanah	Liter
13. Tempe	Kg	27. Sewa rumah	Unit
14. Jeruk	Kg		

Tabel A.
Komoditi Kebutuhan Pokok sebagai Dasar Penghitungan Daya Beli (PPP)



Gambar A.
Diagram Penghitungan IPM

Penyusunan Indeks

Sebelum penghitungan IPM, setiap komponen IPM harus dihitung indeksinya. Formula yang digunakan dalam penghitungan indeks komponen IPM adalah sebagai berikut:

$$Indeks X_{(i)} = \frac{X_{(i)} - X_{(min)}}{X_{(maks)} - X_{(min)}}$$

Keterangan: $X_{(i)}$ = Komponen IPM ke- i
 $X_{(min)}$ = Nilai minimum dari komponen IPM ke- i
 $X_{(maks)}$ = Nilai maksimum dari komponen IPM ke- i

Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum seperti terlihat dalam Tabel B.

Tabel B.
 Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen IPM

Komponen IPM	Maksimum	Minimum	Keterangan
1. Angka Harapan Hidup (Tahun)	85	25	Standar UNDP
2. Angka Melek Huruf (Persen)	100	0	Standar UNDP
3. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	15	0	
4. Daya Beli (Rupiah)	732.720a	300.000 (1996) 360.000b (1999,dst)	Pengeluaran per Kapita Riil Disesuaikan

Keterangan :

a) Perkiraan maksimum pada akhir PJP II tahun 2018

b) Penyesuaian garis kemiskinan lama dengan garis kemiskinan baru

Selanjutnya nilai IPM dapat dihitung sebagai:

$$IPM_j = \frac{1}{3} \sum_j Indeks X_{ij}$$

Keterangan:

Indeks X(i,j) = Indeks komponen IPM ke i untuk wilayah ke-j

i = 1, 2, 3 (urutan komponen IPM)

j = 1, 2 k (wilayah)

Reduksi *Shortfall*

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran reduksi *shortfall* per tahun. Reduksi *shortfall* menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian yang harus ditempuh untuk mencapai titik IPM ideal (100). Semakin tinggi nilai reduksi *shortfall*, semakin cepat peningkatan IPM.

Reduksi *shortfall* dihitung dengan:

$$r = \left(\frac{IPM_{t+n} - IPM_t}{IPM_{ideal} - IPM_t} \times 100 \right)^{\frac{1}{n}}$$

Keterangan: r = Reduksi *Shortfall*

t = tahun

n = selisih tahun antar-IPM

IPM_{ideal} = 100

Definisi Istilah-Istilah Statistik

Anak Lahir Hidup

Banyaknya kelahiran hidup dari sekelompok atau beberapa kelompok wanita selama masa reproduksinya.

Anak Masih Hidup

Jumlah anak masih hidup yang dimiliki seorang wanita sampai saat wawancara dilakukan.

Angka Buta Huruf (dewasa)

Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang tidak dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Dihitung dengan cara 100 dikurangi dengan angka melek huruf (dewasa).

Angka Harapan Hidup pada waktu lahir (e_0)

Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.

Angka Kematian Balita (AKBa)

Jumlah kematian anak berusia 0 – 4 tahun selama satu tahun tertentu per 1.000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi).

Angka Kematian Bayi (AKB)

Jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup.

Angka Melek Huruf (dewasa)

Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya.

Angka Partisipasi Sekolah

Proporsi dari keseluruhan penduduk dari berbagai kelompok usia tertentu (7-12, 13-15, 16-18, dan 19-24) yang masih duduk di bangku sekolah.

Angka Putus Sekolah

Proporsi dari penduduk berusia antara 7 hingga 15 tahun yang tidak menyelesaikan sekolah dasar atau sekolah menengah tingkat pertama.

Garis Kemiskinan

Nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar kebutuhan-kebutuhan pangan yang setara dengan 2.100 kkal per kapita per hari dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk dapat hidup secara layak.

Gross Enrollment Ratio (GER)

Jumlah pelajar yang terdaftar di suatu tingkat pendidikan, tanpa memperhatikan umur, sebagai persentase terhadap jumlah populasi usia sekolah resmi untuk tingkat pendidikan tersebut. Netenrollmentratio adalah jumlah pelajar pada kisaran usia sekolah resmi terdaftar di tingkat pendidikan tertentu sebagai persentase dari jumlah penduduk yang berada pada usia sekolah resmi untuk tingkat pendidikan tersebut. Usia sekolah resmi di Indonesia adalah 7-12 tahun untuk sekolah dasar, 13-15 tahun untuk sekolah menengah pertama, 16-18 tahun untuk sekolah menengah atas, dan 19-24 tahun untuk perguruan tinggi.

Indeks Harga Konsumen (IHK)

Indeks yang menunjukkan perbandingan relatif antara tingkat harga pada saat bulan survei dan tingkat harga pada sebelumnya, yang ditimbang dengan nilai konsumsi pada kedua bulan tersebut. IHK dihitung dengan formula Laspeyres yang dimodifikasi.

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks komposit yang dibangun dari beberapa variabel untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan memperhatikan disparitas gender. Komponen-komponen IPG sama dengan komponen-komponen IPM yang telah disesuaikan dengan memasukkan disparitas tingkat pencapaian antara laki-laki dengan perempuan. Nilai indeks berkisar antara 0-100.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks komposit yang disusun dari tiga indikator: lama hidup yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir; pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas; dan standar hidup yang diukur dengan pengeluaran per kapita (PPP rupiah). Nilai indeks berkisar antara 0-100.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks komposit yang disusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan wanita dalam proses pengambilan keputusan di bidang politik dan ekonomi. IDG didasarkan pada tiga indikator: persentase wanita di parlemen; persentase wanita di lingkungan pekerja profesional, teknis, tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan; serta sumbangan wanita sebagai penghasil pendapatan. Nilai indeks berkisar antara 0 – 100.

Keterwakilan Perempuan di Parlemen

Proporsi dari jumlah keseluruhan kursi yang diduduki oleh anggota parlemen berjenis kelamin perempuan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan kursi yang tersedia bagi anggota parlemen.

Mortalitas

Keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup.

Produk Domestik Bruto (PDB)

Jumlah nilai tambah bruto (total output dari barang dan jasa) yang diproduksi oleh semua sektor ekonomi di suatu negara selama periode waktu tertentu.

Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber dayayang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.

Penduduk Miskin

Jumlah keseluruhan populasi dengan pengeluaran per kapita berada di bawah suatu ambang batas tertentu yang dinyatakan sebagai garis kemiskinan.

Pertumbuhan Ekonomi

Perubahan relatif nilai riil produk domestik bruto dalam suatu periode tertentu.

Purchasing Power Parity (PPP)

Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai paritas daya beli, yang memungkinkan dilakukannya perbandingan harga-harga riil antarprovinsi dan antarkabupaten, mengingat nilai tukar yang biasa digunakan dapat menurunkan atau menaikkan nilai daya beli yang terukur dari konsumsi per kapita yang telah disesuaikan. Dalam konteks PPP untuk Indonesia, satu rupiah di suatu provinsi memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di Jakarta. PPP dihitung berdasarkan pengeluaran riil per kapita setelah disesuaikan dengan indeks harga konsumen dan penurunan kegunaan (utilitas) marginal yang dihitung dengan rumus *Atkinson*.

Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

Reduksi *Shortfall*

Reduksi *shortfall* menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian yang harus ditempuh untuk mencapai titik IPM ideal (100). Semakin tinggi nilai reduksi *shortfall*, semakin cepat peningkatan IPM.

Standar Deviasi

Dalam statistika dan probabilitas, simpangan baku atau deviasi standar adalah ukuran sebaran statistik yang paling lazim. Singkatnya, ia mengukur bagaimana nilai-nilai data tersebar. Simpangan baku didefinisikan sebagai akar kuadrat varians. Simpangan baku merupakan bilangan tak-negatif, dan memiliki satuan yang sama dengan data. Misalnya jika suatu data diukur dalam satuan meter, maka simpangan baku juga diukur dalam meter pula.

Sumbangan Pendapatan Perempuan

Perkiraan proporsi dari pendapatan yang disumbangkan perempuan terhadap seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh populasi.

“Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan yang sederhana. Tetapi hal ini seringkali terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang.”
(*Human Development Report 1990*)

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Tel. (021) 3841195, 3842508, 3810291-4 Fax. (021) 3857046

Homepage: <http://www.bps.go.id> email: bpsHQ@bps.go.id